



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN

TAHUN 2025



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala setiap tahun.

LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 juga dapat diakses melalui laman resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada alamat: <https://e-ppid.tangerangselatankota.go.id>. Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran, serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Tangerang Selatan, 10 April 2026

Wali Kota Tangerang Selatan

BENYAMIN DAVNIE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

Kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan terkendali, dengan 76,37% indikator telah mencapai atau mendekati target, terdiri dari 41,82% melampaui target dan 34,55% mendekati target. Kinerja unggul terutama pada sektor pendidikan, pelayanan publik, digitalisasi, investasi, dan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian, khususnya pada kemiskinan, literasi, ketahanan pangan, sanitasi, produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan, yang menunjukkan perlunya penguatan kualitas intervensi berbasis outcome.

Kinerja Pengelolaan Anggaran

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 mencapai Rp4,68 triliun atau sebesar 93,31% dari pagu anggaran, menunjukkan kinerja penyerapan yang tinggi dan terkendali. Dibandingkan Tahun 2024, realisasi mengalami peningkatan yang mencerminkan penguatan kapasitas fiskal dan konsistensi pelaksanaan program pembangunan.

Program dengan Kontribusi Anggaran Terbesar

Program-program dengan kontribusi anggaran terbesar umumnya berada pada sektor layanan dasar dan prioritas pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik. Program-program tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian indikator kinerja, khususnya dalam peningkatan kualitas layanan masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Analisis Kinerja dan Efisiensi

Secara umum, terdapat konsistensi antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif efektif. Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada kualitas belanja, terutama dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak optimal terhadap outcome pembangunan. Efisiensi belum sepenuhnya tercermin pada sektor-sektor dengan kinerja rendah, yang menunjukkan adanya gap antara serapan anggaran dan hasil yang dicapai.

Area Prioritas Peningkatan Kinerja. Area prioritas ke depan difokuskan pada:

1. Percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan literasi masyarakat dan kualitas SDM
3. Penguatan ketahanan pangan dan sanitasi perkotaan
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penguatan ekonomi berbasis nilai tambah
5. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya sampah dan kualitas air
6. Optimalisasi kebijakan berbasis data dan integrasi lintas sektor

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR GAMBAR.....	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
1.4.1. Struktur Organisasi.....	5
1.4.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	7
1.4.3. Aspek Strategis.....	12
1.4.4. Isu Strategis.....	15
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP TAHUN 2025.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH	20
2.1.1. Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan Yang Diampu Perangkat Daerah.....	20
2.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029.....	21
2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2025.....	28
2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	28
2.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	48
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	56
3.2.1. Capaian Realisasi Kinerja.....	56
3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya.....	102
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	106
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional.....	112
3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	119
3.2.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran).....	126
3.2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja.....	132
3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	170
3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	170
BAB IV PENUTUP	172
4.1. KESIMPULAN.....	172
4.2. SARAN.....	173
LAMPIRAN.....	174

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Jabatan Tahun 2025.....	9
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.....	10
Tabel 1.3.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025.....	13
Tabel 1.4.	Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan	13
Tabel 1.5.	Isu Strategis Kota Tangerang Selatan	15
Tabel 2.1.	Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Periode 2025-2029.....	22
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebelum perubahan.....	28
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 setelah perubahan	31
Tabel 2.4.	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	37
Tabel 3.1.	Kategori Status Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	49
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 Perubahan PK "Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua" Tahun 2025.....	57
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 Perubahan PK "Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua" Tahun 2025	59
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 Perubahan PK "Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial" Tahun 2025.....	61
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 4 Perubahan PK "Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak" Tahun 2025.....	63
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 5 Perubahan PK "Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan" Tahun 2025	66
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 6 Perubahan PK "Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital" Tahun 2025.....	68
Tabel 3.9.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 7 Perubahan PK "Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global" Tahun 2025.....	70
Tabel 3.10.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 8 Perubahan PK "Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi" Tahun 2025	73
Tabel 3.11.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 9 Perubahan PK "Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan" Tahun 2025.....	75

Tabel 3.12.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 10 Perubahan PK "Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif" Tahun 2025	77
Tabel 3.13.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 11 Perubahan PK "Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis" Tahun 2025.....	79
Tabel 3.14.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 12 Perubahan PK "Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien" Tahun 2025.....	81
Tabel 3.15.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 13 Perubahan PK "Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan" Tahun 2025	85
Tabel 3.16.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 14 Perubahan PK "Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima" Tahun 2025	87
Tabel 3.17.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 15 Perubahan PK "Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan" Tahun 2025.....	89
Tabel 3.18.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 16 Perubahan PK "Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah" Tahun 2025	90
Tabel 3.19.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 17 Perubahan PK "Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan" Tahun 2025	92
Tabel 3.20.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 18 Perubahan PK "Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat" Tahun 2025.....	93
Tabel 3.21.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 19 Perubahan PK "Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni" Tahun 2025.....	95
Tabel 3.22.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 20 Perubahan PK "Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan" Tahun 2025	98
Tabel 3.23.	Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 21 Perubahan PK "Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila" Tahun 2025.....	100
Tabel 3.24.	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya.....	102
Tabel 3.25.	Ringkasan Status Pencapaian RPJMD	106
Tabel 3.26.	Progres Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD 2029	108
Tabel 3.27.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Daerah dan Nasional.....	113
Tabel 3.28.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SDG's	116
Tabel 3.29.	Ringkasan Status Capaian Indikator SDG's Kota Tangerang Selatan s.d Tahun 2025.....	118
Tabel 3.30.	Ringkasan Status Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	119
Tabel 3.31.	Diagnosis Permasalahan dan Strategi Perbaikan Kinerja Indikator Tahun 2025	124

Tabel 3.32.	Peta Risiko Pencapaian Target RPJMD Kota Tangerang Selatan	125
Tabel 3.33.	Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025.....	126
Tabel 3.34.	Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis.....	133
Tabel 3.35.	Program dengan Kontribusi Terbesar terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	168
Tabel 3.36.	Program yang Memerlukan Penguatan untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	169
Tabel 3.38.	Realisasi Anggaran Tahun 2025	170
Tabel 3.38.	Program dengan Alokasi Anggaran Terbesar.....	170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
Gambar 1.2.	Jumlah Pegawai Kota Tangerang Selatan Menurut Gender Tahun 2025	7
Gambar 1.3.	Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Golongan Ruang Tahun 2025.....	8
Gambar 1.4.	Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Pendidikan Tahun 2025	9
Gambar 3.1.	Grafik Distribusi Status Indikator Kinerja	119
Gambar 3.2.	Peta Kuadran Kinerja–Efisiensi Sasaran Strategis Tahun 2025	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut untuk semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara kinerja. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta capaian kinerja pembangunan daerah.

Penyusunan LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP menyajikan informasi mengenai capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, khususnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta analisis capaian kinerja sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun strategis bagi Kota Tangerang Selatan karena menjadi bagian dari awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029. Pada tahun tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, yang membawa penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, sasaran, indikator, dan target kinerja daerah. Penetapan RPJMD tersebut berdampak pada penyesuaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 serta penganggaran melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, Kota Tangerang Selatan menghadapi dinamika pembangunan perkotaan yang cukup kompleks, antara lain peningkatan kebutuhan layanan dasar, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, penyediaan infrastruktur dan layanan perkotaan

yang berkualitas, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan terukur.

Dengan demikian, LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 151);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 58);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 34);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 29);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 51);
14. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 21).
15. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pergeseran 1) ((Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (pergeseran 2) (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
17. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 43);
18. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (pergeseran 1 pasca P-APBD) (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 50);
19. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (pergeseran 2 pasca P-APBD) (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 59);

20. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (pergeseran 3 pasca P-APBD) (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 Nomor 64).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya Pasal 5 yang menyatakan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Selain itu, penyusunan LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

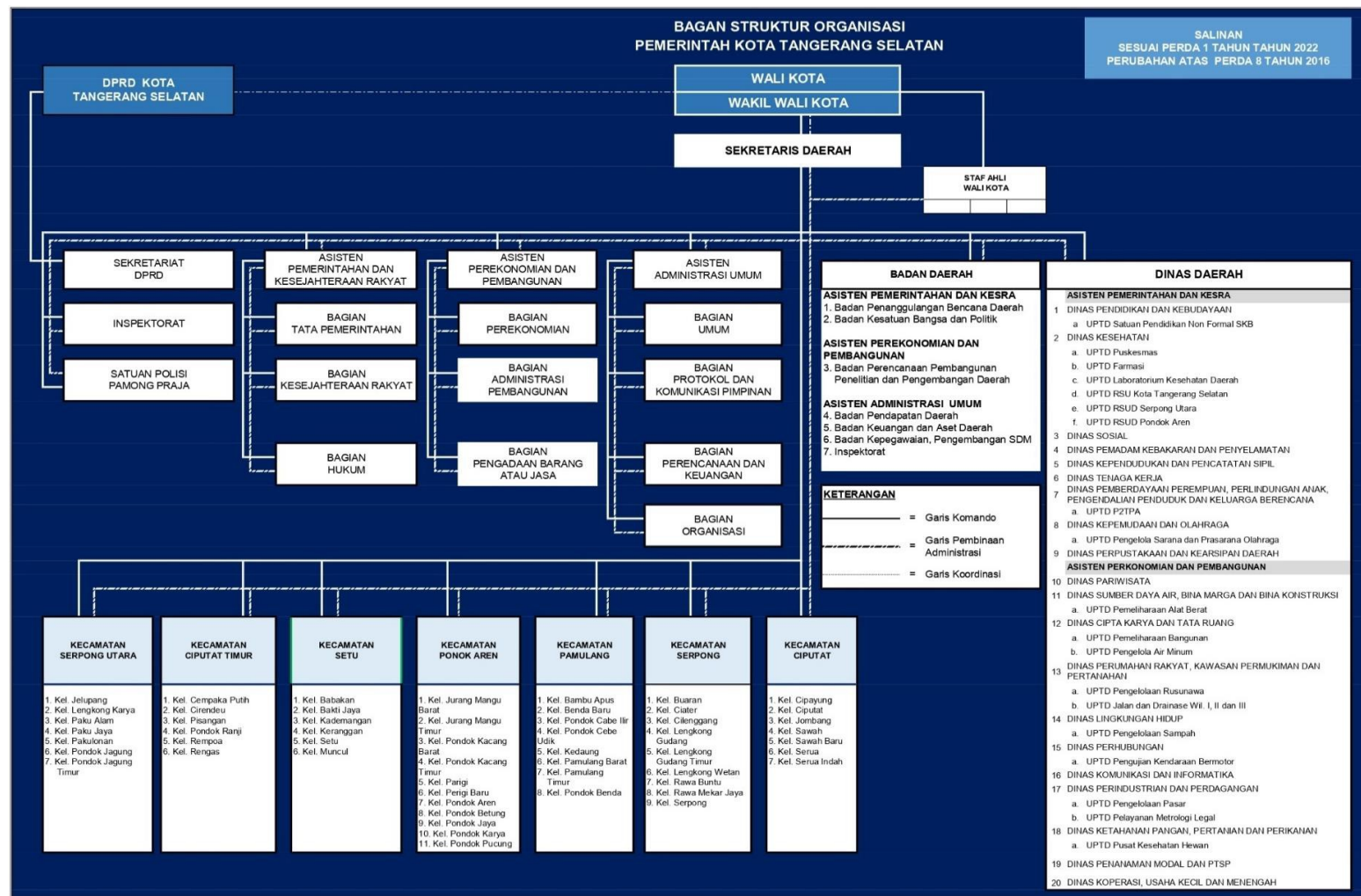
Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah yang efektif dan akuntabel. Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022.

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah, antara lain Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 52 Tahun 2022 yang menjadi dasar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan disusun sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Struktur organisasi tersebut menggambarkan hubungan koordinasi, pembagian kewenangan, serta pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah.

Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan disajikan pada gambar berikut.



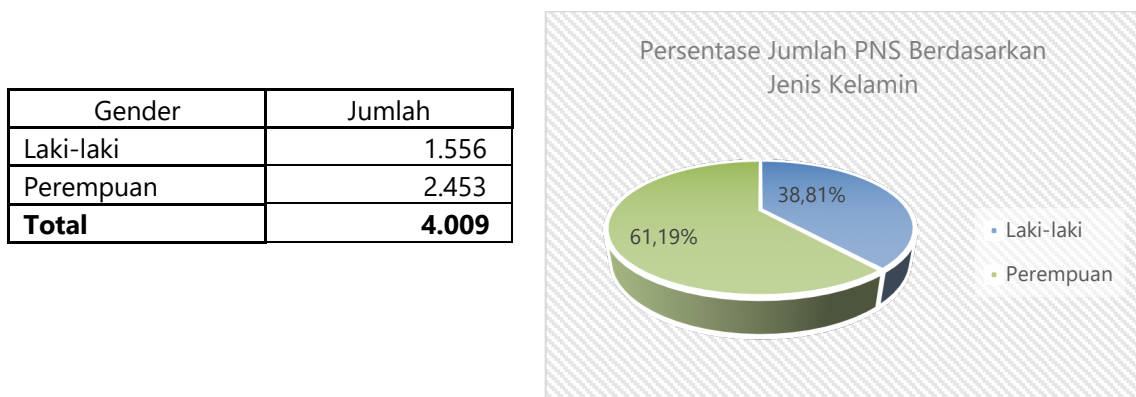
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1.4.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur merupakan faktor strategis dalam mendukung produktivitas organisasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026, jumlah pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2025 sebanyak 4.009 pegawai, terdiri atas 1.556 pegawai laki-laki dan 2.453 pegawai perempuan.

Komposisi tersebut menunjukkan peran aktif aparatur perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketersediaan sumber daya aparatur yang memadai menjadi modal penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian indikator kinerja daerah, yang perlu didukung melalui pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan manajemen kinerja yang selaras dengan penerapan SAKIP.

Jumlah pegawai menurut gender disajikan pada **Gambar 1.2**.



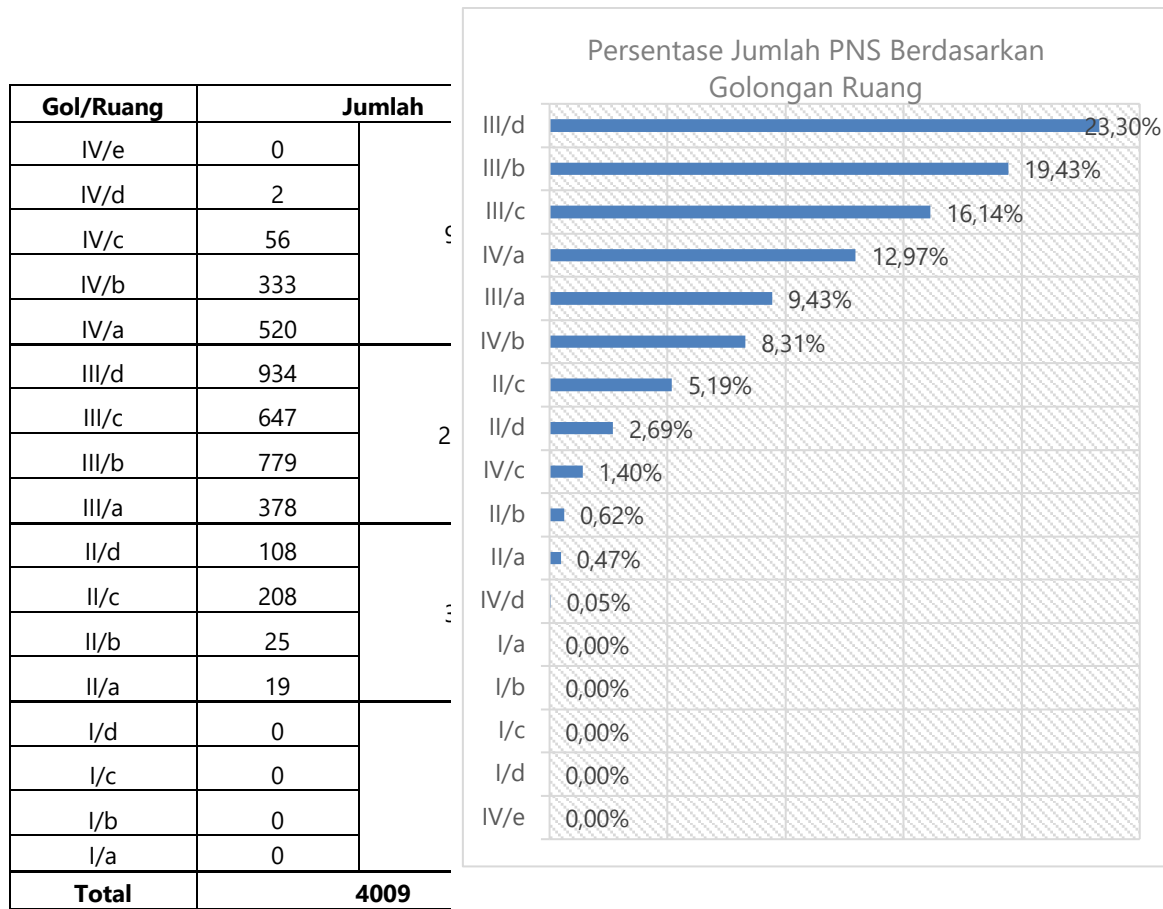
Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Kota Tangerang Selatan Menurut Gender Tahun 2025

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 didominasi oleh Golongan III sebanyak 2.738 pegawai, diikuti Golongan IV sebanyak 911 pegawai dan Golongan II sebanyak 360 pegawai, dengan total 4.009 pegawai, serta tidak terdapat pegawai pada Golongan I. Dominasi Golongan III menunjukkan bahwa kapasitas organisasi bertumpu pada jabatan pelaksana dan fungsional sebagai penggerak utama pelaksanaan program dan pelayanan publik, sementara keberadaan Golongan IV mendukung fungsi kepemimpinan, pengendalian kinerja, dan perumusan kebijakan.

Struktur SDM tersebut secara umum mendukung produktivitas organisasi karena proporsi pelaksana relatif memadai terhadap kebutuhan operasional. Namun demikian, kondisi ini juga mengandung risiko berupa potensi ketimpangan beban kerja, keterbatasan kapasitas manajerial pada unit tertentu, serta tantangan regenerasi kepemimpinan apabila pengembangan kompetensi dan manajemen talenta tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan manajemen kinerja aparatur, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi, serta penerapan merit system menjadi faktor kunci dalam

meningkatkan efektivitas kinerja dan pencapaian indikator pembangunan daerah. Distribusi PNS berdasarkan golongan ruang disajikan pada **Gambar 1.3**.



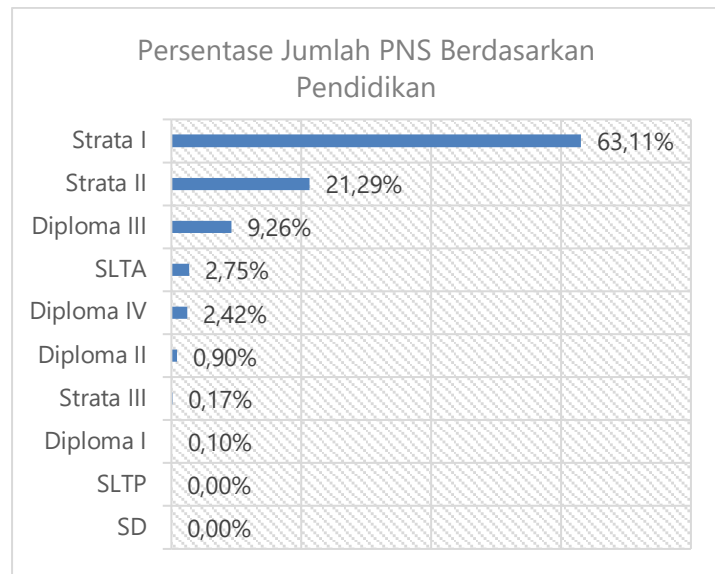
Gambar 1.3. Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Golongan Ruang Tahun 2025

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2025 didominasi oleh aparatur berpendidikan tinggi, yaitu Strata I (2.531 pegawai) dan Strata II (853 pegawai) dari total 4.009 pegawai. Kondisi ini menunjukkan kapasitas SDM yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, optimalisasi capaian kinerja tetap memerlukan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan merit system agar tingkat pendidikan aparatur dapat berkontribusi langsung terhadap produktivitas organisasi dan pencapaian indikator kinerja daerah.

Distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan disajikan pada **Gambar 1.4**.

Pendidikan	Jumlah
SD	0
SLTP	0
SLTA	110
Diploma I	4
Diploma II	36
Diploma III	371
Diploma IV	98
Strata I	2530
Strata II	853
Strata III	7
Total	4009



Gambar 1.4. Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Pendidikan Tahun 2025

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

Berdasarkan **Tabel 1.1**, struktur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 menunjukkan dominasi aparatur pada jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu, dengan total 4.009 pegawai, yang sebagian besar berada pada Golongan III (2.738 pegawai) sebagai pelaksana utama program dan pelayanan publik, serta didukung oleh Golongan IV (911 pegawai) pada level kepemimpinan dan fungsi manajerial. Komposisi ini mencerminkan kapasitas operasional organisasi yang relatif kuat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Namun demikian, struktur jabatan yang didominasi oleh pelaksana juga mengindikasikan potensi risiko organisasi, antara lain ketidakseimbangan rasio pengawasan, beban koordinasi pada jabatan struktural, serta kemungkinan belum optimalnya pemanfaatan kompetensi aparatur apabila tidak diiringi dengan penataan jabatan berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, penguatan manajemen talenta, peningkatan kompetensi jabatan fungsional, serta penyelarasan struktur organisasi dengan target kinerja menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas aparatur dan memastikan kontribusi SDM terhadap pencapaian indikator kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.1. Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan Menurut Jabatan Tahun 2025

NO	GOLONGAN	ESELON												FUNGSIONAL TERTENTU		FUNGSIONAL UMUM		JUMLAH
		II.A		II.B		III.A		III.B		IV.A		IV.B						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV/a					16	4	48	30	23	21	3	16	118	212	12	17	520
2	IV/b			8	1	26	8				1		1	86	200	1	1	333
3	IV/c	1		21										10	24			56
4	IV/d													2				2
	IV/e																	0
	GOL. IV	1	0	29	1	42	12	48	30	23	22	3	17	216	436	13	18	911
1	III/a											3		75	158	71	71	378
2	III/b									6	1	21	14	157	421	77	82	779

NO	GOLONGAN	ESELON												FUNGSIONAL TERTENTU		FUNGSIONAL UMUM		JUMLAH
		II.A		II.B		III.A		III.B		IV.A		IV.B						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
3	III/c									51	8	44	43	106	292	45	58	647
4	III/d					1		22	7	84	35	55	62	186	377	38	67	934
	GOL. III	0	0	0	0	1	0	22	7	141	44	123	119	524	1248	231	278	2738
1	II/a													2		11	6	19
2	II/b													3	2	13	7	25
3	II/c													17	92	54	45	208
4	II/d													8	59	31	10	108
	GOL. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	153	109	68	360
1	I/a																	0
2	I/b																	0
3	I/c																	0
4	I/d																	0
	GOL. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1		30		55		107		230		262		2607		717		4009

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

Berdasarkan **Tabel 1.2**, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 mencapai 7.569 pegawai, terdiri atas 5.875 PPPK Tahap I, 838 PPPK Tahap II, dan 856 PPPK Paruh Waktu yang tersebar pada seluruh perangkat daerah. Sebaran PPPK didominasi pada sektor pelayanan dasar, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan, yang menunjukkan kebijakan penguatan kapasitas layanan publik melalui pemenuhan kebutuhan tenaga operasional dan teknis secara langsung.

Dari perspektif kinerja organisasi, keberadaan PPPK berperan strategis dalam meningkatkan produktivitas pelaksanaan program dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada unit kerja dengan intensitas layanan tinggi. Namun demikian, tingginya proporsi PPPK juga menimbulkan tantangan pengelolaan SDM, antara lain kebutuhan integrasi manajemen kinerja antara ASN dan PPPK, penguatan sistem evaluasi kinerja individu, serta pengendalian beban belanja pegawai agar tetap selaras dengan pencapaian output dan outcome pembangunan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi peran PPPK perlu diarahkan melalui penempatan berbasis kebutuhan layanan dan penguatan manajemen kinerja agar kontribusinya berdampak langsung terhadap peningkatan capaian indikator kinerja daerah.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	PPPK						
		Tahap I			Tahap II			Paruh Waktu
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	764	332	1096	106	67	173	168
2	Dinas Kesehatan	449	213	662	66	58	124	218
3	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	123	33	156	12	1	13	0
4	Dinas Cipta Karya dan Penataan Ruang	77	34	111	7	3	10	9
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	148	37	185	17	8	25	28

No	Perangkat Daerah				PPPK			
		Tahap I			Tahap II			Paruh Waktu
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	229	8	237	4	1	5	4
7	Satuan Polisi Pamong Praja	229	20	249	11	5	16	85
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40	3	43	2	1	3	7
9	Dinas Sosial	35	15	50	4	1	5	9
10	Dinas Tenaga Kerja	33	13	46	2	3	5	7
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	36	35	71	2	9	11	8
12	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	37	7	44	1	2	3	7
13	Dinas Lingkungan Hidup	83	53	136	144	2	146	177
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	132	50	182	5	2	7	8
15	Dinas Perhubungan	370	51	421	25	4	29	2
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	40	20	60	6	9	15	1
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	34	21	55	1	0	1	4
18	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	72	31	103	6	1	7	2
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100	27	127	15	3	18	34
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51	22	73	3	2	5	4
21	Dinas Pariwisata	43	15	58	2	0	2	5
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83	20	103	11	6	17	7
23	Sekretariat Daerah	148	71	219	23	8	31	10
24	Sekretariat DPRD	151	84	235	8	4	12	1
25	BAPPELITBANGDA	27	11	38	1	1	2	3
26	Badan Keuangan Aset Daerah	46	13	59	0	2	2	2
27	Badan Pendapatan Daerah	78	18	96	3	3	6	3
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	23	15	38	4	1	5	0
29	Inspektorat	13	8	21	3	1	4	2
30	Kecamatan Ciputat	76	26	102	14	4	18	4
31	Kecamatan Ciputat Timur	83	22	105	12	8	20	2
32	Kecamatan Pamulang	80	34	114	20	8	28	4
33	Kecamatan Serpong	112	31	143	13	10	23	0
34	Kecamatan Serpong Utara	75	30	105	7	4	11	13
35	Kecamatan Pondok Aren	120	44	164	16	5	21	11
36	Kecamatan Setu	94	34	128	6	1	7	7
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28	12	40	4	4	8	0
TOTAL				5875			838	856

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026

1.4.3. Aspek Strategis

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang dibentuk pada tanggal 26 November 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pembentukan daerah otonom ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan berlokasi di Jl. Maruga Raya No. 1 Serua, Ciputat, dengan sebagian perangkat daerah terpusat di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) dan sebagian lainnya tersebar di beberapa lokasi pelayanan strategis. Pola persebaran tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun sekaligus memerlukan penguatan koordinasi dan integrasi kinerja antar perangkat daerah agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Secara demografis, Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk 1.474.311 jiwa pada Tahun 2025 dengan tingkat kepadatan wilayah yang relatif tinggi dan sebaran penduduk yang tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Pamulang dan Pondok Aren merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar masing-masing 339.054 jiwa (23,00%) dan 310.955 jiwa (21,09%), serta memiliki tingkat kepadatan tinggi yaitu 2.057 jiwa/km² dan 1.886 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Setu memiliki jumlah penduduk dan kepadatan relatif lebih rendah yaitu 96.980 jiwa (6,58%) dengan kepadatan 588 jiwa/km².

Distribusi tersebut menunjukkan konsentrasi aktivitas perkotaan pada wilayah Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, dan Ciputat Timur yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi serta keterkaitan kuat dengan pusat aktivitas ekonomi Jabodetabek. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan infrastruktur transportasi, layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan permukiman, serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih terintegrasi. Sebaliknya, wilayah dengan kepadatan lebih rendah seperti Setu dan Serpong memiliki potensi sebagai kawasan pengembangan untuk mendorong pemerataan pembangunan wilayah.

Dengan demikian, dinamika pertumbuhan penduduk tersebut menjadi aspek strategis dalam perencanaan pembangunan Kota Tangerang Selatan, khususnya dalam penguatan perencanaan tata ruang, peningkatan kapasitas infrastruktur perkotaan, serta penyediaan layanan publik yang merata dan berkelanjutan. Penguatan tata kelola pembangunan berbasis kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi penting untuk memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Data jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan disajikan pada **Tabel 1.3** berikut.

Tabel 1.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Sebaran Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Setu	96.980	6,58	588
Serpong	172.931	11,73	1049
Pamulang	339.054	23,00	2057
Ciputat	233.528	15,84	1417
Ciputat Timur	175.673	11,92	1066
Pondok Aren	310.955	21,09	1886
Serpong Utara	145.190	9,85	881
Jumlah	1.474.311	100,00	8.943

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2026, data diolah 2026

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut meliputi seluruh urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selain itu, kewenangan Pemerintah Pusat juga mencakup kebijakan perencanaan nasional, pengendalian pembangunan secara makro, perimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur, pendayagunaan sumber daya alam, penguasaan teknologi strategis, serta konservasi dan standardisasi nasional.

Rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan dengan total sebanyak 30 (tiga puluh) urusan pemerintahan. Pelaksanaan urusan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah yang pembentukan dan susunannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara urusan pemerintahan dan perangkat daerah pelaksana menjadi dasar pembagian peran, koordinasi, serta akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara rinci pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah disajikan pada **Tabel 1.4** berikut.

Tabel 1.4. Urusan dan Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		

No	Urusan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan		
		5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		6	Sosial	Dinas Sosial
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		9	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		10	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
		11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		13	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		14	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		16	Kerasipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		17	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	1	Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
		2	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
		3	Pariwisata	Dinas Pariwisata
		4	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
IV	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		3	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pendapatan Daerah
		5	Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
V	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
VII	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	Pengawasan	Inspektorat Daerah

No	Urusan			Perangkat Daerah Pengampu Urusan
VIII	Unsur Kewilayahan	1	Kecamatan	Pamulang
				Ciputat
				Setu
				Serpong
				Pondok Aren
				Serpong Utara
				Ciputat Timur
IX	Unsur Pemerintahan Umum	1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016

1.4.4. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, permasalahan, maupun peluang pembangunan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada masa mendatang. Isu strategis tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi daerah, tetapi juga potensi pembangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal dan apabila dikelola secara tepat dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, isu strategis berperan sebagai penghubung antara perencanaan pembangunan dan pengukuran kinerja daerah. Isu strategis menjadi landasan dalam perumusan sasaran pembangunan, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga setiap intervensi pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan utama daerah secara terukur dan akuntabel.

Adapun isu strategis Kota Tangerang Selatan disajikan pada **Tabel 1.5** berikut.

Tabel 1.5. Isu Strategis Kota Tangerang Selatan

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global 2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif 3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
Belum optimalnya pembangunan kewilayahan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan sosial, budaya dan ekologi	4. Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi 5. Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif 6. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan
Belum optimalnya reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola yang profesional, inovatif, dan berintegritas	7. Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan science/evidence based policy
Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi	8. Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (health tourism), ritel, budaya, dan MICE

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis
	9. Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi 10. Penataan sektor ekonomi informal

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Selanjutnya, isu strategis Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025–2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global

Perkembangan teknologi dan dinamika global menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing. Kota Tangerang Selatan masih berada pada periode bonus demografi hingga tahun 2045 yang menjadi peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan. Meskipun capaian pendidikan relatif baik, dominasi lulusan menengah dan tantangan transformasi teknologi menuntut penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan agar produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah dapat meningkat secara optimal.

2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan yang inklusif

Pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan di Kota Tangerang Selatan menghadapi tantangan perubahan struktur demografi, yaitu masih berlangsungnya bonus demografi yang disertai peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi ini menuntut kebijakan pembangunan yang inklusif melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja formal guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, penguatan keterampilan digital, kewirausahaan generasi muda, serta perlindungan sosial bagi lansia menjadi penting untuk mencegah kemiskinan antar-generasi dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

3. Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja

Kota Tangerang Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar didukung lokasi strategis dan dominasi penduduk usia produktif. Namun, rendahnya kompetensi tenaga kerja serta ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri masih menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelatihan berbasis teknologi, sertifikasi kompetensi, pemberdayaan kelompok rentan, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan guna menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

4. Pengembangan transportasi publik dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam konstelasi Kawasan Aglomerasi

Sebagai bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabek dan penyangga aktivitas ekonomi Jakarta, Kota Tangerang Selatan menghadapi kebutuhan peningkatan konektivitas wilayah dan pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan. Pengembangan transportasi

publik yang terintegrasi dan inklusif menjadi strategi utama untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, menekan biaya transportasi, serta mendukung kualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi lain, peningkatan timbulan sampah dan keterbatasan kapasitas TPA Cipeucang menjadi tantangan strategis dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Optimalisasi TPS3R, penguatan bank sampah, pemberdayaan masyarakat, serta kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan sampah menjadi langkah penting menuju sistem pengelolaan sampah terpadu hingga beroperasinya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (PLTSA)/PSEL.

5. Penyediaan prasarana, sarana dan layanan perkotaan yang berkualitas, terintegrasi dan inklusif

Penyediaan prasarana, sarana, dan layanan perkotaan yang berkualitas menjadi aspek strategis dalam mendukung pembangunan Kota Tangerang Selatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi antara lain munculnya segregasi kawasan permukiman, ketimpangan akses terhadap fasilitas publik, serta belum meratanya kualitas infrastruktur yang berdampak pada keterbatasan aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

Dengan keterbatasan lahan perkotaan, pengembangan struktur ruang yang kompak dan terintegrasi perlu didorong melalui penataan ruang yang inklusif serta pengelolaan infrastruktur dan layanan publik yang merata. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, produktivitas wilayah, serta menjamin akses layanan perkotaan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

6. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan

Pembangunan Kota Tangerang Selatan dihadapkan pada tantangan penurunan kualitas lingkungan hidup, risiko bencana, perubahan iklim, serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dan energi dari luar wilayah. Kondisi tersebut menuntut pembangunan perkotaan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengelolaan risiko lingkungan secara berkelanjutan.

Penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama antar daerah, peningkatan kesiapsiagaan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pengembangan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan kota yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu menghadapi dinamika perubahan global di masa depan.

7. Tata kelola yang profesional, inovatif dan kolaboratif disertai pengembangan *science/evidence-based policy*

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, inovatif, dan kolaboratif menjadi aspek strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel. Tantangan yang dihadapi meliputi belum optimalnya penerapan sistem merit

ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan dan proses bisnis, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy) menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi multihelix antara pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat inovasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

8. Penguatan daya saing pariwisata berbasis potensi kesehatan (health tourism), ritel, budaya, dan MICE

Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis di kawasan Jabodetabek dengan kemudahan aksesibilitas yang mendorong berkembangnya sektor pariwisata berbasis layanan kesehatan, ritel, budaya, serta kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Kontribusi kegiatan MICE, khususnya dari sektor pemerintahan dan lembaga nasional, menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan yang lengkap, pengembangan health tourism menjadi peluang strategis untuk meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

9. Peningkatan produktivitas UMKM dan sektor ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi

Transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada peningkatan daya saing global mendorong Kota Tangerang Selatan untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis perdagangan dan jasa, UMKM, serta ekonomi kreatif. Analisis struktur PDRB menunjukkan perlunya percepatan pergeseran sektor ekonomi unggulan guna menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah keterbatasan daya dukung lahan. Oleh karena itu, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan sektor pariwisata dan layanan berbasis potensi lokal menjadi strategi penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan daya saing daerah.

10. Penataan sektor ekonomi informal

Penataan sektor ekonomi informal menjadi penting untuk mengintegrasikan aktivitas usaha kecil dan pekerjaan mandiri ke dalam sistem ekonomi formal. Upaya ini bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat perlindungan pelaku usaha dan tenaga kerja, serta mengoptimalkan kontribusi sektor informal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan, legalisasi usaha, dan peningkatan akses terhadap pembiayaan serta pasar.

1.5. Sistematika Penyusunan LKjIP Tahun 2025

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu: membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan
2. Hasil Review Inspektorat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan perencanaan kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja pembangunan daerah. Perencanaan kinerja disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, serta menjadi pedoman dalam penetapan sasaran, indikator, dan target kinerja daerah.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan kinerja Tahun 2025 disesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 yang diundangkan pada 21 Agustus 2025, serta dinamika penganggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2025. Perencanaan kinerja tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja sebagai instrumen akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi pada hasil.

2.1. Rencana Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi acuan utama dalam penetapan arah kebijakan, sasaran, dan target kinerja pembangunan daerah. RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 dan menjadi dasar penyusunan perencanaan, penganggaran, serta pengukuran kinerja pembangunan daerah.

2.1.1. Sasaran RPJMD Tahun Berkenaan Yang Diampu Perangkat Daerah

Visi dan Misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 menjadi arah dan landasan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Pada tahun berkenaan, kebijakan dan sasaran pembangunan daerah difokuskan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD melalui sasaran-sasaran strategis yang diampu oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar pengukuran dan pelaporan kinerja.

Adapun Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 adalah:

“Tangerang Selatan Unggul, Inklusif, Inovatif, Kolaboratif Menuju Kota Lestari”

Visi tersebut menjadi arah utama penyelenggaraan pembangunan daerah dan dasar penetapan sasaran, indikator, serta target kinerja Perangkat Daerah pada tahun berkenaan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029, ditetapkan empat Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1.** Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, Berdaya Saing Global dan Sejahtera
- Misi 2.** Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi
- Misi 3.** Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas
- Misi 4.** Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Tujuan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 diturunkan dari Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai gambaran pencapaian visi pembangunan daerah selama lima tahun, dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional. Sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari tujuan yang mencerminkan hasil (outcome) penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam indikator dan target kinerja sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta pengukuran dan pelaporan kinerja daerah. Penjabaran Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran beserta targetnya disajikan pada **Tabel 2.1**, dengan target Tahun 2030 sebagai target transisi menuju RPJMD Tahun 2030–2034.

Tabel 2.1. Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Periode 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unggul, Inklusif	Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,16	84,42- 84,68	84,54- 84,82	85,2	85,8	86,18	86,5	86,18
			S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86	12,04	12,19	12,34	12,49	12,64	12,79	12,64
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7	15,12	15,35	15,58	15,81	16,04	16,27	16,04
				Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17	69,67	72,17	74,67	77,17	79,67	82,17	79,67
				Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28	82,38	83,48	84,58	85,68	86,78	87,88	86,78
				Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,3	60,2	63,1	66	68,9	71,8	74,7	71,8
				Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61	71,11	72,61	74,11	75,61	77,11	78,61	77,11
			S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8	76,21	76,65	77,12	77,62	78,15	78,72	78,15
			S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	1,91- 2,25	1,84- 2,10	1,80- 2,00	1,70- 1,90	1,66- 1,90	1,60- 1,88	1,66-1,90
				Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	58,91	59,15	59,38	59,62	59,86	60,11	59,86
			S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65	65,7	65,97	66,6	67,22	67,85	68,48	67,85
				Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,174	0,172	0,17	0,16	0,15	0,14	0,15
				Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73	73,05	73,1	73,15	73,2	73,25	73,3	73,25

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unggul, Inklusif, Inovatif	Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	S5. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86	55,96	56	56,3	56,5	56,8	57	56,8
			S6. Meningkatkan literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99	88,49	90,59	92,19	93,04	93,5	93,74	93,5
				Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,02	5,40- 6,31	5,60- 6,45	6,30- 6,90	6,80- 7,40	7,52- 8,52	8,00- 8,88	7,52-8,52
				PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	80,18	86,03- 87,82	91,59- 95,99	98,00- 103,00	108,00- 110,00	110,00- 115,08	115,00- 120,00	110,00-115,08
				Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	12,84	13,01- 13,08	13,10- 13,15	13,05	12,95	12,3	12,2	12,3
				Rasio Gini	Indeks	0,395	0,353- 0,380	0,345- 0,353	0,340- 0,350	0,330- 0,350	0,320- 0,330	0,310- 0,330	0,320-0,330
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,09	4,76- 5,65	4,60- 5,42	4,50- 5,20	4,40- 4,90	4,40- 4,73	4,30- 4,50	4,40-4,73
			S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53	69,6	69,7	69,8	69,85	69,9	69,95	69,9
				Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,11	3,19	3,27	3,36	3,44	3,52	3,44
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	11,64	11,71	11,78	11,86	11,93	12	11,93
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38	52,4	52,8	53,6	54,2	54,7	55	54,7
				Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99	2,15	2,68	3	3,32	3,65	3,97	3,65
			S2. Meningkatkan peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42	127,96- 129,10	135,12- 137,42	142,95- 146,48	151,43- 156,34	160,58- 166,98	170,41- 178,47	160,58-166,98

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Unggul, Inovatif, Kolaboratif	Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	T3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan	berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13	60,5	61,46	61,97	62,47	62,98	63,48	62,98
			S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34	44	44,8	45,6	46,2	46,8	47,5	46,8
				Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48	8,7	9,39	10,42	11,98	14,6	17,97	14,6
				Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,61	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	90,5
			S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,25	4,26	4,27	4,28	4,29	4,3	4,29
			S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82	49,87	49,92	49,97	50,02	50,07	50,12	50,07
				Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45	66,36	67,09	67,82	68,54	69,27	70	69,27
			S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	69,06	70	72	74	76	78	80	78
				Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4	5	6	7	7	8	8	8
				Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87	1,92	1,98	2,04	2,1	2,17	2,24	2,17
				Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	2	2,1	2,15	2,2	2,25	2,3	2,25

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16	99,3	99,34	99,38	99,42	99,46	99,5	99,46
			S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	330	334	338	342	346	350	346
				Indeks BerAkhlak	Indeks	79,75	80,5	81	81,5	82	82,5	83	82,5
				Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79	80	81	82	83	84	86	84
			S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25	77	78	78,5	79	79,5	80	79,5
			S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45	52	54	57	60	63	65	63
				Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
				Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A	50	51	52	53	54	55	54
	Inklusif, Inovatif, Kolaboratif, Menuju Kota Lestari	Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	T4. Terwujudnya Kota Layak Huni yang berketahanan, lestari dan inklusif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks	61,03	48.23*)	48,52	48,82	49,11	49,4	49,69	49,4
				Indeks Kota Layak Huni	Indeks	70,03	70,04	70,05	70,06	70,07	70,08	70,09	70,08

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	18,45	19,02	19,54	20,03	20,44	20,85	20,44
			S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	%	3,13	2,96	1,35	1,31	1,28	1,24	1,21	1,24
			S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,1	63,2	62,59	61,47	60,35	58,27	53,34	58,27
			S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64	71	71,2	71,4	71,6	71,8	72	71,8
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59	34,93	35,43	35,93	36,43	36,93	37,43	36,93
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38	33,73	33,8	33,87	33,94	34,01	34,08	34,01
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83	97	97	97	97	97	98	97
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A	70	70	70	70	70	71	70
			S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29	8,3	8,31	8,32	8,34	8,36	8,37	8,36
				Akses Rumah Tangga Perkotaan	%	21	21	22	23	25	30	34	30

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Target akhir RPJMD (Tahun 2029)
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			andil, inklusif, dan berkelanjutan	terhadap Air Minum Perpipaan									
				Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,73	99,74	99,77	99,87	99,97	100	100	100
				Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	16	18,7	21,4	24,1	29,5	32,2	29,5
			S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,29	7,4	7,45	7,5	7,55	7,6	7,65	7,6
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,6	53,1	54,1	55,2	56,3	57,5	58,6	57,5
				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)	77,5	78	78,5	79	79,5	80	79,5
				Indeks Demokrasi	Indeks	86,04	86,5	87	87,5	88	88,5	89	88,5
				Indeks Rasa Aman	Angka	66,97	73,7	74,21	74,91	75,62	76,32	77,03	76,32

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menetapkan target kinerja daerah beserta indikator dan target ketercapaiannya ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025. Penetapan Perjanjian Kinerja tersebut diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD dan diundangkan pada 21 Agustus 2025, sebagai dasar penguatan akuntabilitas kinerja dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025.

2.2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan perencanaan kinerja awal sebelum perubahan RPJMD dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum perubahan disajikan pada **Tabel 2.2** berikut.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebelum perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025																																																																																																									
1	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	Komposit (1/3) rata-rata lama sekolah ditambah (2/3) rata-rata harapan sekolah	Indeks	81,23																																																																																																									
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	Tahun	76,21																																																																																																									
3	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Predikat)	Indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dengan predikat sbb: Baik = >70 Cukup Baik = 40< X <70 Kurang/rentan = <40	Predikat	Baik																																																																																																									
4	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	aspek pembangunan pemuda yang dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya (sumber BPS). <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th><th>Batas Minimum</th><th>Batas Maksimum</th><th>Sumber Data</th></tr><tr><td colspan="5">Domain Pendidikan</td></tr><tr><td>1</td><td>Rata-rata lama sekolah</td><td>0</td><td>15 (target)</td><td>Standar PBB, digunakan pada IPM</td></tr><tr><td>2</td><td>APK sekolah menengah</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>3</td><td>APK perguruan tinggi</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</td></tr><tr><td>4</td><td>Angka kesakitan pemuda</td><td>0 (target)</td><td>20</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Persentase pemuda korban kejahatan</td><td>0 (target)</td><td>3</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>6</td><td>Persentase pemuda yang merokok</td><td>0 (target)</td><td>36</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>7</td><td>Persentase remaja perempuan yang sedang hamil</td><td>0 (target)</td><td>45</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja</td></tr><tr><td>8</td><td>Persentase pemuda wirausaha kerah putih</td><td>0</td><td>2 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>9</td><td>TPT pemuda</td><td>0 (target)</td><td>28</td><td>TPT pemuda Arab Saudi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</td></tr><tr><td>10</td><td>Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan</td><td>0</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>11</td><td>Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi</td><td>0</td><td>45 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>12</td><td>Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat</td><td>0</td><td>25 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td colspan="5">Domain Gender dan Diskriminasi</td></tr><tr><td>13</td><td>Angka perkawinan usia anak</td><td>0 (target)</td><td>45</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr><tr><td>14</td><td>Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi</td><td>25</td><td>100 (target)</td><td>Standar</td></tr><tr><td>15</td><td>Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal</td><td>0</td><td>60 (target)</td><td>Nilai maksimum + 2 standar deviasi</td></tr></table>	No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data	Domain Pendidikan					1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM	2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar	3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar	Domain Kesehatan dan Kesejahteraan					4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	6	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja					8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan					10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar	11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Domain Gender dan Diskriminasi					13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar	15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi	Indeks	55,2
No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data																																																																																																										
Domain Pendidikan																																																																																																														
1	Rata-rata lama sekolah	0	15 (target)	Standar PBB, digunakan pada IPM																																																																																																										
2	APK sekolah menengah	0	100 (target)	Standar																																																																																																										
3	APK perguruan tinggi	0	100 (target)	Standar																																																																																																										
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan																																																																																																														
4	Angka kesakitan pemuda	0 (target)	20	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
5	Persentase pemuda korban kejahatan	0 (target)	3	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
6	Persentase pemuda yang merokok	0 (target)	36	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja																																																																																																														
8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
9	TPT pemuda	0 (target)	28	TPT pemuda Arab Saudi																																																																																																										
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan																																																																																																														
10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100 (target)	Standar																																																																																																										
11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
Domain Gender dan Diskriminasi																																																																																																														
13	Angka perkawinan usia anak	0 (target)	45	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										
14	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100 (target)	Standar																																																																																																										
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60 (target)	Nilai maksimum + 2 standar deviasi																																																																																																										

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025
5	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender	IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki Keterangan : IPM : Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	94,53
		Indeks Pemberdayaan Gender	rata - rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan	Indeks	73,86
6	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	Rasio Konektivitas Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) IK 1 = (Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada kota tersebut	Rasio	0,89
		Kinerja Lalulintas/ Transportasi Kota (V/C Ratio)	V/C Ratio di Jalan kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Rasio V/C memungkinkan untuk memperkirakan tingkat kemacetan relatif pada suatu segmen jalan.	Rasio	0,54
7	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (0,376 X IKA) + (0,405 X IKU) + (0,219 X IKL)	Indeks	48,23 *perhitungan dg rumus baru dr KLHK
		Persentase permukiman layak huni (Persen)	Luas wilayah permukiman dikurangi dengan luas kawasan permukiman kumuh, dibagi dengan luas wilayah permukiman	Persen	99,84%
		Cakupan Pengelolaan Sampah (Persen)	Volume sampah yang dapat dikelola dibagi total volume timbunan sampah kota dikali 100%	Persen	100,00%
		Ruang Terbuka Hijau Publik (Persen)	Luas ruang terbuka hijau publik ditambah perlindungan setempat dibagi luas wilayah kota dikurangi badan air, kawasan hutan, dan tanaman pangan dikali 100%	Persen	4,81%
8	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan	Indeks Rasa Aman (Predikat)	komposit 4 dimensi : Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan Angka Kriminalitas	Predikat	Aman
		Indeks Demokrasi (Predikat)	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi	Predikat	Tinggi
9	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Indeks resiko bencana (Predikat)	Risk = Hazard x (Vulnerability/Capacity) Keterangan : 1. tingkat resiko rendah 2. tingkat resiko sedang 3. tingkat resiko tinggi	Predikat	Rendah
10	Meningkatnya sektor ekonomi kreatif	Nilai sektor ekonomi kreatif (Triliun Rupiah)	nilai PDRB sektor ekonomi kreatif (triliun rupiah)	Triliun Rupiah	14,68
11	Meningkatnya Investasi	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	Nilai investasi tahunan (Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	8,7
12	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Produktifitas tenaga kerja per total output (Rupiah)	Total output (PDRB) dibagi total tenaga kerja (rupiah)	Rupiah	169.838.260

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025																											
		Produktivitas tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa (Rupiah)	Nilai Tambah Sektor Perdagangan dan Jasa/Jumlah Angkatan Kerja (rupiah)	Rupiah	109.284.473																											
13	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Sub Komponen</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30%</td><td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>25%</td><td>a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15%</td><td>a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Internal</td><td>10%</td><td>a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20%</td><td>a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	Sub Komponen	1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).	2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)	3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)	4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)	5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)	Total		100%		Komposit dari nilai indikator perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja yang ada di seluruh instansi. Nilai	BB
No	Komponen	Bobot	Sub Komponen																													
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).																													
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi pengukuran (7,5%)																													
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)																													
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)																													
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)																													
Total		100%																														
		Nilai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai EPPD terhadap LPPD	Nilai	4,1																											
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan Daerah	Hasil opini BPK atas lapoan keuangan yang telah diaudit	Nilai	WTP																											
		Indeks Persepsi Korupsi* berdasarkan PermenPAN-RB No.25/2020, indikator berubah menjadi hasil survey penilaian integritas (SPI)	Menilai dan memberi peringkat negara/wilayah berdasarkan seberapa korup sektor publik suatu negara dianggap oleh para ahli dan eksekutif bisnis (kemenkeu) : 0 = sangat korup 100 = sangat bersih dari korupsi	Indeks	85																											
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Ukuran kinerja pelayanan publik	Indeks	89,87																											

Sumber: Perjanjian Kinerja, Tahun 2025

Selanjutnya, seiring dengan penetapan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025, perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta arahan Menteri PANRB sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025, dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja berdasarkan RPJMD dan Renstra periode terbaru. Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 setelah perubahan disajikan pada **Tabel 2.3** berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 setelah perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025 (Perubahan)
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	$RLS = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n}$ Keterangan: • RLS= Rata-rata Lama Sekolah • T_i = Lama sekolah (dalam tahun) dari individu ke-i • n= Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun	Tahun	12,04
		Harapan Lama Sekolah	$HLS = \sum_{x=a}^b AP S_x$ Keterangan: • HLS= Harapan Lama Sekolah (tahun) • $AP S_x$= Angka Partisipasi Sekolah pada umur x • a= umur awal (biasanya 7 tahun) • b= umur maksimum (biasanya 24 tahun)	Tahun	15,12
		Kemampuan Literasi SD	$\text{Skor Literasi SD} = \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n}$ Keterangan: • S_i = skor literasi siswa ke-i • n= jumlah siswa yang mengikuti asesmen	Skor	69,67
		Kemampuan Literasi SMP	$\text{Skor Literasi SMP} = \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n}$ Keterangan: • S_i = skor literasi siswa ke-i • n= jumlah siswa yang mengikuti asesmen	Skor	82,38
		Kemampuan Numerasi SD	$\text{Skor Numerasi SD} = \frac{\sum_{i=1}^n N_i}{n}$ Keterangan: • N_i = skor numerasi siswa ke-i • n= jumlah siswa yang mengikuti asesmen	Skor	60,2
		Kemampuan Numerasi SMP	$\text{Skor Numerasi SMP} = \frac{\sum_{i=1}^n N_i}{n}$ Keterangan: • N_i = skor numerasi siswa ke-i • n= jumlah siswa yang mengikuti asesmen	Skor	71,11
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	$e_0 = \frac{T_0}{l_0}$ Keterangan: • e_0= Usia Harapan Hidup saat lahir • T_0= Total tahun hidup kumulatif yang masih akan dijalani oleh seluruh penduduk sejak usia 0 • l_0= Jumlah penduduk awal (biasanya 100.000 dalam life table) Sumber Data dari BPS	Tahun	76,21
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan	Tingkat Kemiskinan	Perhitungan BPS	%	1,91-2,25
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Hasil Penilaian Kemensos RI	Indeks	58,91

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025 (Perubahan)
	peningkatan kesejahteraan sosial				
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Perhitungan iBangda	Indeks	65,7
		Indeks Ketimpangan Gender	$IKG = 1 - \frac{(RH+EMP Perempuan+LFPR Perempuan)/3}{(1+EMP Laki-laki+LFPR Laki-laki)/3}$ Perhitungan Kementerian PPPA	Indeks	0,174
		Indeks Perlindungan Anak	$IPA = \frac{IPHA+IPKA}{2}$ Perhitungan Kementerian PPPA	Indeks	73,05
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Disusun oleh Kemenpora dan BPS, memperhatikan beberapa domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi kepemudaan, gender dan diskriminasi	Nilai	55,96
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai TKM = $\{(0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})\} \times 100$	Nilai	88,49
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	Jumlah persentase PDRB pada seluruh Lapangan Usaha sektor Perdagangan dan Jasa	%	69,6
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Jumlah PDRB sektor akomodasi dan makan minum /Jumlah total PDRB dikali 100%	%	3,11
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	komponen PDRB sektor industri pengolahan (sub sektor industri makanan dan minuman, industri pakaian jadi dan industri alas kaki), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudangan (sub sektor angkutan darat wisata)	%	11,64
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Total Nilai Ekspor ADHB dibagi PDRB ADHB Pengeluaran dikali 100	%	52,4
		Rasio Kewirausahaan Daerah	Berusaha Dibantu Buruh Tetap Daerah dibagi Total Angkatan Kerja Daerah	%	2,15
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Hasil data diperoleh dari perhitungan BPS	Juta Rp	127,96-129,10
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Hasil data diperoleh dari perhitungan BPS	%	60,5
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	Hasil data diperoleh dari perhitungan BPS	%	44
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Nilai Investasi = Nilai PMDN + PMA	Triliun Rp	8,7
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	IPP dievaluasi melalui enam aspek utama dengan bobot total 100%, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM (25%), Sarana dan Prasarana (18%), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Konsultasi dan Pengaduan (10%) dan Inovasi Pelayanan Publik (12%). Hasilnya berasal dari perpaduan nilai evaluator dan pengguna layanan.	Indeks	4,25

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025 (Perubahan)
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai IMDI Kota Tangerang Selatan Didapatkan dari Nilai Rata Rata Pilar Penilaian IMDI	Indeks	49,87
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai tingkat digitalisasi arsip ASKE + nilai tingkat digitalisasi arsip sistem	Nilai	66,36
12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP merupakan penjumlahan dari setiap komponen SAKIP yaitu: 1) Perencanaan Kinerja (30%), 2) Pengukuran Kinerja (30%), 3) Pelaporan Kinerja (15%) dan 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Nilai	70
		Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	Capaian dihitung berdasarkan kesepakatan kerja sama dalam negeri yang dihasilkan	angka	5
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	$\text{Rasio Pajak} = \left(\frac{\text{Total Penerimaan Pajak}}{\text{PDRB ADHB}} \right) \times 100\%$	%	1,92
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		Indeks Pengelolaan Aset	IPA = indeks akuntabilitas dan produktivitas pengelolaan BMD (ST.1) + Indeks kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang - undangan (ST.2) + indeks efektifitas pengawasan dan pengendalian bmd (ST.3) + administrasi BMD yang andal (ST.4)	Indeks	2
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian (Formula) capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dilakukan berdasarkan poin-poin penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum yaitu meliputi: 1)Koordinasi harmonisasi regulasi antar lembaga, 2)Re-regulasi/deregulasi berdasarkan hasil review peraturan, 3) Penyederhanaan regulasi di semua tingkat peraturan,4) Kompetensi ASN Perancang Regulasi (Legal Drafter)	Indeks	99,3
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit		Indeks	330
		Indeks BerAKHLAK		Indeks	80,5
		Indeks Profesionalitas ASN	Peningkatan Profesionalitas ASN, Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) diukur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Indeks	80
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Rumus Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK dirancang untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada instansi publik dengan menggabungkan pandangan internal, eksternal, dan ahli. Rumus umumnya adalah: Komponen Rumus: (Indeks Internal): Hasil survei terhadap pegawai/ASN. (Indeks Eksternal): Hasil survei terhadap pengguna layanan. (Indeks Ahli/Ekspert): Hasil penilaian tokoh masyarakat/ahli. Factor Koreksi: PPK (Prevalensi Korupsi): Pengalaman langsung terkait suap/gratifikasi. IIP (Integritas Pelaksanaan SPI): Kepatuhan/sistem integritas internal.	Nilai	77

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025 (Perubahan)
			Mahkamah Konstitusi RI Mahkamah Konstitusi RI +1 Nilai akhir SPI dihitung dengan skala 0–100, di mana semakin tinggi nilai, semakin berintegritas instansi tersebut		
16	S7. Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Indeks hasil penilaian terhadap penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Angka	52
		Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks kapabilitas inovasi sebagai salah satu komponen perhitungan indeks daya saing daerah yang dikeluarkan oleh BRIN (Pilar ke-12 IDSD)	Indeks	3,29
		Persentase kebijakan berbasis bukti	Jumlah kebijakan berbasis bukti dibagi jumlah kebijakan dikali 100% Kebijakan meliputi: Perda, Perwal, SE Kepala Daerah dan program prioritas daerah. Kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan yang disusun berdasarkan data, analisis/kajian, pelibatan pemangku kepentingan dan dokumen justifikasi kebijakan (hasil study, hasil survey, NA, policy paper, policy brief, telaahan, hasil FGD/konsultasi publik, rekomendasi hasil evaluasi) "	%	50
17	S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	PoU dihitung dengan cara membandingkan rata-rata konsumsi energi penduduk dengan kebutuhan energi minimum (MDER)	%	2,96
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	$Risk (R) = H \times V / C$ R= Resiko Bencana H = Bahaya V = Kerentanan C = Kapasitas	Indeks	63,2
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IK A = IKA \text{ titik pantau } 1 + IKA \text{ titik pantau } 2 + \dots \text{ Jumlah titik pantau}$ Kategori IKA: Sangat Baik= $85 < x \leq 100$ Sedang= $60 < x \leq 85$ Buruk= $0 \leq x \leq 60$	Indeks	71
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IK U = 100 - (50 / 0,99 (I / N A - 0,01))$ Kategori IKU: Sangat Baik= $85 < x \leq 100$ Sedang= $60 < x \leq 85$ Buruk= $0 \leq x \leq 60$	Indeks	34,93
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$IK TL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times 50 / 54,3$ Kategori IKTL: Sangat Baik= $85 < x \leq 100$ Sedang= $60 < x \leq 85$ Buruk= $0 \leq x \leq 60$	Indeks	33,73

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025 (Perubahan)
20	S4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Sampah terolah (Ton/Hari) dibagi Timbulan sampah (ton/hari) dikali seratus persen	%	97
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dibagi Jumlah rumah tangga seluruhnya dikali seratus persen	%	70
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Rata-Rata Indeks Kepuasan Layanan dari kelima aspek infrastruktur	Indeks	8,3
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	persentase jumlah rumah tangga perkotaan yang menggunakan sambungan perpipaan (PDAM/jaringan) sebagai sumber air minum utama, dibagi total rumah tangga, dikalikan 100%	%	21
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	Jumlah Rumah Tangga yang Menempat i Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan dibagi Jumlah Total Rumah Tangga dikali 100%	%	99,74
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD/ Jumlah rumah di Kota x 100 %	%	16
		Indeks Harmoni	Data diperoleh dari Kemendagri	Indeks	7,4
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	$IPK = \frac{\sum (Indikator_i \times Bobot_i)}{\sum Bobot_i}$ 1. Dimensi Pendidikan → mengukur rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, literasi, dll. 2. Dimensi Ketahanan Budaya → keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya, toleransi, kohesi sosial. 3. Dimensi Warisan Budaya → jumlah di benda-benda budaya, situs, dan tradisi lokal. 4. Dimensi Ekonomi Budaya → kontribusi sektor budaya dalam ekonomi kreatif & PDR. 5. Dimensi Digital Budaya → partisipasi masyarakat dalam seni, tradisi, festival budaya. 6. Dimensi Gender & Inklusi → terdapat akses perempuan/kecil-kecil dalam kegiatan budaya. 7. Dimensi Komunikasi Budaya → penyebaran informasi budaya, konten digital, media.	Nilai	53,1
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	$IKUB = \frac{D_1 + D_2 + D_3}{3}$ Keterangan: D1 : Dimensi Toleransi (sikap menerima dan menghargai perbedaan). D2: Dimensi Kesetaraan (sikap melindungi dan memberikan hak yang sama tanpa diskriminasi). D3: Dimensi Kerja Sama (partisipasi dalam kegiatan bersama antarumat beragama).	Nilai	77,5
		Indeks Demokrasi	$IDI = \sum_{i=1}^5 P_i I (A_i)$ IDI berdasarkan komponen aspek kapasitas lembaga demokrasi yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kinerja Lembaga Legislatif, (2) kinerja Lembaga Yudikatif, (3) netralitas penyelenggara pemilu, (4) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, (5) jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup	Indeks	86,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Satuan	Target Tahun 2025 (Perubahan)
			masyarakat, (6) transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah, (7) kinerja birokrasi dalam pelayanan publik, dan (8) pendidikan politik pada kader partai politik.;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kebebasan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara; (2) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat; (3) terjaminnya kebebasan berkeyakinan; (4) terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan; (5) terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu; (6) pemenuhan hak-hak pekerja; dan (7) pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.;Indikator ini digunakan untuk melihat skor IDI berdasarkan komponen aspek kesetaraan yang terdiri atas sejumlah indikator yaitu (1) kesetaraan gender, (2) partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, (3) anti monopoli sumber daya ekonomi, (4) akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial, (5) kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah, (6) akses masyarakat terhadap informasi publik, dan (7) kesetaraan dalam pelayanan dasar.		
		Indeks Rasa Aman	dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari berbagai indikator persepsi keamanan (seperti kriminalitas, ketertiban, dan lingkungan sosial) yang dikonversikan ke dalam skala 0-100 atau 1-4m	Angka	73,7

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja, Tahun 2025

2.2. Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025. Rincian alokasi anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
Misi 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera	1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	379.853.078.057
					Program Pengembangan Kurikulum	92.490.000
					Program Pendidikan dan Tenaga kependidikan	7.387.868.259
		2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	314.737.150.349
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.343.684.862
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	721.036.330
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.705.851.804
		3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Perberdayaan Sosial	380.167.375
					Program Penanganan Bencana	647.557.512
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	316.695.016
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.297.374.100
					Program Rehabilitasi Sosial	1.362.539.097
		4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender	Urusan Pemerintahan Bidang	Program Pemenuhan Hak Anak	92.423.000

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
			dan perlindungan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.179.828.000
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	32.140.000
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.248.679.000
					Program Perlindungan Khusus Anak	614.090.740
					Program Perlingkungan Perempuan	574.491.110
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.283.955.000
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.131.537.000
					Program Pengendalian Penduduk	305.889.000
		5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	34.641.084.091
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.380.600.000
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.146.300.000
		6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	713.764.593
Misi 2. Meningkatkan perekonomian Daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	396.542.000
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	175.423.272

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
			ekonomi domestik dan global		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	611.809.845
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	224.054.503
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	273.462.894
					Program Pengembangan UMKM	624.052.710
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	101.634.678
				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran pariwisata	848.230.848
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	197.545.980
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.800.759.990
					Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	224.648.610
				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Pengebangan Ekspor	60.367.000
					Progra Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	12.181.903
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.853.079.457
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	17.675.018
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	165.024.504
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	170.027.109

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Pengelolaan Sistem Informasi dan Industri Nasional	29.898.300
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	126.464.581
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.230.258.284
		8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	995.166.400
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.482.385.300
					Program Penempatan Tenaga Kerja	766.617.796
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	-
		9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	296.597.130
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12.848.000
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	31.520.200
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	190.844.800
					program Promosi Penanaman Modal	698.648.200
Misi 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola yang Profesional, Inovatif dan Berintegritas	T3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan	10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Kecamatan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.326.284.527
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.939.891.591
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78.834.086.331
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.880.586.355
				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	238.120.000
					Pogram Pendaftaran Penduduk	1.869.625.000

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
				dan Pencatatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	208.085.000
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5.000.000
		11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	693.943.120
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	22.770.000
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	8.760.000
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	40.317.573.729
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	11.632.292.400
				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	351.675.000
		12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.025.889.842
				Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	161.512.122.842
				Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.943.867.218
				Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.169.258.665
				Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik daerah	4.836.744.563
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.730.864.120
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.582.515.605
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.676.404.448
				Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.574.254.600

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.382.497.206
					Pogram Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.622.584.570
				Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	43.968.425.323
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.071.553.515
					Program Perekonomian dan Pembangunan	3.570.757.985
				Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44.868.612.534
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.824.999.574
				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.129.492.949
				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.493.650.885
				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	559.870.033.762
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.438.231.510
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.944.475.775
				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.940.068.470

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.547.089.908
				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.947.097.359
				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.379.084.843
				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.705.827.337
				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.227.538.374
				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.761.456.019
				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	571.593.950.454
				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.042.022.676
				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.512.301.936
				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.397.624.464
				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.545.472.402
				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.535.986.574
				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102.635.200
				Urusan Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah	10.622.133.804

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
				Bidang Tenaga Kerja	Daerah Kabupaten/Kota	
		13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan			
		14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	3.133.685.100
				Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.491.825.182
		15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	115.651.174
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	268.710.032
		16	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Program Riset dan Inovasi Daerah	1.197.561.200
Misi 4. Membangun Kota Berketahanan, Terintegrasi, Inklusif Dan Berkelanjutan	T4. Terwujudnya Kota Layak Huni yang berketahanan, lestari dan inklusif					
		17	S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	800.464.345
					Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	67.282.005
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	64.693.800
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	65.857.000
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	228.319.322
					Program Pengendalian Kesehatan Kewan dan Kesehatan Veterier	206.389.059
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.698.487.218
					Program Penyuluhan Pertanian	1.926.839.457
		18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	4.664.067.218
					Program Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	13.674.275.902
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	146.057.035.399
					Program Pengelolaan Sumber Daya air (SDA)	152.275.829.072
					19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	286.849.300			
		program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.893.282.513			
		Program Pengelolaan Persampahan	115.798.951.136			
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	114.305.813			

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
					Program Pengendalian Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.991.218.432
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	112.110.740
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	1.076.947.908
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	729.716.412
		20	S4. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	610.645.900
					Program Penataan Bangunan Gedung	485.816.166.063
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.822.990.902
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.771.699.443
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.964.321.142
					Program Penyelenggaraan Jalan	217.377.377.767
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.887.480.942
				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	88.976.390.170
				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah	182.537.710
				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	29.417.475.640
					Program Pengembangan Perumahan	4.691.217.808
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	302.071.018.920

Misi	Tujuan	No.	Sasaran Strategis	Urusan	Program	Anggaran
					Program Perumahan dan Kasawan Perumahan Kumuh	29.414.891.863
		21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.063.749
					program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	917.582.336
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.524.146.960
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.181.276.964
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya	4.083.030.772
				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	200.698.250
					Program Pengembangan kebudayaan	1.346.419.330
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	304.262.147
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.601.361.025
JUMLAH						5.000.764.221.011

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja, Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator kinerja lainnya yang relevan.

Penyajian akuntabilitas kinerja dilakukan melalui analisis capaian kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perubahan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029 dan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025. Analisis kinerja tersebut dilengkapi dengan evaluasi atas faktor pendukung/faktor keberhasilan dan penghambat/permasalahan, serta upaya perbaikan kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada periode berikutnya.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2025 untuk mengetahui celah kinerja (*performance gap*) serta tingkat keberhasilan pencapaiannya. Hasil pengukuran tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala, serta sebagai dasar perumusan rekomendasi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pengukuran capaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan metode perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Metode pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Positif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan Progres Positif, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun } 100,50\% = \frac{12,10}{12,04} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progres Negatif), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Ilustrasi perhitungan Progres Negatif, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja Indeks Risiko Bencana 85,91} = \frac{70 - (70 - 79,86)}{70} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat pencapaian indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, digunakan klasifikasi status capaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur dan objektif mengenai tingkat keberhasilan pencapaian kinerja, sekaligus menjadi dasar dalam analisis evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Kategori status capaian kinerja terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Kategori Status Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja (%)	Kategori	Makna Evaluatif
≥ 100%	● Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
90 – <100%	● Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
80 – <90%	● Cukup	Perlu optimalisasi kinerja
< 80%	● Kurang/ Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus

Sumber: Diadaptasi dari praktik pengukuran kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Berdasarkan klasifikasi tersebut, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan gambaran yang lebih transparan dan komprehensif mengenai tingkat keberhasilan kinerja, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan disajikan pada setiap sasaran strategis berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja, yang selanjutnya dianalisis melalui perbandingan antara realisasi dan target Tahun 2025. Selain itu, dilakukan pula analisis komparatif terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, tren beberapa tahun terakhir, serta keterkaitannya dengan target jangka menengah dalam RPJMD, baik dalam konteks daerah maupun nasional.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 mengacu pada pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025, sehingga hasil evaluasi yang disajikan mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan disajikan menurut masing-masing sasaran strategis pembangunan daerah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, disajikan pada **Tabel 3.2**, berikut.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja dibandingkan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	12,10	100,50	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	14,71	97,29	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	83,18	119,39	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	90,60	109,98	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,2	79,09	131,38	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	86,76	122,01	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	76,09	99,84	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	2,39	93,78	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	58,91	100,00	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,7	70,80	107,76	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	0,176	98,85	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	Data Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS Provinsi Banten, sehingga nilai realisasi pada laporan ini masih menggunakan data Tahun 2024 sebagai proksi, dan akan dilakukan penyesuaian pada

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
									periode pelaporan berikutnya setelah data resmi tersedia.
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	73,00	99,93	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	Data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, nilai realisasi pada laporan ini masih menggunakan data Tahun 2024 sebagai proksi, dan akan dilakukan penyesuaian pada periode pelaporan berikutnya setelah data resmi tersedia.
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	56,07	100,20	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	56,09	63,39	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,6	74,90	107,61	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	3,09	99,36	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	11,19	96,13	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	Data Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2025 belum tersedia karena data PDRB sektoral masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan pada tanggal 30 April 2026. Oleh karena itu, nilai realisasi indikator pada laporan ini masih menggunakan data Tahun 2024 sebagai proksi sementara, dan akan dilakukan penyesuaian pada periode pelaporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
									berikutnya setelah data resmi tersedia.
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,4	54,97	104,90	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,21	102,79	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96-129,10	118,63	92,71	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,5	60,42	99,87	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44	43,93	99,83	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,7	12,45	143,10	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,62	108,71	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,87	52,58	105,43	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	64	96,44	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	70	69,42	99,17	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	5	5	100,00	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	2,41	125,52	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2	N/A	0,00	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	Data Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 belum tersedia karena proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), masih berlangsung. Oleh karena itu, nilai indikator belum dapat disajikan dan akan diperbarui setelah hasil pemeriksaan resmi diterbitkan.
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	97,36	98,05	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit*	Indeks	330	N/A		Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah dibubarkan sehingga penilaian Indeks Sistem Merit tidak lagi dilakukan.
		Indeks BerAKHLAK*	Indeks	80,5	N/A		Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	Indeks BerAKHLAK tidak lagi diberlakukan sejak tahun 2025 dan saat ini menunggu penetapan Peraturan Menteri terkait Budaya Kerja BerAKHLAK sebagai pengganti mekanisme pengukuran sebelumnya.
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	81	101,25	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77	74,52	96,78	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
16		Indeks Inovasi daerah	Angka	52	60,76	116,85	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,98	120,97	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Persentase kebijakan berbasis bukti	%	50	39,64	79,28	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	
17	S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	%	2,96	3,9	68,24	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,2	63,83	99,00	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71	68,36	96,28	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	34,93	60,92	174,41	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,73	34,85	103,32	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97	58,46	60,27	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	70	100	142,86	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,3	8,09	97,47	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Akses Rumah Tangga Perkotaan	%	21	20,50	97,64	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
		terhadap Air Minum Perpipaan							
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,74	99,47	99,73	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16	1,75	10,94	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,4	6,5	87,84	Cukup	Perlu optimalisasi kinerja	
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,1	53,17	100,13	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	76,15	98,26	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Indeks Demokrasi	Indeks	86,5	76,87	88,87	Cukup	Perlu optimalisasi kinerja	
		Indeks Rasa Aman	Angka	73,7	67,99	92,25	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 pada **Tabel 3.2**, capaian kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan secara umum menunjukkan kinerja yang baik namun belum merata antar indikator. Sebagian besar indikator berada pada kategori sangat baik dan baik, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, terutama pada sektor pendidikan, investasi, pelayanan publik, dan transformasi digital.

Namun demikian, indikator yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan layanan dasar seperti literasi, produktivitas tenaga kerja, ketahanan pangan, persampahan, dan sanitasi masih belum optimal. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pada aspek ketersediaan dan kualitas data kinerja, yang mempengaruhi ketepatan pengukuran capaian.

Dengan demikian, tantangan ke depan tidak hanya pada pencapaian target, tetapi pada peningkatan kualitas kinerja berbasis outcome serta penguatan sistem data kinerja. Selanjutnya, analisis disajikan pada masing-masing sasaran strategis.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Capaian Realisasi Kinerja

A. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk Semua

Berdasarkan **Tabel 3.3**, capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua” menunjukkan kinerja yang sangat baik, konsisten, dan berdampak nyata. Dari 6 indikator yang diukur, sebanyak 5 indikator melampaui target dan 1 indikator berada pada kategori baik, tanpa adanya indikator berkinerja rendah.

Secara kuantitatif, seluruh indikator memiliki capaian di atas 97%, dengan indikator utama bahkan melampaui 120%, yaitu: Kemampuan Numerasi SD (131,38%), Kemampuan Numerasi SMP (122,01%) dan Kemampuan Literasi SD (119,39%). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran berbasis kompetensi dasar telah berjalan sangat efektif dan terarah, serta berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar secara signifikan.

Namun demikian, indikator Harapan Lama Sekolah (97,29%) yang belum mencapai target menunjukkan adanya keterbatasan pada aspek akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada kelompok masyarakat rentan.

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa outcome pendidikan (kualitas belajar) mengalami peningkatan. Namun outcome akses pendidikan (keberlanjutan sekolah) masih perlu diperkuat.

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 1 Perubahan PK “Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	12,10	100,50	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	14,71	97,29	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	83,18	119,39	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	90,60	109,98	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,2	79,09	131,38	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	86,76	122,01	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian didorong oleh kombinasi intervensi yang kuat dan terintegrasi, yaitu:

- Transformasi kualitas pembelajaran, melalui integrasi literasi, numerasi, serta pengenalan coding dan kecerdasan artifisial, yang secara langsung meningkatkan kompetensi dasar peserta didik.
- Pemanfaatan Rapor Pendidikan berbasis data, yang mendorong perbaikan berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah.
- Inovasi penguatan budaya literasi, seperti program Duta Baca, yang memperluas ekosistem literasi di kalangan pelajar.
- Peningkatan kapasitas pendidik, melalui pelatihan berbasis metode pembelajaran mendalam (deep learning) dan penguatan kompetensi pedagogik.
- Program afirmasi pendidikan yang masif dan tepat sasaran, meliputi: BOSDA yang menjangkau puluhan ribu siswa, Beasiswa bagi lebih dari 10.000 penerima (siswa, guru, dan kelompok rentan) dan Insentif bagi lebih dari 5.500 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga berdampak pada menurunkan hambatan ekonomi pendidikan, meningkatkan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan dan memperkuat kualitas layanan pendidikan
- Peningkatan sarana prasarana pendidikan, melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, yang mendukung lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Faktor Kendala

Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, masih terdapat kendala struktural yang mempengaruhi keberlanjutan dan pemerataan hasil pembangunan pendidikan, yaitu:

- Keterbatasan akses pendidikan lanjutan, terutama akibat tekanan ekonomi keluarga, yang masih menjadi penghambat bagi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Risiko putus sekolah pada jenjang menengah, khususnya pada kelompok rentan, yang menunjukkan belum optimalnya sistem pencegahan dan intervensi berbasis risiko.
- Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas antar wilayah, yang berdampak pada belum meratanya capaian kompetensi dan layanan pendidikan.
- Prioritas ekonomi rumah tangga yang menggeser keberlanjutan pendidikan, terutama pada keluarga berpendapatan rendah, sehingga pendidikan belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Kondisi tersebut menahan peningkatan Harapan Lama Sekolah serta membatasi pemerataan outcome pendidikan.

Arah Perbaikan (*strategic Improvement/Education Reform*)

Untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja ke depan, akan dilakukan melalui:

- Penguatan intervensi akses pendidikan, khususnya bagi kelompok rentan dan wilayah prioritas
- Perluasan dan penajaman program afirmasi, berbasis data kemiskinan dan risiko putus sekolah
- Strategi penurunan putus sekolah berbasis preventif, melalui *early warning system* dan intervensi keluarga
- Pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah, melalui redistribusi sumber daya dan penguatan sekolah pinggiran
- Integrasi kualitas pembelajaran dengan keberlanjutan pendidikan, agar peningkatan kompetensi berjalan seiring dengan peningkatan partisipasi
- Transformasi literasi berbasis digital, melalui pengembangan *e-library*, *audiobook*, dan *microlearning*, integrasi dengan platform sekolah dan media digital dan penguatan ekosistem literasi berbasis komunitas.

B. Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua

Berdasarkan **Tabel 3.4**, capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua” menunjukkan kinerja yang baik dan relatif stabil, dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) terealisasi sebesar 76,09 tahun (99,84%), atau berada pada kategori baik (mendekati target).

Capaian ini mengindikasikan bahwa pembangunan sektor kesehatan telah mampu menjaga tren peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara konsisten, khususnya melalui: peningkatan akses layanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh menunjukkan bahwa kinerja kesehatan masih menghadapi tantangan struktural, terutama pada kelompok rentan.

Capaian UHH yang mendekati target mencerminkan bahwa intervensi kesehatan telah efektif pada level makro (outcome akhir). Namun, kondisi ini juga menunjukkan adanya *plateau effect*, dimana peningkatan indikator makro mulai melambat karena masih terdapat permasalahan pada indikator antara (*intermediate outcome*).

Tantangan utama terletak pada fase awal siklus kehidupan (ibu hamil, bayi, dan balita) dan kasus gizi, penyakit menular, dan risiko kehamilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa outcome kesehatan secara umum sudah baik namun kualitas intervensi pada kelompok spesifik belum optimal.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 2 Perubahan PK “Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	76,09	99,84	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

Capaian kinerja yang relatif tinggi didorong oleh penguatan intervensi kesehatan yang komprehensif, mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif, antara lain:

- Perluasan cakupan jaminan kesehatan (JKN/UHC) melalui dukungan pembiayaan premi selama 12 bulan, yang meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada menurunnya hambatan finansial dalam akses layanan kesehatan.
- Penguatan layanan kesehatan primer, melalui optimalisasi peran Puskesmas dan posyandu dalam skrining dini kesehatan ibu, bayi, dan balita, sehingga dapat meningkatkan deteksi dini risiko kesehatan pada fase kritis siklus kehidupan.
- Pengendalian penyakit menular (khususnya TBC) melalui pelacakan kasus aktif, validasi data rutin, serta keterlibatan lintas sektor sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit dan menekan potensi penularan.
- Peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap kesehatan, melalui sosialisasi JKN dan edukasi kesehatan, sehingga dapat mendorong pemanfaatan layanan kesehatan secara lebih optimal.

Faktor Kendala

Meskipun capaian relatif baik, masih terdapat kendala struktural yang mempengaruhi optimalisasi derajat kesehatan, terutama pada kualitas intervensi dan keberlanjutan layanan, yaitu:

- a. Kesehatan ibu dan anak (*critical life stage*), ditandai dengan masih tingginya risiko pada ibu hamil, bersalin, dan nifas (resti), belum optimalnya kepatuhan pemeriksaan kehamilan, keterbatasan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal–neonatal, serta belum optimalnya sistem rujukan dan audit kematian.
- b. Kesehatan balita dan gizi, dimana masih ditemukan kasus gizi bermasalah yang disertai penyakit penyerta (TBC, BBLR, prematur), dengan proses pemulihan yang relatif panjang dan kompleks.
- c. Pengendalian penyakit menular (TBC), yang masih menghadapi tantangan pada kepatuhan pengobatan, termasuk pasien mangkir, serta kesulitan pelacakan akibat mobilitas penduduk.
- d. Sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan, yang belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi konsistensi data maupun integrasi antar fasilitas layanan.
- e. Dukungan sistem kesehatan, terutama terkait ketersediaan logistik dan kesiapan layanan, yang belum merata.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan capaian kinerja secara lebih optimal dan berkelanjutan, akan dilakukan melalui:

- a. Penguatan intervensi kesehatan ibu dan anak berbasis risiko, melalui skrining sejak pra-kehamilan hingga pasca persalinan (Inovasi Kawat Berduri).
- b. Optimalisasi layanan kesehatan berbasis komunitas, seperti penguatan Tim Ngider Sehat dan Ngider Premium untuk menjangkau kelompok rentan.
- c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- d. Penguatan sistem rujukan dan audit kematian, untuk memastikan respon cepat dan pembelajaran kasus secara sistemik.
- e. Perbaikan sistem data kesehatan berbasis digital dan real-time, guna meningkatkan akurasi dan responsivitas kebijakan.
- f. Peningkatan kepatuhan pengobatan penyakit menular, melalui pendampingan aktif dan pelacakan pasien secara terintegrasi.
- g. Penguatan integrasi lintas sektor dan lintas program, khususnya pada pengendalian TBC dan kesehatan ibu–anak.
- h. Perluasan cakupan jaminan kesehatan (UHC) melalui dukungan pembiayaan iuran bagi kelompok rentan.

C. Sasaran 3: Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial

Berdasarkan **Tabel 3.5**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dalam menurunkan kemiskinan, meskipun indikator kesejahteraan sosial telah tercapai. Indikator Tingkat Kemiskinan terealisasi sebesar 2,39%, lebih tinggi dari target (1,91–2,25%), dengan capaian 79,92% (Perlu Intervensi). Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Sosial mencapai target sebesar 100% (Sangat Baik).

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara peningkatan kesejahteraan sosial dengan penurunan kemiskinan, dimana peningkatan kualitas layanan sosial belum sepenuhnya berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin. Hal ini diperkuat oleh data makro kemiskinan Tahun 2025, yaitu: Garis Kemiskinan sebesar Rp864.323/kapita/bulan, Jumlah penduduk miskin sebanyak 44,61 ribu jiwa dan Persentase penduduk miskin sebesar 2,39%.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan relatif rendah secara persentase, masih terdapat kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi.

Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 3 Perubahan PK “Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	2,39	79,92	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	58,91	100,00	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Belum tercapainya target tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan sosial belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Indeks Kesejahteraan Sosial yang mencapai target lebih merefleksikan perbaikan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial), namun belum cukup kuat dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, terdapat gap antara outcome sosial (akses dan perlindungan) dan outcome ekonomi (peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan). Selain itu, dengan garis kemiskinan yang relatif tinggi pada wilayah perkotaan, maka kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor) memiliki risiko tinggi untuk kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Faktor Keberhasilan

Peningkatan kesejahteraan sosial didorong oleh implementasi intervensi perlindungan sosial yang luas, terarah, dan menjangkau kelompok rentan, antara lain:

- Perluasan perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 25.000 peserta, yang meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan terhadap risiko ekonomi sehingga mengurangi kerentanan akibat risiko kerja dan kehilangan pendapatan.
- Dukungan bagi penyandang disabilitas, melalui: bantuan sosial kepada 70 penerima, dan bantuan alat bantu kepada 140 penerima, yang berkontribusi terhadap

- peningkatan aksesibilitas dan kualitas hidup kelompok rentan sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melalui peningkatan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sehingga dapat menjaga stabilitas kesejahteraan dan menurunkan tingkat kerentanan sosial.

Faktor Kendala

Belum optimalnya penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh faktor struktural yang saling terkait, yaitu:

- a. Tekanan ekonomi masyarakat perkotaan, yang ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan tingginya biaya hidup, sehingga mengurangi daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini diperparah oleh:
 - 1) keterbatasan peluang kerja produktif, dimana akses terhadap pekerjaan layak masih terbatas dan produktivitas tenaga kerja belum optimal;
 - 2) belum efektifnya program pemberdayaan ekonomi, yang masih cenderung bersifat bantuan, belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.
- b. Kedalaman kemiskinan yang masih tinggi, yang tercermin dari masih adanya kelompok masyarakat miskin dengan tingkat pengeluaran yang jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga lebih sulit untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran ini, akan dilakukan:

- a. Transformasi kebijakan dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan ekonomi
- b. Penguatan program peningkatan pendapatan masyarakat, melalui: pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar dan pengembangan UMKM dan kewirausahaan
- c. Penguatan integrasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektor
- d. Perbaikan basis data kemiskinan (single data) untuk meningkatkan ketepatan sasaran
- e. Intervensi khusus pada kelompok rentan (near poor) agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan
- f. Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program
- g. Dengan langkah tersebut, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan secara umum, tetapi juga mampu menurunkan tingkat dan kedalaman kemiskinan secara lebih signifikan.

D. Sasaran 4: Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak

Berdasarkan **Tabel 3.6**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang baik dengan kecenderungan meningkat. Dari 3 indikator yang diukur: (1) indikator (33,33%) melampaui target, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga, (2) indikator (66,67%) berada pada kategori baik (mendekati target), yaitu Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Perlindungan Anak. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pembangunan pada aspek keluarga, gender, dan perlindungan anak telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 4 Perubahan PK “Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,7	70,80	107,76	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	0,176	98,85	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	Data Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS Provinsi Banten. sehingga, nilai realisasi pada laporan ini masih menggunakan data Tahun 2024 sebagai proksi, dan akan dilakukan penyesuaian pada periode pelaporan berikutnya setelah data resmi tersedia.
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	73,00	99,93	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	Data Indeks Perlindungan Anak Tahun 2025 belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, nilai realisasi pada laporan ini masih menggunakan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
									data Tahun 2024 sebagai proksi, dan akan dilakukan penyesuaian pada periode pelaporan berikutnya setelah data resmi tersedia.

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Indikator Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 107,76%, yang menunjukkan bahwa: kualitas ketahanan keluarga meningkat secara signifikan dan intervensi pembangunan keluarga berbasis program Bangga Kencana berjalan efektif.

Sementara itu Indeks Ketimpangan Gender (98,85%) menunjukkan kesetaraan gender relatif baik, namun masih terdapat gap dalam akses dan peran perempuan dan Indeks Perlindungan Anak (99,93%) menunjukkan capaian hampir optimal, namun perlu dicermati karena masih menggunakan data tahun sebelumnya (proksi). Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembangunan keluarga sudah kuat namun aspek kesetaraan gender dan perlindungan anak masih memerlukan penguatan kualitas intervensi

Faktor Keberhasilan

Capaian kinerja pada sasaran ini didorong oleh kombinasi kebijakan, program, dan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, antara lain:

- Penguatan pembangunan keluarga berbasis data dan siklus hidup, melalui optimalisasi Program Bangga Kencana yang terintegrasi lintas sektor yang berdampak pada peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 70,80 (107,76%), melampaui target yang ditetapkan.
- Peningkatan akses keluarga terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memperkuat ketahanan keluarga dan menurunkan kerentanan sosial, sejalan dengan karakteristik masyarakat Tangerang Selatan yang memiliki tingkat pendidikan dan akses layanan dasar relatif tinggi.
- Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak, melalui optimalisasi layanan P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan dan perlindungan korban yang dapat meningkatkan responsivitas layanan perlindungan serta memperkuat sistem perlindungan berbasis kelembagaan.
- Implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang didukung regulasi daerah, antara lain: Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PUG dan Perwali Nomor 32 Tahun 2018 tentang RAD PUG yang dapat mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, yang berkontribusi pada capaian Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,176 (98,85%) atau mendekati target.
- Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan yang dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi serta memperkuat kemandirian ekonomi

keluarga, yang secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan keluarga.

Faktor Kendala

Meskipun capaian relatif baik, masih terdapat tantangan struktural yang mempengaruhi optimalisasi kesetaraan gender dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Budaya dan struktur sosial, yang masih dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki, sehingga membatasi peran perempuan serta menimbulkan beban ganda dalam ranah domestik dan publik, dampaknya membatasi partisipasi perempuan dalam pembangunan secara optimal.
- b. Kesenjangan akses dan peran gender, yang ditandai dengan belum optimalnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta belum meratanya akses terhadap peluang ekonomi, dampaknya pada ketimpangan kontribusi dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
- c. Sistem perlindungan anak yang belum berbasis pencegahan, serta masih terbatasnya ketersediaan data yang real-time dan valid mengenai kondisi anak, berdampak pada intervensi cenderung reaktif, belum mampu mencegah risiko sejak dini.
- d. Kualitas data kinerja yang belum optimal, khususnya pada indikator perlindungan anak yang masih menggunakan data proksi tahun sebelumnya sehingga pengambilan kebijakan belum sepenuhnya berbasis kondisi aktual.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan capaian kinerja secara lebih substantif dan berkelanjutan, akan dilakukan:

- a. Penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) secara substantif, tidak hanya administratif, tetapi terintegrasi dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran.
- b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pada kelompok rentan, untuk mendorong kemandirian dan partisipasi ekonomi.
- c. Penguatan sistem perlindungan anak berbasis pencegahan dan keluarga, melalui intervensi dini dan pendekatan berbasis komunitas.
- d. Transformasi pola pikir masyarakat (*social transformation*) untuk mengurangi bias gender dan memperkuat kesetaraan peran.
- e. Peningkatan kualitas data gender dan anak berbasis real-time, guna mendukung kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif.
- f. Penguatan integrasi lintas sektor, khususnya antara sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan dalam perlindungan perempuan dan anak.

E. Sasaran 5: Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

Berdasarkan **Tabel 3.7**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 56,07 atau 100,20% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan di Kota Tangerang Selatan telah berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas pemuda secara umum.

Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam berdasarkan domain IPP, masih terdapat ketimpangan capaian antar dimensi pembangunan pemuda, yaitu: Domain Kesehatan dan Kesejahteraan: 80,21 (tinggi), Domain Pendidikan: 70,95 (baik), Domain Gender dan Diskriminasi: 53,00 (cukup), Domain Lapangan Kerja: 55,90 (cukup) dan Domain Partisipasi dan Kepemimpinan: 20,27 (rendah).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian agregat IPP telah melampaui target, kualitas pembangunan pemuda belum merata pada seluruh dimensi, khususnya pada aspek partisipasi dan kepemimpinan.

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 5 Perubahan PK “Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan” Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	56,07	100,20	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Capaian IPP yang melampaui target menunjukkan bahwa kualitas dasar pemuda (pendidikan dan kesehatan) relatif baik dan akses terhadap peluang ekonomi dan aktivitas sosial cukup terbuka

Namun demikian, rendahnya nilai pada domain partisipasi dan kepemimpinan (20,27) mengindikasikan bahwa pemuda belum optimal berperan sebagai aktor pembangunan (*agent of change*) dan peran pemuda masih lebih dominan sebagai objek pembangunan (*beneficiary*).

Selain itu, capaian pada domain ketenagakerjaan (55,90) menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan sudah tersedia, namun kualitas pekerjaan dan produktivitas pemuda masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, terdapat gap antara kualitas individu pemuda dan kontribusi aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian IPP didorong oleh peningkatan kualitas pemuda pada beberapa aspek utama, antara lain:

- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pemuda, yang menjadi fondasi utama pembangunan kepemudaan yaitu Penguatan aktivitas kepemudaan dan

olahraga, melalui berbagai kegiatan seperti: Tangsel Marathon dan event olahraga lainnya, POPSEL, Jambore, dan Bulan Bakti Pramuka serta Penghargaan prestasi olahraga (487 orang)

- b. Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, termasuk pengadaan alat olahraga dan fasilitas pendukung
- c. Peningkatan ruang aktivitas sosial pemuda, melalui kegiatan komunitas dan organisasi.

Faktor Kendala

Beberapa kendala utama dalam pembangunan pemuda antara lain:

- a. Rendahnya partisipasi dalam kepemimpinan, hal ini ditandai dengan keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas dan minimnya ruang formal bagi pemuda dalam struktur pembangunan daerah
- b. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja muda, ditandai dengan keterampilan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan tingkat kewirausahaan masih perlu ditingkatkan
- c. Kesenjangan gender dan inklusivitas, yaitu masih terdapat hambatan bagi kelompok pemuda tertentu dalam mengakses peluang
- d. Dominasi pendekatan kegiatan (event-based), yaitu program kepemudaan masih banyak berbasis kegiatan, belum sepenuhnya berbasis outcome jangka panjang.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan pemuda ke depan, akan dilakukan:

- a. Penguatan peran pemuda dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, melalui forum dan kelembagaan kepemudaan
- b. Pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda, berbasis inovasi dan teknologi
- c. Peningkatan keterampilan pemuda yang link and match dengan dunia kerja
- d. Transformasi program kepemudaan dari berbasis kegiatan menjadi berbasis outcome dan dampak
- e. Penguatan inklusivitas dan kesetaraan gender dalam pembangunan pemuda
- f. Peningkatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha dan komunitas

F. Sasaran 6: Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital

Berdasarkan **Tabel 3.8**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang belum optimal dan memerlukan intervensi khusus. Indikator Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) terealisasi sebesar 56,09 atau 63,39% dari target, dengan kategori rendah berdasarkan penilaian Perpustakaan Nasional.

Nilai tersebut merupakan hasil komposit dari Dimensi pra membaca: 51,47, Dimensi saat membaca: 55,18 dan Dimensi pasca membaca: 59,23. Capaian ini menunjukkan bahwa

aktivitas literasi masyarakat masih rendah secara menyeluruh, baik dari sisi minat, kebiasaan, maupun pemanfaatan hasil membaca.

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 6 Perubahan PK “Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital” Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	56,09	63,39	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Tidak tercapainya target secara signifikan menunjukkan bahwa budaya literasi masyarakat belum terbentuk secara kuat dan literasi belum menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Selain itu, terdapat faktor metodologis yang turut mempengaruhi capaian, yaitu Perubahan rumus perhitungan TGM oleh Perpustakaan Nasional (surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025), yang menyebabkan penurunan nilai dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun demikian, secara substantif capaian ini tetap mencerminkan bahwa aktivitas membaca masih rendah dan pemanfaatan literasi sebagai kemampuan adaptif di era digital belum optimal. Intervensi yang dilakukan, seperti festival literasi (1 kegiatan), masih bersifat terbatas dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan indeks literasi.

Faktor Keberhasilan

Meskipun capaian masih rendah, terdapat beberapa upaya awal yang telah dilakukan, antara lain penyelenggaraan kegiatan literasi masyarakat dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya literasi di era digital. Namun demikian, kontribusi keberhasilan masih terbatas karena intervensi belum berskala luas dan belum terintegrasi secara sistematis antar dimensi literasi.

Faktor Kendala

Rendahnya capaian literasi dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural yang saling terkait, yaitu:

- Rendahnya budaya literasi masyarakat, yang tercermin dari minat dan motivasi membaca yang masih rendah, serta belum menjadikannya sebagai kebutuhan dasar, sehingga berdampak pada aktivitas membaca belum menjadi kebiasaan.
- Perubahan perilaku akibat digitalisasi, dimana masyarakat lebih cenderung mengonsumsi konten hiburan digital, sementara literasi digital belum diimbangi dengan kemampuan membaca yang mendalam (*deep reading*), dampaknya kualitas literasi menurun meskipun akses informasi meningkat.

- c. Keterbatasan akses dan kualitas bahan bacaan, ditandai dengan koleksi perpustakaan yang belum sepenuhnya relevan dan menarik, serta akses terhadap bahan bacaan berkualitas yang masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya daya tarik dan keterjangkauan literasi bagi masyarakat.
- d. Pemanfaatan fasilitas literasi yang belum optimal, dimana perpustakaan belum berfungsi sebagai pusat aktivitas literasi berbasis komunitas, serta kegiatan literasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang berdampak pada literasi belum menjadi gerakan sosial yang masif.
- e. Kelemahan sistem data dan pengukuran, yang ditandai dengan proses pengumpulan data yang belum optimal serta adanya perubahan metodologi perhitungan yang mempengaruhi capaian indikator sehingga hasil pengukuran belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil.
- f. Pendekatan program yang belum terintegrasi, dimana program literasi belum mencakup siklus utuh (pra–saat–pasca membaca) sehingga intervensi belum menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan capaian literasi secara lebih efektif dan berkelanjutan, akan dilakukan:

- a. Penguatan ekosistem literasi berbasis siklus (pra–saat–pasca membaca) guna mendorong perubahan perilaku membaca secara utuh.
- b. Transformasi perpustakaan menjadi pusat aktivitas literasi dan komunitas, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan buku.
- c. Pengembangan perpustakaan digital dan penyediaan bahan bacaan yang relevan dan menarik, sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Perluasan jangkauan program literasi berbasis wilayah dan komunitas, untuk meningkatkan inklusivitas.
- e. Penguatan kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, dan sektor swasta, dalam membangun gerakan literasi bersama.
- f. Integrasi literasi dengan platform digital, dengan mendorong literasi digital yang produktif dan berbasis pembelajaran.
- g. Perbaikan sistem data dan pengukuran literasi, melalui penguatan pengumpulan dan validasi data berbasis wilayah.

G. Sasaran 7: Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global

Berdasarkan **Tabel 3.9**, capaian indikator menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan semakin menguat pada sektor perdagangan dan jasa dengan realisasi 74,90% (107,61% dari target). Selain itu, indikator ekspor (104,90%) dan rasio kewirausahaan (102,79%) juga menunjukkan kinerja yang melampaui target, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis usaha dan menguatnya konektivitas ekonomi daerah dengan pasar yang lebih luas.

Namun demikian, analisis lebih dalam menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktur pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perdagangan tumbuh dominan sebagai driver utama PDRB, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal sebagai mesin pertumbuhan. Hal ini tercermin dari kontribusi akomodasi dan makan minum hanya 3,09% (Rp3.708,42 miliar dari Rp119.858,70 miliar) dan ekonomi kreatif masih 96,13% (belum mencapai target, menggunakan data proksi).

Dengan demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, melainkan masih didominasi oleh aktivitas distribusi (*trading economy*).

Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 7 Perubahan PK “Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,6	74,90	107,61	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	3,09	99,36	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	11,19	96,13	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi	Data Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2025 belum tersedia karena data PDRB sektoral masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadwalkan pada tanggal 30 April 2026. Oleh karena itu, nilai realisasi indikator pada laporan ini masih menggunakan data Tahun 2024 sebagai proksi sementara, dan akan dilakukan penyesuaian pada periode pelaporan berikutnya setelah data resmi tersedia.
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,4	54,97	104,90	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,21	102,79	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Capaian indikator menunjukkan bahwa transformasi ekonomi daerah bergerak ke arah positif, dengan kontribusi sektor perdagangan dan jasa mencapai 74,90% dari PDRB dan nilai PDRB akomodasi dan makan minum sebesar Rp3.708,42 miliar dari total Rp119.858,70 miliar. Selain itu jumlah wirausaha daerah mencapai 2,21%, didukung 18.601 pelaku usaha aktif dari total 674.454 angkatan kerja.

Namun demikian, analisis lebih dalam menunjukkan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata belum secepat sektor perdagangan dan kontribusi sektor berbasis experience economy (pariwisata/event) masih terbatas. Dengan demikian, struktur ekonomi daerah masih kuat di sektor distribusi (perdagangan), namun belum sepenuhnya bernilai tambah tinggi (ekraf dan pariwisata).

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja didorong oleh penguatan ekosistem usaha dan kewirausahaan, antara lain:

- Penguatan UMKM dan kewirausahaan dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain inkubator bisnis yang menjangkau 26 tenant, pengembangan E-Hub sebanyak 100 tenant, sertifikasi halal untuk 68 produk, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi 100 IKM, serta pembentukan sekitar 21–22 koperasi. Intervensi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya formalisasi usaha, daya saing produk lokal, serta penguatan kapasitas produksi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
- Di sisi lain, penguatan akses pasar dan promosi produk dilaksanakan melalui keikutsertaan dalam kegiatan APEKSI dengan sekitar 67 produk unggulan, optimalisasi sarana pemasaran UMKM, serta kemitraan dengan marketplace dan ritel modern. Upaya ini berdampak pada meningkatnya eksposur produk, perluasan jaringan pemasaran, serta peningkatan volume transaksi dan potensi ekspor.
- Pengembangan sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif dan pariwisata juga menjadi faktor penting, melalui sertifikasi tenaga kerja pariwisata sebanyak 110 orang serta pelatihan ekonomi kreatif bagi 125 peserta. Intervensi ini mendorong peningkatan profesionalisme pelaku usaha dan kualitas layanan, khususnya pada sektor jasa berbasis pengalaman.
- Dukungan ekosistem digital yang semakin kuat, ditandai dengan tingginya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, serta meningkatnya literasi digital pelaku usaha, turut mempercepat proses digitalisasi UMKM. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi usaha serta perluasan akses pasar berbasis digital.

Faktor Kendala

Meskipun capaian ekonomi menunjukkan tren positif, masih terdapat kendala struktural yang menghambat optimalisasi sektor unggulan, yaitu:

- a. Belum optimalnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pengungkit ekonomi menyebabkan lemahnya orkestrasi program dan keterbatasan anggaran prioritas, seperti:
 - 1) Program strategis (event, kawasan tematik) belum berjalan optimal
 - 2) Dampak ekonomi berbasis experience (wisata/event) masih rendah
 - 3) Pengembangan kawasan tematik belum berjalan
 - 4) Hub dan channeling ekraf belum optimal
 - 5) Variasi dan konsistensi produk masih terbatas
- b. Ekosistem UMKM belum sepenuhnya naik kelas (scaling issue) menyebabkan pembinaan masih parsial, belum end-to-end, seperti:
 - 1) Kualitas produk belum merata (standarisasi, higienitas, branding)
 - 2) Supply chain belum stabil
- c. Kesenjangan kapasitas pelaku usaha, sehingga pendekatan program masih berbasis kegiatan, belum berbasis outcome seperti:
 - 1) Kapasitas digital pelaku usaha belum merata
 - 2) Komitmen pelaku usaha dalam pembinaan belum konsisten
- d. Kendala struktural program dan anggaran
 - 1) Beberapa program tidak berjalan karena keterbatasan anggaran
 - 2) Biaya logistik dan keterbatasan fasilitas promosi
- e. Ketergantungan pada sektor perdagangan, ekonomi daerah masih belum terdorong oleh sektor bernilai tambah tinggi.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, akan dilakukan transformasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Transformasi struktur ekonomi daerah, dari *trading-based economy* menuju *value-added economy*, dengan mendorong sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai pengungkit utama pertumbuhan.
- b. Penguatan sektor pariwisata berbasis kawasan dan event, melalui pengembangan kawasan tematik serta penyelenggaraan event ekonomi skala regional dan nasional sebagai *growth trigger* yang mampu meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
- c. Strategi UMKM naik kelas (*scaling strategy*), melalui penguatan kapasitas produksi, standarisasi, dan branding produk, serta integrasi rantai nilai hulu–hilir (produksi–pasar–ekspor) untuk meningkatkan daya saing.

- d. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, melalui pengembangan *hub* dan *channeling* usaha, serta kolaborasi dengan industri kreatif dan platform digital guna memperluas akses pasar dan inovasi produk.
- e. Percepatan digitalisasi end-to-end, tidak hanya pada aspek pemasaran, tetapi juga mencakup manajemen usaha, proses produksi, dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
- f. Penguatan akses pembiayaan dan investasi UMKM, melalui perluasan akses permodalan serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.

H. Sasaran 8: Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi

Berdasarkan **Tabel 3.10**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja baik, namun belum optimal pada aspek produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja 92,71% (belum mencapai target) dan TPAK: 99,87% (mendekati target). Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja sudah tinggi namun produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah. Dengan demikian, isu utama pada sasaran ini bukan pada akses terhadap pekerjaan, tetapi pada kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 3.10. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 8 Perubahan PK “Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96 - 129,10	118,63	92,71	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,5	60,42	99,87	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Capaian TPAK yang hampir mencapai target (60,42%) menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan penduduk dalam pasar kerja relatif baik serta peluang masuk pasar kerja cukup terbuka. Namun, produktivitas tenaga kerja yang hanya mencapai 118,63 juta rupiah (di bawah target 127,96–129,10 juta) menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi (PDRB) belum diikuti oleh peningkatan produktivitas individu tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi tenaga kerja, dominasi sektor ekonomi dengan produktivitas rendah serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dengan kata lain “banyak yang bekerja, tetapi belum produktif secara optimal.”

Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian pada aspek partisipasi tenaga kerja didukung oleh:

- Program peningkatan kompetensi tenaga kerja, meliputi Program 3D (Dilatih, Disertifikasi, Ditempatkan) sebanyak 540 peserta (termasuk 40 disabilitas) dan Pelatihan berbasis kebutuhan (EV, AI, perbengkelan, AC, baking, dll) yang berdampak pada peningkatan keterampilan teknis tenaga kerja serta peningkatan kesiapan kerja (job readiness).
- Penguatan sistem matching tenaga kerja, melalui Job Fair dan aplikasi ANGGUR (Single Window Ketenagakerjaan) yang berdampak pada peningkatan akses informasi kerja dan percepatan matching supply-demand tenaga kerja
- Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, melalui Penempatan tenaga kerja pada program SPPG dan Pengawasan serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang berdampak pada peningkatan akses kerja formal serta peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Faktor Kendala

Meskipun capaian partisipasi tenaga kerja relatif tinggi, terdapat beberapa kendala struktural yang menahan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yaitu:

- Mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, ditandai dengan kurikulum pelatihan yang belum sepenuhnya demand-driven serta keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan sektor produktif, sehingga menurunkan produktivitas kerja.
- Dominasi sektor ekonomi berproduktivitas rendah, khususnya pada sektor informal dan jasa tradisional, yang menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan output per tenaga kerja.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam aktivitas ekonomi, sehingga proses produksi masih bersifat konvensional dan belum mampu meningkatkan efisiensi serta nilai tambah.
- Kualitas pekerjaan masih rendah, ditandai dengan masih terbatasnya pekerjaan formal dan pekerjaan dengan upah layak, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
- Keterbatasan akses pelatihan berbasis kompetensi lanjutan, khususnya pada bidang teknologi, digital, dan green jobs, yang menyebabkan peningkatan keterampilan tenaga kerja belum merata.
- Ketimpangan informasi pasar kerja, meskipun telah tersedia platform seperti ANGGUR, namun pemanfaatannya belum optimal oleh seluruh pencari kerja dan pelaku usaha, sehingga matching tenaga kerja belum sepenuhnya efisien.
- Pertumbuhan lapangan kerja berkualitas belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja, yang ditunjukkan oleh jumlah kesempatan kerja baru yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga menahan peningkatan produktivitas.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan, akan dilakukan melalui:

- Transformasi kebijakan ketenagakerjaan melalui Dari *job placement* ke *productivity enhancement* yang fokus pada kualitas pekerjaan, bukan hanya jumlah
- Penguatan *link and match* dengan dunia industri melalui kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan industri serta kolaborasi dengan sektor swasta dan industri strategis
- Pengembangan tenaga kerja berbasis teknologi dan inovasi melalui pelatihan digital, AI, dan green jobs dan peningkatan literasi teknologi tenaga kerja
- Peningkatan kualitas pelatihan (demand-driven) berbasis kebutuhan pasar kerja dan berorientasi pada outcome (penempatan kerja dan peningkatan pendapatan)
- Penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan sektor bernilai tambah tinggi dan dukungan investasi dan industri padat karya produktif
- Penguatan sistem ketenagakerjaan terintegrasi melalui optimalisasi platform ANGUR sebagai ekosistem ketenagakerjaan dan integrasi data tenaga kerja, pelatihan, dan kebutuhan industri.

I. Sasaran 9: Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan

Berdasarkan **Tabel 3.11**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja sangat baik secara agregat, dengan indikator utama investasi melampaui target secara signifikan. Nilai investasi (PMDN dan PMA) Rp12,45 triliun (143,10%) melampaui target dan PMTB 43,93% (99,84%), mendekati target. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi daerah sangat tinggi, namun konversi investasi menjadi pembentukan modal tetap (investasi riil) belum sepenuhnya optimal.

Tabel 3.11. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 9 Perubahan PK “Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44	43,93	99,84	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,7	12,45	143,10	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Nilai investasi yang tinggi didorong oleh PMDN Rp10,18 triliun dan PMA Rp2,27 triliun. Namun, kontribusi terhadap PMTB hanya mencapai Rp52.649,80 miliar dari total PDRB Rp119.858,70 miliar (43,93%). Ini menunjukkan adanya gap antara komitmen investasi dan realisasi investasi fisik (*real sector investment*). Dengan kata lain investasi masuk tinggi tetapi belum sepenuhnya terkonversi menjadi aset produktif dan kapasitas

ekonomi riil. Implikasinya pertumbuhan investasi belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

Faktor Keberhasilan

- a. Penguatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) melalui Layanan OSS dan inovasi JOSS (jemput OSS), Penyederhanaan SOP dan standar pelayanan dan Mall Pelayanan Publik, sehingga berdampak pada percepatan perizinan dan peningkatan minat investasi.
- b. Penguatan pembinaan dan pengawasan investasi melalui Pendampingan LKPM (PENSI), Monitoring pelaporan investasi, dan Koordinasi dengan BKPM, sehingga berdampak pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peningkatan akurasi data investasi.
- c. Promosi dan fasilitasi investasi melalui Temu investor dan Investment Award dan Partisipasi dalam APEKSI, sehingga berdampak pada peningkatan eksposur potensi daerah dan peningkatan kepercayaan investor.
- d. Tingginya permintaan legalitas usaha melalui Peningkatan permohonan NIB sehingga berdampak pada peningkatan formalitas usaha dan perluasan basis investasi.

Faktor Kendala

Meskipun capaian nilai investasi sangat tinggi (Rp12,45 triliun atau 143,10% dari target), masih terdapat beberapa kendala struktural yang mempengaruhi kualitas investasi dan dampaknya terhadap perekonomian daerah, yaitu:

- a. Gap antara realisasi investasi dan pembentukan aset produktif (PMTB): Nilai PMTB sebesar Rp52,65 triliun atau 43,93% terhadap PDRB Rp119,86 triliun (99,84% dari target) menunjukkan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya terkonversi menjadi aset produktif, sehingga nilai investasi masih didominasi sektor jasa dan perdagangan (non-tradable), sementara hilirisasi dan sektor bernilai tambah tinggi belum optimal.
- b. Keterbatasan pemetaan potensi dan peluang investasi: Belum tersedianya database potensi investasi yang terintegrasi dan terdigitalisasi menyebabkan profil peluang investasi daerah belum komprehensif sehingga jumlah project ready-to-offer (investment ready project) masih terbatas dan belum mampu menarik investasi strategis berbasis potensi lokal.
- c. Rendahnya kepatuhan pelaporan investasi (LKPM): Meskipun realisasi investasi tinggi (PMDN Rp10,18 triliun dan PMA Rp2,27 triliun), tidak seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan LKPM secara rutin, menyebabkan kualitas data investasi belum optimal, sehingga menyulitkan monitoring, evaluasi, dan perumusan kebijakan berbasis data.
- d. Kendala kelembagaan dan tata kelola investasi: Masih terdapat ego sektoral antar instansi, keterbatasan SDM penyusun SOP perizinan, serta kanal pengaduan yang belum stabil (sering error), menyebabkan koordinasi lintas sektor belum terintegrasi dan berpotensi menurunkan kualitas layanan investasi, meskipun indeks pelayanan sudah tinggi.

- e. Basis data pelaku usaha belum komprehensif: Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta belum terpetakan secara sistematis, sehingga intervensi kebijakan, pembinaan, dan fasilitasi investasi belum sepenuhnya tepat sasaran dan berbasis data.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan kualitas investasi daerah, akan dilakukan melalui:

- a. Transformasi investasi dari kuantitas ke kualitas, yaitu fokus pada investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah dan berbasis potensi lokal
- b. Penguatan hilirisasi ekonomi daerah yang fokus pada pengembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif dan jasa profesional
- c. Penyusunan *investment project ready-to-offer* melalui pemetaan potensi investasi berbasis sektor unggulan dan penyediaan paket investasi siap tawar
- d. Penguatan integrasi kebijakan lintas sektor dengan mengurangi ego sektoral dan integrasi perizinan, investasi, dan perencanaan ekonomi
- e. Peningkatan kualitas layanan investasi melalui digitalisasi layanan perizinan end-to-end dan penguatan Mall Pelayanan Publik
- f. Peningkatan kepatuhan dan monitoring investasi melalui penguatan sistem pelaporan LKPM dan Insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha.

J. Sasaran 10: Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif

Berdasarkan **Tabel 3.12**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja sangat baik, dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,62 (108,71%) atau kategori A. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan telah berada pada level prima (*excellent service*) dan sistem pelayanan publik telah memenuhi standar nasional dan ekspektasi masyarakat

Penilaian IPP didasarkan pada enam aspek utama, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan dan inovasi pelayanan publik

Dengan demikian, capaian ini mencerminkan perbaikan menyeluruh pada tata kelola pelayanan publik, baik dari sisi sistem, SDM, maupun pengalaman pengguna layanan.

Tabel 3.12. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 10 Perubahan PK "Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif" Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,62	108,71	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Realisasi IPP yang melampaui target menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi telah melampaui ekspektasi dan terjadi peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (*user experience*). Hal ini menandakan bahwa reformasi pelayanan publik telah berbasis sistem (*system-driven*) dan berorientasi pengguna (*user-centric*).

Namun demikian, capaian tinggi ini juga mengindikasikan perlunya menjaga konsistensi kualitas layanan di seluruh unit layanan dan perlunya peningkatan dari “baik” menjadi adaptif dan inovatif berkelanjutan.

Faktor Keberhasilan

- Penguatan kebijakan dan standar pelayanan melalui Penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB (nilai A) dan Standarisasi pelayanan di seluruh unit layanan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang terukur dan terstandar
- Penguatan sistem evaluasi dan monitoring melalui Penilaian mandiri melalui aplikasi IPP daerah dan Monitoring kinerja pelayanan publik, sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas dan pengendalian kualitas layanan
- Penguatan profesionalisme dan sistem pelayanan melalui Perbaikan SDM pelayanan dan Digitalisasi serta integrasi sistem pelayanan, sehingga berdampak pada pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien
- Penguatan orientasi pada pengguna layanan melalui Integrasi pengaduan dan konsultasi serta Peningkatan kepuasan masyarakat, sehingga berdampak pada meningkatnya trust masyarakat terhadap pemerintah.

Faktor Kendala

Meskipun capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,62 (108,71%) kategori A menunjukkan kinerja sangat baik, masih terdapat beberapa kendala struktural yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kualitas pelayanan, yaitu:

- Keterbatasan kapasitas evaluator pelayanan publik: Jumlah evaluator belum sebanding dengan banyaknya unit layanan yang harus dinilai dalam penilaian mandiri IPP, sehingga kualitas evaluasi berpotensi tidak merata antar perangkat daerah serta meningkatkan risiko bias penilaian, terutama pada unit layanan dengan kompleksitas tinggi.
- Variasi kualitas layanan antar perangkat daerah: Meskipun nilai agregat IPP tinggi, masih terdapat disparitas kualitas pada aspek penilaian seperti sarana prasarana (18%), inovasi pelayanan (12%), dan konsultasi & pengaduan (10%), sehingga belum seluruh unit layanan mampu mencapai standar kualitas yang sama, sehingga mempengaruhi konsistensi pengalaman pelayanan masyarakat.
- Ketergantungan pada penilaian administratif: Pengukuran IPP masih mengandalkan kombinasi penilaian evaluator dan pemenuhan dokumen administrasi, sehingga terdapat risiko orientasi pada pemenuhan indikator (*compliance-based*) dibandingkan peningkatan kualitas pengalaman pengguna layanan (*experience-based service*).

- d. Belum optimalnya inovasi pelayanan yang berkelanjutan: Meskipun terdapat inovasi pelayanan, pengembangannya belum sepenuhnya berbasis kebutuhan dinamis masyarakat dan belum terstandarisasi antar perangkat daerah, sehingga inovasi cenderung sporadis dan belum memberikan dampak sistemik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Arah Perbaikan (Strategic Improvement)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke level yang lebih tinggi, akan dilakukan melalui:

- Penguatan sistem evaluasi pelayanan, melalui Penambahan dan peningkatan kapasitas evaluator serta Penguatan quality assurance pelayanan publik
- Standardisasi dan replikasi best practice, melalui Replikasi unit layanan terbaik ke seluruh perangkat daerah dan Penguatan benchmarking pelayanan publik
- Transformasi menuju pelayanan publik berbasis pengalaman (experience-based service) yang Fokus pada kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan dan Penguatan customer journey pelayanan
- Penguatan inovasi pelayanan publik melalui Inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan Integrasi layanan digital dan layanan terpadu
- Penguatan integrasi sistem pelayanan melalui Integrasi data dan layanan lintas sektor dan Pengembangan pelayanan satu pintu berbasis digital.

K. Sasaran 11: Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis

Berdasarkan **Tabel 3.13**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja sangat baik secara agregat, dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 52,58 (105,43%) melampaui target dan Tingkat Digitalisasi Arsip 64 (96,44%) belum optimal. Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada masyarakat dan sektor layanan publik telah berkembang dengan baik namun digitalisasi tata kelola internal (arsip dan administrasi) masih menjadi titik lemah.

Dengan demikian, transformasi digital di Kota Tangerang Selatan telah kuat pada aspek front-end (layanan dan masyarakat), namun belum sepenuhnya optimal pada back-end (governance system).

Tabel 3.13. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 11 Perubahan PK “Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,87	52,58	105,43	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	64	96,44	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Capaian IMDI yang melampaui target menunjukkan meningkatnya literasi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dan meningkatnya akses terhadap infrastruktur digital. Hal ini didukung oleh penambahan titik wifi gratis dan penambahan kecepatan internet sebanyak 3000 titik, peningkatan kecepatan jaringan publik dan penguatan SPBE dan layanan digital.

Namun, capaian digitalisasi arsip yang belum optimal menunjukkan transformasi digital belum terintegrasi secara end-to-end dalam tata kelola pemerintahan. Secara spesifik nilai sistem digitalisasi arsip masih belum optimal secara sistemik dan pemanfaatan aplikasi kearsipan belum merata. Artinya digitalisasi masih bersifat parsial, belum menjadi sistem kerja utama pemerintahan.

Faktor Keberhasilan

- a. Penguatan kebijakan transformasi digital melalui Dukungan kebijakan SPBE dan digitalisasi layanan sehingga berdampak pada percepatan transformasi digital di sektor publik
- b. Peningkatan infrastruktur digital melalui Penambahan WiFi publik dan peningkatan jaringan, sehingga berdampak pada peningkatan akses digital masyarakat dan peningkatan inklusi digital
- c. Pengembangan kompetensi digital ASN melalui Pelatihan digital talent ASN, sehingga berdampak pada peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan berbasis teknologi
- d. Sinergi lintas sektor melalui Kolaborasi pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, sehingga berdampak pada percepatan adopsi teknologi digital secara luas.

Faktor Kendala

Meskipun capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebesar 52,58 (105,43%) menunjukkan kinerja sangat baik, masih terdapat kendala struktural pada aspek tata kelola digital, khususnya kearsipan, yaitu:

- a. Digitalisasi tata kelola internal belum optimal, ditandai dengan implementasi aplikasi SRIKANDI yang belum merata serta sistem digitalisasi arsip yang belum berjalan secara menyeluruh. Hal ini tercermin dari tingkat digitalisasi arsip yang baru mencapai 64 (96,44% dari target), dengan ketimpangan antara arsip aktif dan arsip sistem yang masih belum terdigitalisasi. Kondisi ini menyebabkan digitalisasi belum menjadi budaya kerja, melainkan masih bersifat parsial dan administratif.
- b. Keterbatasan kompetensi SDM kearsipan digital, dimana kemampuan ASN dalam pengelolaan arsip elektronik belum merata antar perangkat daerah. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kapasitas yang berdampak pada kualitas implementasi digitalisasi arsip yang belum optimal.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana digitalisasi arsip, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur pendukung seperti perangkat alih media, penyimpanan digital, dan sistem pengelolaan arsip elektronik. Kondisi ini menyebabkan proses digitalisasi belum mampu mengakomodasi volume arsip yang besar secara merata.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
	tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	antar Pemerintah Daerah						melampaui target	
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	2,41	125,52	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2	N/A	-	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	Data Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 belum tersedia karena proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), masih berlangsung. Oleh karena itu, nilai indikator belum dapat disajikan dan akan diperbarui setelah hasil pemeriksaan resmi diterbitkan.

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Nilai SAKIP sebesar 69,42 (predikat B) menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan baik, namun belum optimal secara menyeluruh. Komposisi penilaian SAKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi) mengindikasikan masih terdapat gap pada kualitas manajemen kinerja (*performance management maturity*).

Di sisi lain, capaian rasio pajak terhadap PDRB sebesar 2,41%, dan realisasi pajak daerah Rp2,89 triliun (107,72%) menunjukkan kemandirian fiskal daerah meningkat. Dengan demikian kinerja fiskal dan tata kelola keuangan sudah kuat, namun kinerja manajemen (SAKIP) belum sepenuhnya mature.

Faktor Keberhasilan

- Penguatan kebijakan fiskal berbasis regulasi, meliputi Optimalisasi PBB-P2 dan BPHTB serta Penyesuaian regulasi pajak daerah melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berdampak pada peningkatan PAD (Rp2,89 triliun) dan peningkatan rasio pajak terhadap PDRB.
- Penguatan tata kelola keuangan daerah dengan Opini BPK WTP yang berdampak pada meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan
 - Penguatan jejaring kerja sama daerah dengan 5 kerja sama strategis tercapai berdampak pada peningkatan kolaborasi pembangunan dan efisiensi sumber daya melalui kemitraan
 - Adanya media teknologi dan informasi mengenai Kota Tangerang Selatan yang menambah daya tarik bagi pihak luar untuk bekerjasama dengan Kota Tangerang Selatan.
 - Dukungan anggaran dan kesamaan persepsi daerah dan mitra kerjasama
 - Komitmen pimpinan dan dukungan sistem menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja kelembagaan.

Faktor Kendala

- Masih terdapat indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound* (SMART) serta belum cukup untuk mengukur dan menggambarkan ketercapaian kinerja pada level Perangkat Daerah.
- Penjenjangan kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021, khususnya dalam penerapan *logical framework* dan identifikasi *Critical Success Factor* (CSF) pencapaian kinerja. Selain itu, masih terdapat Sebagian kecil perangkat daerah yang belum melakukan pengunggahan pohon kinerja terbaru pada laman esr.menpan.go.id,
- Pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya menggambarkan pola *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar perangkat daerah sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama;
- Penetapan rencana aksi pada perangkat daerah masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan atau aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme dialog kinerja secara elektronik. Kondisi ini menyebabkan proses pengukuran dan pembahasan capaian kinerja belum berjalan konsisten sebagai sarana evaluasi capaian kinerja berkala dan pendeteksian hambatan atau kendala lebih awal serta pengendalian dan perbaikan kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan.
- Laporan kinerja periodik belum memuat informasi capaian kinerja periodik dan/atau realisasi rencana aksi secara lengkap, sehingga perkembangan capaian kinerja dan realisasi rencana aksi belum terlihat secara menyeluruh dan belum dapat menjadi acuan bagi pemantauan kinerja secara sistematis, Laporan kinerja periodik belum menyajikan analisis atas faktor penghambat atau pendukung yang memengaruhi ketercapaian kinerja periodik maupun realisasi rencana aksi, serta belum memuat langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan di periode selanjutnya.
- Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya dimonitor secara sistematis dan berkala. Mekanisme yang telah digunakan belum berjalan optimal dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil

- evaluasi benar-benar dilaksanakan, serta belum sepenuhnya didukung dengan proses verifikasi atas kesesuaian bukti dukung yang disampaikan.
- h. Pengelolaan aset belum terukur optimal yang berisiko terhadap efisiensi pemanfaatan aset daerah.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement/ SAKIP Maturity Level Up*)

Untuk meningkatkan kapabilitas kelembagaan ke level SAKIP A, akan dilakukan melalui:

- a. Menyusun kembali Pohon Kinerja Kota dan OPD sesuai PermenPANRB, menyempurnakan Cascading, Perjanjian Kinerja, Peyusunan Rencana Aksi, Laporan Monev Capaian Rencana Aksi Pertriwulan, dan penyusunan Dialog kinerja OPD
- b. Melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja level Kota dan Perangkat Daerah, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran;
- c. Mereviu dan Menyusun kembali pohon kinerja, penjenjangan kinerja, perjanjian kinerja, rencana aksi yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 baik pada level perangkat daerah maupun pada tingkat Kota. Selain itu, melakukan pemutakhiran dan pengunggahan pohon kinerja secara konsisten pada laman esr.menpan.go.id guna menjamin keselarasan, keterpaduan, dan akuntabilitas informasi kinerja dengan dokumen perencanaan yang dimiliki.;
- d. Memastikan pohon kinerja yang disusun telah menggambarkan pola crosscutting kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* antar perangkat daerah sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya kinerja utama;
- e. Memperkuat pelaksanaan pengukuran kinerja secara berjenjang melalui mekanisme dialog kinerja yang terstruktur dan terdokumentasi secara elektronik, sehingga pemantauan capaian kinerja, deteksi masalah di lapangan, dan pengelolaan serta penyempurnaan kinerja dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan
- f. Memastikan laporan kinerja periodik memuat informasi capaian kinerja dan realisasi rencana aksi secara lengkap, sehingga perkembangan kinerja dapat dipantau secara sistematis dan menjadi dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan kemudian menyajikan analisis atas faktor penghambat maupun pendukung ketercapaian kinerja serta langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan di periode berikutnya, sehingga laporan kinerja periodik berfungsi secara optimal sebagai sarana evaluasi dan peningkatan kinerja.
- g. Memastikan agar pelaksanaan dan penyampaian evaluasi internal pada seluruh Perangkat Daerah dilakukan secara rutin dan mutakhir sesuai dengan siklus kinerja tahunan. Evaluasi internal ditahun 2025 pada Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan perlu segera dituntaskan dan disampaikan, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pemantauan perkembangan kinerja, pengendalian pelaksanaan tindak lanjut perbaikan, serta pengambilan keputusan manajerial secara tepat waktu, memperkuat mekanisme pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
- h. Penguatan pengelolaan aset daerah melalui Percepatan penyelesaian audit BPK dan Optimalisasi pemanfaatan aset

- i. Penguatan kelembagaan kerja sama melalui Pembentukan unit kerja sama yang lebih kuat serta Pengelolaan kemitraan strategis secara berkelanjutan.

M. Sasaran 13: Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan

Berdasarkan **Tabel 3.15**, capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 97,36 (98,05%) menunjukkan kinerja baik, namun belum sepenuhnya optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Penilaian IRH mencakup: harmonisasi regulasi, deregulasi/re-regulasi, penyederhanaan regulasi, kompetensi perancang regulasi. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem reformasi hukum sudah berjalan, namun belum sepenuhnya adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis. Dengan kata lain regulasi sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya menjadi enabler percepatan pembangunan.

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 13 Perubahan PK “Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	97,36	98,05	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

- a. Implementasi reformasi regulasi secara sistematis meliputi Pelaksanaan harmonisasi regulasi lintas perangkat daerah dan Review dan penyederhanaan regulasi sehingga berdampak pada meningkatnya konsistensi dan kualitas regulasi daerah
- b. Dukungan kebijakan reformasi hukum nasional melalui Standar penilaian IRH dari Kementerian Hukum yang berdampak pada arah reformasi hukum lebih terukur dan terstandar
- c. Upaya peningkatan kualitas regulasi melalui Penyusunan regulasi berbasis kebutuhan pembangunan yang berdampak pada regulasi mulai mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Faktor Kendala

- a. Keterbatasan SDM perancang regulasi (core issue) masih menjadi kendala utama, ditandai dengan minimnya tenaga fungsional analis hukum dan legal drafter serta kompetensi yang belum merata, sehingga kapasitas kelembagaan fungsi legislasi daerah belum optimal, yang tercermin dari capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,36 (98,05%) yang belum mencapai target.
- b. Belum optimalnya sistem informasi regulasi (JDIH), dimana website JDIH sempat tidak berfungsi akibat gangguan keamanan (hacker), sehingga keterbukaan

- informasi regulasi terganggu dan akses publik terhadap produk hukum menjadi menurun.
- Kapasitas analisis dan evaluasi regulasi masih terbatas, menyebabkan proses harmonisasi, review, dan deregulasi belum optimal, sehingga masih terdapat potensi tumpang tindih regulasi dan kebijakan belum sepenuhnya berbasis bukti.
 - Pengembangan kompetensi ASN bidang hukum belum optimal, ditandai rendahnya partisipasi dalam pelatihan legal drafting dan analisis hukum, sehingga kualitas penyusunan regulasi belum merata dan belum adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.
 - Regulasi belum sepenuhnya adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung percepatan investasi dan pelayanan publik, serta berpotensi menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement/ Regulatory Reform*)

Untuk meningkatkan kualitas regulasi secara signifikan, akan dilakukan melalui:

- Penguatan kelembagaan fungsi regulasi melalui penambahan dan penataan jabatan fungsional analis hukum dan legal drafter serta penguatan unit kerja hukum daerah
- Penguatan kapasitas SDM regulasi melalui pelatihan dan sertifikasi legal drafting dan peningkatan kompetensi analisis regulasi berbasis evidence
- Revitalisasi dan penguatan JDIH melalui pemulihan dan pengamanan sistem JDIH dan digitalisasi dan keterbukaan akses regulasi
- Penguatan reformasi regulasi berbasis kebutuhan pembangunan melalui deregulasi dan simplifikasi regulasi yang menghambat investasi dan penyusunan regulasi berbasis outcome
- Penguatan sistem evaluasi regulasi melalui review berkala terhadap regulasi daerah dan identifikasi regulasi yang tidak efektif
- Integrasi regulasi dengan agenda pembangunan melalui sinkronisasi regulasi dengan RPJMD dan kebijakan strategis serta regulasi sebagai instrumen percepatan pembangunan

N. Sasaran 14: Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima

Berdasarkan **Tabel 3.16**, indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) terealisasi sebesar 81 (101,25%), melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas ASN Kota Tangerang Selatan telah berada pada kategori profesional dan kompeten.

Namun demikian, terdapat dua indikator yang tidak dapat diukur pada tahun 2025, yaitu: Indeks Sistem Merit dan Indeks BerAKHLAK akibat perubahan kebijakan nasional (UU No. 20 Tahun 2023 dan transisi sistem budaya kerja ASN) sehingga berimplikasi kepada capaian profesionalitas ASN baik secara hasil (IP ASN). Namun sistem pengukuran belum sepenuhnya komprehensif akibat transisi indikator nasional. Dengan kata lain kinerja

ASN sudah baik, tetapi sistem manajemen talenta dan budaya kerja belum sepenuhnya terukur secara utuh.

Tabel 3.16. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 14 Perubahan PK “Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif	Keterangan
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit*	Indeks	330	N/A		Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah dibubarkan sehingga penilaian Indeks Sistem Merit tidak lagi dilakukan.
		Indeks BerAKHLAK*	Indeks	80,5	N/A		Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	Indeks BerAKHLAK tidak lagi diberlakukan sejak tahun 2025 dan saat ini menunggu penetapan Peraturan Menteri terkait Budaya Kerja BerAKHLAK sebagai pengganti mekanisme pengukuran sebelumnya.
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	81	101,25	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target	

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

- Penguatan manajemen ASN berbasis kompetensi melalui Penataan SDM sesuai kualifikasi dan jabatan serta Pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berdampak pada meningkatnya kesesuaian kompetensi ASN dengan kebutuhan organisasi
- Dukungan kepemimpinan dan tata kelola SDM melalui Komitmen pimpinan dalam pengembangan ASN dan Koordinasi lintas perangkat daerah berjalan baik sehingga berdampak pada implementasi kebijakan pengembangan ASN lebih konsisten
- Dukungan anggaran dan perencanaan SDM melalui Program pengembangan kompetensi berjalan optimal yang berdampak pada peningkatan kapasitas ASN secara sistematis.

Faktor Kendala

- Ketiadaan indikator kunci (measurement gap) seperti Indeks Sistem Merit dan Indeks BerAKHLAK tidak lagi diukur sehingga tidak tersedia ukuran komprehensif untuk sistem merit dan budaya kerja ASN, hal ini menjadi risiko akuntabilitas kinerja SDM
- Manajemen talenta belum sepenuhnya optimal seperti belum seluruh ASN berbasis talent pool serta promosi dan rotasi belum sepenuhnya berbasis kinerja dan kompetensi sehingga berdampak pada potensi mismatch jabatan dan kompetensi
- Kesenjangan kompetensi ASN yaitu tidak semua ASN memiliki kompetensi sesuai tuntutan digital dan pelayanan publik modern yang berdampak pada kualitas layanan belum merata
- Budaya kinerja belum sepenuhnya kuat seperti orientasi outcome belum merata di seluruh perangkat daerah yang berdampak pada kinerja ASN masih cenderung administratif, belum sepenuhnya berbasis hasil.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement ASN Reform*)

Untuk meningkatkan profesionalisme ASN secara berkelanjutan dan berdampak pada kualitas layanan publik, akan dilakukan melalui:

- Penguatan sistem merit berbasis manajemen talenta melalui Implementasi talent pool dan talent mapping dan Promosi dan mutasi berbasis kompetensi dan kinerja
- Pengembangan sistem pengukuran kinerja ASN yang adaptif melalui penyusunan indikator pengganti pasca penghapusan: Indeks Sistem Merit dan Indeks BerAKHLAK serta Integrasi dengan sistem kinerja berbasis outcome
- Penguatan kompetensi ASN berbasis kebutuhan masa depan melalui Digital skill, pelayanan publik dan analisis kebijakan
- Penguatan budaya kinerja (performance culture) melalui Penguatan orientasi hasil (*outcome-based performance*) dan Integrasi kinerja individu dengan kinerja organisasi
- Integrasi pengembangan ASN dengan reformasi birokrasi yaitu ASN sebagai penggerak utama peningkatan kualitas layanan publik dan Penguatan peran ASN dalam inovasi dan transformasi digital.

O. Sasaran 15: Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan **Tabel 3.17**, capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 74,52 (96,78%) berada pada kategori baik, namun belum mencapai target yang ditetapkan. Secara substantif, nilai persepsi integritas mencapai 81,38 (kategori terjaga), namun mengalami koreksi sebesar 6,86 poin, sehingga skor akhir menjadi 74,52.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara persepsi dan sistem, integritas penyelenggaraan pemerintahan relatif telah terbentuk dengan baik. Namun demikian, adanya faktor koreksi akibat risiko aktual menunjukkan masih terdapat kerentanan yang mempengaruhi kredibilitas kinerja integritas.

Dengan demikian, integritas telah berkembang secara sistemik, tetapi belum sepenuhnya memiliki ketahanan terhadap risiko penyimpangan (integrity resilience masih perlu diperkuat).

Tabel 3.17. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 15 Perubahan PK “Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77	74,52	96,78	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

- Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, ditunjukkan dengan keberhasilan mempertahankan Opini WTP dari BPK, yang mencerminkan sistem pengelolaan keuangan telah berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
- Penguatan pengendalian gratifikasi, dengan capaian nilai 98 (sangat baik), yang menunjukkan efektivitas sistem pencegahan konflik kepentingan serta mulai terbentuknya budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Pelaksanaan SPI sebagai instrumen evaluasi integritas, melalui pengukuran berbasis persepsi internal, eksternal, dan pengguna layanan, yang memberikan baseline kondisi integritas organisasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Faktor Kendala

- Adanya kasus hukum strategis (*high impact risk*) pada sektor pengelolaan persampahan, yang berdampak pada koreksi nilai SPI sebesar 6,86 poin serta penurunan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa satu kasus signifikan dapat berdampak besar terhadap kinerja integritas secara keseluruhan.
- Kesenjangan antara persepsi dan realitas integritas, dimana nilai persepsi relatif tinggi (81,38), namun terkoreksi oleh fakta empiris, yang mengindikasikan bahwa sistem belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan.
- Pengendalian internal belum optimal pada sektor berisiko tinggi, khususnya pada pengadaan, pelayanan publik strategis, dan pengelolaan lingkungan, sehingga potensi terjadinya fraud masih terbuka.
- Budaya integritas belum merata, dimana internalisasi nilai integritas belum menjangkau seluruh perangkat daerah, yang berdampak pada inkonsistensi perilaku ASN dalam penerapan prinsip integritas.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement / Integrity Strengthening*)

Untuk memperkuat integritas secara sistemik dan berkelanjutan, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Penguatan manajemen risiko korupsi (risk-based approach) melalui identifikasi sektor rawan dan mitigasi risiko secara terstruktur.
- Penguatan peran APIP sebagai strategic assurance, melalui audit berbasis risiko dan pengembangan early warning system terhadap potensi penyimpangan.

- c. Penguatan sistem pengendalian internal (SPIP) melalui integrasi pengendalian dalam proses bisnis serta peningkatan pengawasan pada sektor kritis.
- d. Optimalisasi Whistleblowing System (WBS) dan pengaduan publik, dengan memastikan akses yang mudah, aman, serta tindak lanjut yang cepat dan transparan.
- e. Penguatan budaya integritas ASN, melalui internalisasi nilai anti korupsi dan integrasi dengan sistem manajemen kinerja.
- f. Replikasi praktik baik pengendalian gratifikasi, melalui penguatan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan perluasan implementasi ke seluruh perangkat daerah.

P. Sasaran 16: Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah

Berdasarkan **Tabel 3.18**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik namun belum sepenuhnya konsisten secara sistemik. Indeks Inovasi Daerah mencapai 60,76 (116,85%) dan Indeks Kapabilitas Inovasi sebesar 3,98 (120,97%), yang menunjukkan bahwa ekosistem inovasi daerah berkembang sangat baik dan melampaui target. Namun demikian, indikator persentase kebijakan berbasis bukti hanya mencapai 39,64% (79,28%), sehingga berada pada kategori *perlu intervensi*.

Capaian ini menunjukkan adanya gap antara output inovasi (tinggi) dan pemanfaatannya dalam proses kebijakan (rendah), sehingga inovasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem pengambilan keputusan.

Kinerja inovasi daerah yang melampaui target mengindikasikan bahwa budaya inovasi di perangkat daerah sudah berkembang dan kapasitas institusional dalam menghasilkan inovasi relatif kuat. Namun, rendahnya kebijakan berbasis bukti menunjukkan bahwa inovasi masih berhenti pada level *inisiatif dan program*, belum menjadi *basis pengambilan kebijakan* serta proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya berbasis data dan evidence.

Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 16 Perubahan PK “Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
16	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	52	60,76	116,85	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,98	120,97	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Persentase kebijakan berbasis bukti	%	50	39,64	79,28	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

- a. Penguatan ekosistem inovasi daerah, ditandai dengan meningkatnya jumlah inovasi dan partisipasi perangkat daerah sehingga mendorong capaian Indeks Inovasi dan Kapabilitas Inovasi melampaui target
- b. Dukungan kebijakan dan kelembagaan inovasi, termasuk fasilitasi kompetisi inovasi dan kolaborasi lintas sektor, sehingga mempercepat difusi inovasi di lingkungan pemerintahan
- c. Peningkatan kapasitas inovasi aparatur, khususnya dalam pengembangan solusi berbasis pelayanan publik yang berdampak pada inovasi menjadi instrumen peningkatan kualitas layanan.

Faktor Kendala

- a. Kebijakan belum berbasis bukti secara sistemik, ditandai dengan rendahnya pemanfaatan data dan hasil kajian dalam pengambilan keputusan, sehingga kualitas kebijakan belum optimal dan kurang presisi
- b. Keterbatasan integrasi dan kualitas data sektoral, sehingga belum tersedia *single source of truth* sebagai dasar kebijakan sehingga kebijakan masih parsial dan sektoral
- c. Pemanfaatan hasil riset dan kajian belum optimal, sehingga inovasi dan kajian belum menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada inovasi tidak bertransformasi menjadi kebijakan strategis
- d. Kapasitas SDM dalam analisis kebijakan berbasis data masih terbatas sehingga proses *evidence-based policy* belum berjalan optimal
- e. Pemanfaatan sistem informasi belum terintegrasi, khususnya dalam mendukung *data-driven decision making*, sehingga pengambilan keputusan belum berbasis sistem.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Untuk meningkatkan kualitas kinerja secara sistemik, akan dilakukan transformasi sebagai berikut:

- a. Transformasi menuju *evidence-based policy*, dengan menjadikan data dan kajian sebagai dasar utama pengambilan keputusan
- b. Penguatan tata kelola data (*data governance*), melalui integrasi data sektoral dan pengembangan *single data system*
- c. Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi, agar terhubung langsung dengan proses perencanaan dan penganggaran
- d. Peningkatan kapasitas SDM dalam analisis kebijakan, khususnya data *analytics* dan *policy analysis*
- e. Pengembangan sistem digital pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mendorong kebijakan berbasis data
- f. Penguatan kolaborasi dengan BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga riset, guna meningkatkan kualitas *evidence*.

capaian Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) sebesar 3,9% (75,90%) yang belum mencapai target.

- d. Intervensi ketahanan pangan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi hulu-hilir, sehingga program belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kerawanan pangan secara struktural.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Ke depan, kebijakan ketahanan pangan akan difokuskan pada transformasi dari stabilisasi pasokan menuju penguatan akses dan kualitas konsumsi, agar mampu menurunkan ketidakcukupan pangan melalui:

- a. Penguatan intervensi keterjangkauan pangan, melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih tepat sasaran berbasis data
- b. Penguatan pendekatan berbasis komunitas, melalui perluasan urban farming dan ketahanan pangan lokal
- c. Edukasi konsumsi pangan B2SA secara masif, melibatkan sekolah, tokoh agama, dan masyarakat yang difokuskan pada perubahan perilaku konsumsi
- d. Integrasi program ketahanan pangan dengan penanggulangan kemiskinan, khususnya pada kelompok rentan
- e. Penguatan sistem data kerentanan pangan, untuk meningkatkan ketepatan sasaran intervensi

R. Sasaran 18: Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat

Berdasarkan **Tabel 3.20**, capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 63,83 (99,01%) berada pada kategori *baik (mendekati target)*. Capaian ini menunjukkan bahwa risiko bencana relatif terkendali, namun ketangguhan sistem penanggulangan bencana belum sepenuhnya optimal, sehingga masih terdapat potensi kerentanan pada kondisi ekstrem.

Capaian yang mendekati target mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko (risk reduction) telah berjalan cukup efektif dan intervensi pada aspek infrastruktur dan penanganan dampak mulai menunjukkan hasil. Namun demikian Nilai IRB masih dipengaruhi oleh tingkat kerentanan (V) dan kapasitas daerah (C) yang belum optimal serta penurunan risiko belum sepenuhnya berbasis ketangguhan sistem (resilience-based approach).

Tabel 3.20. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 18 Perubahan PK “Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,2	63,83	99,01	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

	ketangguhan masyarakat							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

- Penguatan infrastruktur mitigasi bencana, melalui pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 207,36 km dan pemeliharaan drainase sepanjang 75,40 km sehingga berdampak pada menurunkan potensi genangan dan risiko bencana hidrometeorologi
- Penanganan dampak bencana secara langsung, termasuk rehabilitasi 26 unit rumah terdampak sehingga dapat mengurangi kerentanan pascabencana
- Perbaikan komponen indeks risiko bencana (H, V, C) yang berdampak pada stabilisasi tingkat risiko secara umum

Faktor Kendala

- Kapasitas ketahanan daerah belum optimal (Indeks Ketahanan 0,63) sehingga kemampuan menghadapi dan pulih dari bencana masih terbatas.
- Kesiapsiagaan masyarakat dan sistem belum merata mengakibatkan respons awal bencana belum cepat dan efektif.
- Pendekatan masih dominan pada penanganan dampak, belum pada mitigasi berbasis risiko sehingga potensi risiko berulang belum tertangani secara struktural
- Sistem pemulihan pascabencana belum terintegrasi sehingga proses recovery belum memperkuat ketahanan jangka panjang.

Arah Perbaikan (Strategic Improvement)

Ke depan, pengelolaan risiko bencana akan dilakukan melalui penguatan ketangguhan sistem, sehingga tidak hanya menurunkan risiko, tetapi juga meningkatkan kemampuan daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana secara berkelanjutan, melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- Transformasi pendekatan dari *response-based* ke *resilience-based disaster management*
- Penguatan kapasitas ketahanan daerah, melalui peningkatan kesiapsiagaan berbasis komunitas dan penguatan kelurahan tangguh bencana
- Penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang terintegrasi
- Integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur
- Penguatan manajemen pemulihan pascabencana
- Peningkatan literasi kebencanaan masyarakat, melalui edukasi dan simulasi rutin
- Penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BPBD, DCKTR, DSDABMBK, DLH dan komunitas.

S. Sasaran 19: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni

Berdasarkan **Tabel 3.21**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan ketimpangan antar indikator. Indikator kualitas udara (IKU 174,41%) dan tutupan lahan (IKTL 103,32%) sangat baik, sementara kualitas air (IKA 96,28%) belum optimal dan pengolahan sampah (60,27%) masih memerlukan intervensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian udara dan tata ruang relatif berhasil, namun pengelolaan air dan sampah masih menjadi kelemahan struktural.

Tingginya IKU dan IKTL mencerminkan efektivitas pengendalian berbasis tata ruang, namun belum tercapainya IKA menandakan masih tingginya pencemaran domestik. Di sisi lain, meskipun layanan pengangkutan sampah telah mencapai 100%, tingkat pengolahan masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara layanan (coverage tinggi) dan outcome lingkungan (pengolahan rendah), khususnya pada sektor persampahan, sehingga tantangan utama terletak pada penguatan sistem pengolahan, bukan sekadar perluasan layanan.

Tabel 3.21. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 19 Perubahan PK “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71	68,36	96,28	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	34,93	60,92	174,41	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,73	34,85	103,32	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97	58,46	60,27	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	70	100	142,86	Sangat Baik	Target tercapai atau melampaui target

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

Capaian kinerja pada sasaran ini didorong oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- Pengendalian kualitas udara yang efektif, melalui uji emisi kendaraan bermotor dan pengawasan emisi kegiatan usaha, yang berdampak pada penurunan konsentrasi polutan secara signifikan.
- Karakteristik struktur ekonomi berbasis jasa (low emission), yang menyebabkan beban pencemar relatif lebih rendah dibandingkan daerah berbasis industri.
- Peningkatan ruang terbuka hijau dan vegetasi perkotaan, yang berkontribusi terhadap peningkatan daya serap polutan serta perbaikan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
- Faktor meteorologis yang mendukung, seperti curah hujan yang tinggi dan dispersi angin, yang membantu menurunkan konsentrasi polutan di udara.
- Pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten, sehingga menjaga kualitas tutupan lahan dan mencegah degradasi lingkungan.
- Cakupan layanan pengangkutan sampah yang telah mencapai 100%, sehingga seluruh timbulan sampah dapat terlayani dari sumbernya.

Faktor Kendala

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup baik pada beberapa indikator, masih terdapat kendala struktural yang mempengaruhi optimalisasi kualitas lingkungan hidup, yaitu:

- Pencemaran air yang didominasi limbah domestik, sehingga kualitas air belum optimal meskipun mendekati target.
- Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah, yang menyebabkan beban pencemar belum tertangani secara sistemik.
- Krisis kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) (overcapacity), yang membatasi kemampuan pengolahan sampah secara optimal.
- Pemilahan sampah dari sumber yang belum optimal, sehingga menurunkan efisiensi proses pengolahan.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yang berdampak pada tingginya volume sampah residu.
- Pendekatan pengelolaan sampah yang masih bersifat downstream (end-of-pipe), sehingga belum mampu menekan timbulan sampah dari hulu.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Sebagai upaya perbaikan ke depan, pemerintah kota Tangerang Selatan telah menyusun Rencana Tindak Percepatan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang Selatan diantaranya:

- Pengolahan Mandiri dan Rumah Tangga: Pemkot menggerakkan pembuatan 10.000-20.000 lubang biopori, penguatan bank sampah, dan pemilahan sampah organik/anorganik dari sumbernya.
- Optimalisasi Teknologi: Penerapan hydrodrive incinerator di Pondok Aren yang mampu mengolah 60 ton sampah per hari.

- c. Infrastruktur dan Pengangkutan: Penataan Landfill 3 TPA Cipeucang dengan sistem terasering, pembangunan beronjong, serta penggunaan jasa transporter pihak ketiga untuk pengangkutan sampah.
- d. Kerja Sama Antar Daerah: Pembuangan sebagian sampah ke TPA Cilowong, Kota Serang, dengan kapasitas 400-500 ton per hari.
- e. Penegakan Aturan: Pengawasan ketat oleh Satpol PP terhadap pelaku pembuangan liar dan kewajiban pengolahan sampah mandiri bagi pengelola kawasan komersial

Beberapa rencana aksi yang sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan saat ini antara lain:

- a. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Reduse, Reuse, Recycle (PHBS-3R) dalam rangka mengurangi timbunan sampah. Mengurangi penggunaan plastik / kemasan yang sulit terurai dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan di Lingkungan Kantor OPD
- b. Membentuk Bank Sampah Unit / Menunjuk P3SK di Kantor OPD
- c. Gerakan Pilah Sampah / Bank Sampah (Anorganik Daur Ulang)
- d. Pembentukan dan Penunjukan Pengelola TPS3R-Mini Kantor / Kawasan Kantor / Perdagangan
- e. Pembuatan Sarana Pengolahan Sampah Organik / Budidaya Magot / Komposting oleh Kantor / Kawasan Kantor / Perdagangan
- f. Melakukan Pengolahan Sampah Organik / Budidaya Magot / Komposting oleh Pengelola TPS3R-Mini Kantor / Kawasan Kantor / Perdagangan
- g. Melakukan Pemilahan Sampah Anorganik Non-Daur Ulang dan Residu oleh Pengelola TPS3R-Mini Kantor / Kawasan Kantor / Perdagangan
- h. Melaksanakan Monitoring dan Rapat Evaluasi Efektifitas Pengelolaan dan Pemilahan Sampah OPD
- i. Menyusun Laporan Mingguan dan Bulanan Percepatan Pengelolaan Sampah OPD Kepada Wali Kota melalui Sekretariat Tim.

T. Sasaran 20: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan

Berdasarkan **Tabel 3.22**, capaian kinerja pada sasaran ini secara umum berada pada kategori *baik*, namun menunjukkan ketimpangan yang signifikan antar indikator. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) mencapai 8,09 (97,47%), yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur relatif positif. Hal ini didukung oleh capaian per dimensi IKLI, antara lain: jalan dan jembatan (7,97), transportasi darat (7,29), air bersih (9,51), perumahan (8,30), dan ruang publik (7,39), yang seluruhnya berada pada kategori baik hingga sangat baik.

Namun demikian, capaian indikator teknis menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan. Akses air minum perpipaan baru mencapai 20,50%, atau sekitar 294.736 rumah tangga dari total 1.433.470 rumah tangga, yang menunjukkan masih terbatasnya jangkauan layanan SPAM dan tingginya ketergantungan masyarakat pada sumber air alternatif seperti sumur bor.

Di sisi lain, capaian rumah tangga dengan hunian layak mencapai 99,55% (sekitar 466.767 rumah tangga), yang menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan hunian dari sisi fisik. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan aspek keterjangkauan dan keberlanjutan hunian.

Permasalahan paling krusial terlihat pada indikator akses sanitasi aman yang hanya mencapai 1,75%, atau sekitar 25.125 rumah tangga dari total 1.433.470 rumah tangga, jauh di bawah target 16%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan air limbah domestik belum berjalan optimal dan masih menjadi titik lemah utama dalam layanan infrastruktur perkotaan.

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 20 Perubahan PK “Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,3	8,09	97,47	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	20,50	97,62	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,74	99,55	99,81	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16	1,75	10,94	Perlu Intervensi	Memerlukan perhatian dan intervensi khusus

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

Capaian kinerja pada sasaran ini didorong oleh intervensi pembangunan infrastruktur permukiman yang cukup terarah, antara lain:

- Peningkatan kualitas hunian melalui program bedah rumah (388 unit) dan penataan kawasan kumuh seluas 11,37 Ha, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat serta penurunan kawasan tidak layak huni.
- Pengembangan kawasan berbasis tematik pada 5 lokasi, yang mendorong peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus memperkuat fungsi kawasan sebagai ruang hidup yang lebih tertata, produktif, dan berdaya tarik.
- Penyediaan sarana sanitasi dasar secara bertahap, melalui pembangunan 50 tangki septik dan 6 unit MCK komunal, yang berkontribusi terhadap peningkatan akses sanitasi, meskipun masih dalam skala terbatas.

Faktor Kendala

Meskipun capaian kinerja secara umum berada pada kategori baik, masih terdapat sejumlah kendala struktural yang mempengaruhi kualitas dan keberlanjutan layanan infrastruktur, yaitu:

- a. Ketimpangan kualitas layanan infrastruktur antar wilayah, yang tercermin dari penurunan nilai IKLI di 4 dari 7 kecamatan, yaitu Serpong (-1,51 poin), Setu (-1,50 poin), Pamulang (-0,49 poin), dan Ciputat Timur (-0,03 poin), kondisi ini menunjukkan belum meratanya kualitas layanan, khususnya pada infrastruktur jalan dan transportasi yang mengalami penurunan kinerja.
- b. Keterbatasan jangkauan layanan air minum perpipaan, dimana akses baru mencapai 20,50% (294.736 dari 1.433.470 rumah tangga). Kondisi ini dipengaruhi oleh kepadatan permukiman, keterbatasan lahan fasum untuk jaringan, kebiasaan penggunaan sumur bor, serta jaringan PDAM yang belum menjangkau seluruh wilayah.
sehingga akses terhadap air minum aman belum optimal dan berkelanjutan.
- c. Keterbatasan akses hunian terjangkau, akibat tingginya harga lahan dan masih rendahnya partisipasi swasta dalam penyediaan hunian berimbang, meskipun capaian hunian layak tinggi (99,55% atau ± 466.767 rumah tangga), aspek keterjangkauan masih menjadi isu utama.
- d. Krisis sanitasi perkotaan (critical issue), ditandai dengan sangat rendahnya akses sanitasi aman yaitu hanya 1,75% (25.125 dari 1.433.470 rumah tangga). Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan untuk septic tank individu, minimnya fasilitas komunal, serta belum tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sehingga layanan sanitasi belum memenuhi standar keamanan lingkungan dan kesehatan.
- e. Kapasitas pemeliharaan dan respons layanan yang belum optimal, termasuk belum maksimalnya penanganan pengaduan masyarakat serta keterbatasan pemeliharaan infrastruktur, sehingga berkontribusi pada penurunan kepuasan masyarakat dan memperlebar kesenjangan kualitas layanan antar wilayah.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Ke depan, pembangunan infrastruktur perlu bergeser dari penyediaan fisik menuju layanan yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada penyelesaian isu sanitasi sebagai titik kritis pembangunan perkotaan, melalui:

- a. Transformasi layanan sanitasi sebagai prioritas utama, melalui Pembangunan IPLT dan Pengembangan SPALD dan MCK komunal
- b. Perluasan layanan air minum perpipaan, melalui pembangunan SPAM dan pengurangan ketergantungan air tanah
- c. Pengembangan hunian vertikal (rusunawa/MBR) untuk menjawab keterbatasan lahan
- d. Penguatan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah (spatial targeting)
- e. Optimalisasi sistem pengaduan berbasis digital, untuk meningkatkan responsivitas layanan
- f. Penguatan kolaborasi dengan swasta dan antar daerah, khususnya dalam pengelolaan air limbah.

U. Sasaran 21: Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila

Berdasarkan **Tabel 3.23**, capaian kinerja pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang relatif moderat dengan kecenderungan belum optimal pada sebagian besar indikator. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mencapai 76,15 (98,26%) dan Indeks Rasa Aman 67,99 (92,25%), yang berada pada kategori baik. Namun, indikator lainnya masih berada pada kategori cukup, yaitu Indeks Harmoni 6,5 (87,84%), Indeks Pembangunan Kebudayaan 47,07 (88,64%), dan Indeks Demokrasi 76,87 (88,87%).

Capaian ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial relatif terjaga, namun kualitas kohesi sosial, partisipasi demokrasi, dan penguatan nilai budaya belum berkembang secara optimal.

Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Atas Sasaran 21 Perubahan PK “Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila” Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kategori	Makna Evaluatif
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,4	6,5	87,84	Cukup	Perlu optimalisasi kinerja
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,1	47,07	88,64	Cukup	Perlu optimalisasi kinerja
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	76,15	98,26	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi
		Indeks Demokrasi	Indeks	86,5	76,87	88,87	Cukup	Perlu optimalisasi kinerja
		Indeks Rasa Aman	Angka	73,7	67,99	92,25	Baik	Mendekati target, masih dalam batas toleransi

Sumber: Walidata Pengampu Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan, 2026

Faktor Keberhasilan

Capaian kinerja pada sasaran ini didukung oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap terjaganya stabilitas sosial masyarakat, yaitu:

- Terjaganya kerukunan antar umat beragama, yang tercermin dari capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebesar 76,15 (98,26% dari target), menunjukkan tingkat toleransi dan hubungan antar kelompok yang relatif harmonis, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial dan meminimalkan potensi konflik horizontal.
- Kondisi keamanan wilayah yang relatif terkendali, ditunjukkan oleh capaian Indeks Rasa Aman sebesar 67,99 (92,25% dari target), menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung keberlangsungan kehidupan bermasyarakat yang tertib.

- c. Eksistensi dan peran kelembagaan sosial dan budaya, baik formal maupun berbasis masyarakat (komunitas, organisasi kemasyarakatan, serta forum keagamaan), menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal, serta menjadi instrumen penguatan kohesi sosial di tengah dinamika masyarakat perkotaan.

Faktor Kendala

Meskipun stabilitas sosial relatif terjaga, masih terdapat sejumlah kendala mendasar yang mempengaruhi kualitas kohesi sosial dan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Rendahnya partisipasi sosial masyarakat, yang tercermin dari Indeks Harmoni sebesar 6,5 (87,84%), menunjukkan bahwa keterikatan sosial antar warga belum kuat dan interaksi sosial masih terbatas.
- b. Munculnya eksklusivisme sosial dan keagamaan, yang membatasi interaksi lintas kelompok serta berpotensi menurunkan kohesi sosial dan semangat inklusivitas dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Rendahnya partisipasi demokrasi masyarakat, yang menyebabkan Indeks Demokrasi belum optimal (76,87 / 88,87%), dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat perkotaan (komuter) sehingga keterlibatan dalam proses pembangunan daerah relatif rendah.
- d. Belum optimalnya penguatan nilai budaya lokal, tercermin dari Indeks Pembangunan Kebudayaan yang masih rendah (47,07 / 88,64%), menunjukkan bahwa internalisasi dan aktualisasi nilai budaya dalam kehidupan masyarakat belum maksimal.
- e. Faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi rasa aman, seperti tingkat pengangguran, dinamika perubahan sosial yang cepat, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) sehingga menahan peningkatan Indeks Rasa Aman dan menunjukkan bahwa keamanan belum sepenuhnya berbasis partisipasi masyarakat.

Arah Perbaikan (*Strategic Improvement*)

Ke depan, pembangunan sosial akan diarahkan pada penguatan kohesi dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang tidak hanya aman dan rukun, tetapi juga inklusif, partisipatif, dan berdaya secara sosial, melalui upaya:

- a. Penguatan kohesi sosial berbasis komunitas, melalui peningkatan partisipasi kegiatan sosial dan inklusivitas antar kelompok
- b. Peningkatan partisipasi demokrasi, melalui transparansi dan digitalisasi partisipasi publik (misalnya pemanfaatan aplikasi pelaporan dan forum warga)
- c. Penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama, untuk menekan eksklusivisme sosial
- d. Revitalisasi pembangunan kebudayaan, melalui penguatan aktivitas budaya lokal dan ruang ekspresi masyarakat
- e. Penguatan keamanan berbasis masyarakat, melalui optimalisasi siskamling, Satlinmas, dan koordinasi lintas sektor
- f. Integrasi pendekatan sosial-ekonomi, khususnya penanganan pengangguran dan pemberdayaan masyarakat

3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Untuk memperoleh gambaran kinerja yang lebih komprehensif, dilakukan analisis perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk menilai tren kinerja, konsistensi pencapaian sasaran strategis, serta efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi pola peningkatan, stagnasi, maupun penurunan kinerja pada masing-masing indikator, sehingga menjadi dasar evaluasi dalam merumuskan strategi perbaikan dan penguatan kinerja pembangunan daerah ke depan.

Hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja Tahun 2024 pada masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.24. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Selisih	Kategori	Makna Evaluatif
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11,86	12,10	2,02	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,7	14,71	0,07	Stabil	Perlu akselerasi
		Kemampuan Literasi SD	Skor	67,17	83,18	23,84	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Kemampuan Literasi SMP	Skor	81,28	90,60	11,47	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Kemampuan Numerasi SD	Skor	57,3	79,09	38,03	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor	69,61	86,76	24,64	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,8	76,09	0,38	Stabil	Perlu akselerasi
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	2,36	2,39	-0,03	Stabil	Perlu akselerasi
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/A	58,91	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,65	70,80	7,84	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	N/A	-		
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73	73,00	0,00	Stabil	Perlu akselerasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Selisih	Kategori	Makna Evaluatif
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,86	56,07	0,38	Stabil	Perlu akselerasi
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	87,99	56,09	-36,25	Menurun Signifikan	Perlu intervensi prioritas
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,53	74,90	7,72	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,04	3,09	1,64	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	11,19	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	51,38	54,97	6,99	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,99	2,21	11,06	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	121,42	118,63	-2,30	Menurun	Perlu evaluasi
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	58,13	60,42	3,94	Meningkat	Perbaikan kinerja
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,34	43,93	1,36	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,48	12,45	46,82	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,62	8,71	Meningkat	Perbaikan kinerja
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,82	52,58	5,54	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	65,45	64,00	-2,22	Menurun	Perlu evaluasi
12		Nilai SAKIP	Nilai	69,06	69,42	0,52	Stabil	Perlu akselerasi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Selisih	Kategori	Makna Evaluatif
	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	4	5,00	25,00	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,87	2,41	28,88	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	N/A	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,16	97,36	-1,82	Menurun	Perlu evaluasi
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	N/A	N/A		
		Indeks BerAKHLAK	Indeks	79,75	N/A	N/A		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79	81,00	2,53	Meningkat	Perbaikan kinerja
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	76,25	74,52	-2,27	Menurun	Perlu evaluasi
16	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	50,45	60,76	20,44	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,98	20,97	Meningkat Signifikan	Efektivitas kebijakan tinggi
		Persentase kebijakan berbasis bukti	%	N/A	39,64	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
17	S1. Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	%	3,13	3,90	-0,77	Stabil	Perlu akselerasi
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	68,1	63,83	4,27	Meningkat	Perbaikan kinerja
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64	68,36	6,81	Meningkat	Perbaikan kinerja
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	71,59	60,92	-14,90	Menurun Signifikan	Perlu intervensi prioritas

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Selisih	Kategori	Makna Evaluatif
	berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	36,38	34,85	-4,21	Menurun	Perlu evaluasi
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	96,83	58,46	-39,63	Menurun Signifikan	Perlu intervensi prioritas
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	N/A	100,00	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,29	8,09	-2,41	Menurun	Perlu evaluasi
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	20,50	-2,38	Menurun	Perlu evaluasi
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,73	99,55	-0,18	Stabil	Perlu akselerasi
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	1,75	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,29	6,50	-10,84	Menurun Signifikan	Perlu intervensi prioritas
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	52,6	47,07	-10,51	Menurun Signifikan	Perlu intervensi prioritas
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,39 (2023)	76,15	0,00	Stabil	Perlu akselerasi
		Indeks Demokrasi	Indeks	86,04	76,87	-10,66	Menurun Signifikan	Perlu intervensi prioritas
		Indeks Rasa Aman	Angka	66,97	67,99	0,00	Stabil	Perlu akselerasi

Sumber: Walidata pengangampu urusan dan Analisis LKjIP 2026

Kategori untuk analisis tren:

Selisih (%)
 >=10%
 1% - <10%
 -1% - <1%
 -10% - <-1%
 <-10%

Kategori
 Meningkat Signifikan
 Meningkat
 Stabil
 Menurun
 Menurun Signifikan

Makna Evaluatif

Kinerja meningkat tajam dan menunjukkan efektivitas kebijakan
 Kinerja meningkat namun belum signifikan
 Kinerja relatif stagnan, perlu dorongan peningkatan
 Kinerja menurun dan perlu perhatian
 Penurunan tajam, perlu intervensi prioritas

Berdasarkan **Tabel 3.24**, perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja pembangunan daerah secara umum mengalami peningkatan pada sektor prioritas, terutama pendidikan, investasi, pelayanan publik, dan inovasi, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dalam mendorong capaian outcome strategis.

Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan pada indikator fundamental, dimana masih terjadi penurunan pada aspek kesejahteraan dan kualitas pembangunan, seperti meningkatnya tingkat kemiskinan, menurunnya produktivitas tenaga kerja, serta memburuknya ketahanan pangan.

Selain itu, terdapat penurunan signifikan pada sektor literasi, lingkungan hidup, dan sosial, yang menunjukkan adanya permasalahan struktural yang belum tertangani secara optimal. Di sisi lain, beberapa indikator makro cenderung stagnan, yang mengindikasikan bahwa intervensi yang ada belum mampu mendorong akselerasi kinerja secara signifikan. Kondisi ini menegaskan adanya ketimpangan kinerja antar sektor serta gap antara capaian output yang tinggi dengan outcome pembangunan yang belum merata, sehingga ke depan diperlukan penguatan integrasi kebijakan, peningkatan kualitas intervensi berbasis hasil, serta fokus pada sektor-sektor prioritas yang mengalami penurunan kinerja agar pembangunan daerah menjadi lebih berdampak nyata.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dilakukan untuk menilai tingkat kontribusi capaian kinerja Tahun 2025 terhadap pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui posisi capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis dalam mendukung pencapaian target akhir RPJMD, serta mengidentifikasi indikator yang memerlukan percepatan atau intervensi kebijakan.

Tabel 3.25. Ringkasan Status Pencapaian RPJMD

Kategori Status	Jumlah Indikator	Persentase
Target tercapai/melampaui	15	27,27
Mendekati target	19	34,55
Perlu optimalisasi	8	14,55
Perlu intervensi	10	18,18
data belum dirilis secara resmi	3	5,45
Total Indikator Sasaran Strategis	55	100,00

Berdasarkan progres capaian terhadap target akhir RPJMD 2029, kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan menunjukkan posisi cukup kuat namun belum merata, dimana 61,82% indikator telah berada pada kategori target tercapai/melampaui dan mendekati target, namun masih terdapat 32,73% indikator pada kategori perlu optimalisasi dan intervensi khusus.

Kinerja unggul terutama ditopang oleh sektor pendidikan, pelayanan publik, digitalisasi, investasi, dan kualitas udara yang telah melampaui lintasan target RPJMD, menunjukkan efektivitas intervensi pada sektor berbasis layanan dan tata kelola. Sebaliknya, kinerja lemah

terkonsentrasi pada isu struktural seperti kemiskinan (79,50%), literasi (59,99%), produktivitas tenaga kerja (71,05%), ketahanan pangan/PoU (31,79%), pengelolaan sampah (60,27%), sanitasi aman (5,93%), serta kebijakan berbasis bukti (73,41%) yang mengindikasikan gap antara kinerja makro dan kualitas outcome riil masyarakat.

Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama RPJMD bukan pada ekspansi layanan, melainkan pada transformasi kualitas, integrasi kebijakan, dan penguatan dampak, sehingga diperlukan percepatan intervensi yang lebih terfokus pada sektor-sektor dengan kinerja rendah agar akselerasi pencapaian target RPJMD 2029 dapat lebih merata dan berkelanjutan.

Hasil perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah Tahun 2029 pada masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.26. Progres Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir RPJMD 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2029	Progres terhadap RPJMD (%)	Status	Makna Evaluatif
				Target PK	Realisasi	Capaian PK (%)				
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	12,10	100,50	12,64	95,73	Baik	Mendekati target
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	14,71	97,29	16,04	91,71	Baik	Mendekati target
		Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	83,18	119,39	79,67	104,41	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	90,60	109,98	86,78	104,40	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,2	79,09	131,38	71,8	110,15	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	86,76	122,01	77,11	112,51	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	76,09	99,84	78,15	97,36	Baik	Mendekati target
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	2,39	79,92	1,9	79,50	Kurang	Perlu intervensi khusus
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	58,91	100,00	59,86	98,41	Baik	Mendekati target
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,7	70,80	107,76	67,85	104,35	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	0,176	0,00	0,15	85,23	Cukup	Perlu optimalisasi
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	73,00	99,93	73,25	99,66	Baik	Mendekati target
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	56,07	100,20	56,8	98,71	Baik	Mendekati target
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	56,09	63,39	93,5	59,99	Kurang	Perlu intervensi khusus
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,6	74,90	107,61	69,9	107,15	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	3,09	99,36	3,44	89,83	Cukup	Perlu optimalisasi
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	11,19	96,13	11,93	93,80	Baik	Mendekati target

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2029	Progres terhadap RPJMD (%)	Status	Makna Evaluatif
				Target PK	Realisasi	Capaian PK (%)				
	terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,4	54,97	104,90	54,7	100,49	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,21	102,79	3,65	60,55	Kurang	Perlu intervensi khusus
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96-129,10	118,63	92,71	166,98	71,05	Kurang	Perlu intervensi khusus
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,5	60,42	99,87	62,98	95,94	Baik	Mendekati target
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44	43,93	99,84	46,8	93,87	Baik	Mendekati target
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,7	12,45	143,10	14,6	85,27	Cukup	Perlu optimalisasi
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	4,62	108,71	4,29	107,69	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	49,87	52,58	105,43	50,07	105,01	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	64,00	96,44	69,27	92,39	Baik	Mendekati target
12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	70	69,42	99,17	78	89,00	Cukup	Perlu optimalisasi
		Jumlah kerja sama antara Pemerintah Daerah	angka	5	5,00	100,00	8	62,50	Kurang	Perlu intervensi khusus
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	2,41	125,52	2,17	111,06	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00	WTP	100,00	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2	N/A	-	2,25	-	-	-
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	97,36	98,05	99,46	97,89	Baik	Mendekati target

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2029	Progres terhadap RPJMD (%)	Status	Makna Evaluatif
				Target PK	Realisasi	Capaian PK (%)				
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit	Indeks	330	N/A	-	346	-	-	-
		Indeks BerAKHLAK	Indeks	80,5	N/A	-	82,5	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80	81,00	101,25	84	96,43	Baik	Mendekati target
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77	74,52	96,78	79,5	93,74	Baik	Mendekati target
16	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	52	60,76	116,85	63	96,44	Baik	Mendekati target
		Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	3,98	120,97	3,29	120,97	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Persentase kebijakan berbasis bukti	%	50	39,64	79,28	54	73,41	Kurang	Perlu intervensi khusus
17	S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	2,96	3,90	75,90	1,24	31,79	Kurang	Perlu intervensi khusus
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,2	63,83	99,01	58,27	91,29	Baik	Mendekati target
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71	68,36	96,28	71,8	95,21	Baik	Mendekati target
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	34,93	60,92	174,41	36,93	164,96	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	33,73	34,85	103,32	34,01	102,47	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	97	58,46	60,27	97	60,27	Kurang	Perlu intervensi khusus
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	70	100,00	142,86	70	142,86	Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,3	8,09	97,47	8,36	96,77	Baik	Mendekati target

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD 2029	Progres terhadap RPJMD (%)	Status	Makna Evaluatif
				Target PK	Realisasi	Capaian PK (%)				
	perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	21	20,50	97,62	30	68,33	Kurang	Perlu intervensi khusus
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,74	99,55	99,81	100	99,55	Baik	Mendekati target
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16	1,75	10,94	29,5	5,93	Kurang	Perlu intervensi khusus
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	7,4	6,50	87,84	7,6	85,53	Cukup	Perlu optimalisasi
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,1	47,07	88,64	57,5	81,86	Cukup	Perlu optimalisasi
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	76,15	98,26	79,5	95,79	Baik	Mendekati target
		Indeks Demokrasi	Indeks	86,5	76,87	88,87	88,5	86,86	Cukup	Perlu optimalisasi
		Indeks Rasa Aman	Angka	73,7	67,99	92,25	76,32	89,09	Cukup	Perlu optimalisasi

Sumber: Walidata pengangampan dan Analisis LKjIP 2026

Capaian (%)	Kategori	Makna Evaluatif
≥100%	● Sangat Baik	Target tercapai/melampaui
90–<100%	● Baik	Mendekati target
80–<90%	● Cukup	Perlu optimalisasi
<80%	● Kurang	Perlu intervensi

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Berdasarkan hasil perbandingan capaian indikator kinerja antara Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan nasional, sebagaimana terlihat dalam **Tabel 3.27** secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan capaian yang relatif kompetitif, terutama pada indikator pembangunan manusia, pelayanan publik, dan inovasi daerah. Secara garis besar, indikator kinerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu indikator yang lebih baik dari rata-rata provinsi dan nasional, indikator yang relatif sebanding, serta indikator yang masih berada di bawah capaian provinsi maupun nasional.

Indikator yang menunjukkan kinerja lebih baik antara lain rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, tingkat kemiskinan, rasio kewirausahaan daerah, nilai investasi, serta beberapa indikator tata kelola seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Profesionalitas ASN. Sementara itu, indikator yang relatif sebanding meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja, pembentukan modal tetap bruto, indeks reformasi hukum, nilai SPI, serta beberapa indikator kualitas lingkungan hidup seperti indeks kualitas air dan udara.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, terutama terkait produktivitas tenaga kerja, literasi masyarakat, serta pengelolaan lingkungan perkotaan seperti pengelolaan sampah dan kualitas tutupan lahan. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan Kota Tangerang Selatan telah berjalan baik, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan dan program pada sektor-sektor yang masih memiliki capaian relatif rendah guna meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 3.27. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Daerah dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi Tangsel 2025	Realisasi Provinsi Banten 2025	Realisasi Nasional 2025	Gap Realisasi dengan		Sumber Data Realisasi Provinsi & Nasional
							Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=5-7	8
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,10	9,82	9,07	2,28	3,03	BPS – Statistik Pendidikan (Badan Pusat Statistik Indonesia)
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,71	13,28	13,3	1,43	1,41	BPS – Statistik Pendidikan
		Kemampuan Literasi SD	Skor	83,18	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kemendikbud – Asesmen Nasional
		Kemampuan Literasi SMP	Skor	90,60	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kemendikbud – Asesmen Nasional
		Kemampuan Numerasi SD	Skor	79,09	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kemendikbud – Asesmen Nasional
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor	86,76	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kemendikbud – Asesmen Nasional
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,09	75,33	74,39	0,76	1,7	BPS – Indikator Kesehatan (bantenprov.go.id)
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	2,39	5,63	9,03	3,24	6,64	BPS – Profil Kemiskinan (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten)
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	55,4	56,1	3,51	2,81	Kemensos
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	70,80	63,75	61,8	7,05	9	BKKBN
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,18	0,442	0,447	0,266	0,271	BPS – Gender Statistics
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73	72,3	74	0,7	-1	KemenPPPA
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	56,07	56,85	57,67	-0,78	-1,6	Kemenpora
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	56,09	63,3	66,77	-7,21	-10,68	Perpusnas
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	74,90	63,4	54,2	11,5	20,7	BPS – PDRB
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,09	2,8	2,96	0,29	0,13	BPS – PDRB
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,19	7,4	7,8			Kemenparekraf

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi Tangsel 2025	Realisasi Provinsi Banten 2025	Realisasi Nasional 2025	Gap Realisasi dengan		Sumber Data Realisasi Provinsi & Nasional
							Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=5-7	8
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	54,97	38,4	23,6			BPS
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,21	2,11	3,47	0,1	-1,26	Kemenkop UKM
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	118,63	97,4	124,5	21,231	-5,869	BPS – Produktivitas Tenaga Kerja
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,42	65,42	69,47	-5	-9,05	BPS – Sakernas
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	43,93	33,2	30,4	10,73	13,53	BPS – PDRB
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	12,45	119,6	1418,9	-107,15	-1406,45	BKPM
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,62	4,4	4,51	0,22	0,11	KemenPANRB
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	52,58	50,48	50,95	2,1	1,63	Kominfo
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	64,00	Tidak tersedia	Tidak tersedia			ANRI
12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	69,42	70,58	–	-1,16		KemenPANRB
		Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	5,00	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kemendagri
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	2,41	1,89	10,39	0,52	-7,98	Kemenkeu
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP			BPK RI
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	N/A	–	–			Kemendagri
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,36	86,7	88,1	10,66	9,26	Kemenkumham
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	Indeks Sistem Merit	Indeks	N/A	312	325			KASN
		Indeks BerAKHLAK	Indeks	N/A	–	82,3			KemenPANRB
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81,00	76,1	78,4	4,9	2,6	BKN
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	74,52	72,1	70,97	2,42	3,55	KPK
16		Indeks Inovasi daerah	Angka	60,76	61,02	58,7	-0,26	2,06	Kemendagri

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Realisasi Tangsel 2025	Realisasi Provinsi Banten 2025	Realisasi Nasional 2025	Gap Realisasi dengan		Sumber Data Realisasi Provinsi & Nasional
							Provinsi	Nasional	
1	2	3	4	5	6	7	8=5-6	9=5-7	8
	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,98	3,6	3,42	0,38	0,56	BRIN
		Persentase kebijakan berbasis bukti	%	39,64	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Bappenas
17	S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)	%	3,90	6,8	8,5	-2,9	-4,6	FAO / Bappenas
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	63,83	130,56	125	-66,73	-61,17	BNPB
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	68,36	52,42	54,79	15,94	13,57	KLHK
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	60,92	88,79	87,26	-27,87	-26,34	KLHK
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	34,85	49,17	60,33	-14,32	-25,48	KLHK
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	58,46	55,8	62,3	2,66	-3,84	KLHK – SIPSN
		Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	100,00	86,2	83,4	13,8	16,6	KLHK
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	8,09	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kementerian PUPR
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	20,50	19,2	20,69	1,30	-0,19	BPS – Susenas
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,55	92,8	91,6	6,75	7,95	BPS – Perumahan
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	1,75	11,8	13,3	-10,05	-11,55	BPS
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM bertandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	6,50	Tidak tersedia	Tidak tersedia			Kemendagri
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	47,07	56,03	53,74	-8,96	-6,67	Kemendikbud
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	76,15	77,47	76,02	-1,32	0,13	Kemenag
		Indeks Demokrasi	Indeks	76,87	73,49	79,51	3,38	-2,64	BPS
		Indeks Rasa Aman	Angka	67,99	72,1	73,4	-4,11	-5,41	Polri / BPS

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SDG's

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 dengan target SDGs Tahun 2030 sebagaimana **Tabel 3.28**, indikator dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu indikator yang telah melampaui target, mendekati target, dan yang masih memiliki gap cukup besar.

Indikator yang telah melampaui target antara lain rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, indeks kualitas udara, dan indeks pelayanan publik, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia dan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan berada pada kondisi yang baik.

Sementara itu, beberapa indikator mendekati target, seperti harapan lama sekolah, indeks kualitas air, akses hunian layak, nilai SAKIP, dan nilai SPI, yang menunjukkan bahwa kinerja pembangunan telah berada pada jalur yang tepat namun masih memerlukan penguatan kebijakan dan program.

Di sisi lain, terdapat indikator yang masih memiliki gap cukup besar, terutama terkait akses air minum perpipaan, sanitasi aman, pengelolaan sampah perkotaan, rasio kewirausahaan, dan prevalensi ketidakcukupan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan dasar perkotaan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat masih menjadi tantangan pembangunan ke depan.

Selain itu, beberapa indikator daerah seperti indeks inovasi daerah, indeks kapabilitas inovasi, indeks profesionalitas ASN, indeks reformasi hukum, dan indeks demokrasi berperan sebagai indikator pendukung dalam menggambarkan kontribusi daerah terhadap pencapaian SDGs. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian SDGs, meskipun masih diperlukan percepatan pada beberapa sektor strategis menuju target tahun 2030.

Tabel 3.28. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target SDG's

Goal	Nomor Indikator	Nama Indikator TPB Nasional	Nama Indikator TPB Daerah	Satuan	Target SDGs 2030	Realisasi Tangsel 2025	Gap
4	4.3.1	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun	Tahun	12	12,10	0,10
4	4.1.1	Harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15	14,71	-0,29
4	-	Literasi pendidikan dasar	Kemampuan Literasi SD	Skor	-	83,18	-
4	-	Literasi pendidikan menengah	Kemampuan Literasi SMP	Skor	-	90,60	-
4	-	Numerasi pendidikan dasar	Kemampuan Numerasi SD	Skor	-	79,09	-
4	-	Numerasi pendidikan menengah	Kemampuan Numerasi SMP	Skor	-	86,76	-
3	3.4.1	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	Tahun	75	76,09	1,09
1	1.2.1	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	0	2,39	2,39
1	-	Indeks kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	58,91	-
5	5.6.1	Indeks pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	-	70,80	-
5	5.1.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0	0,176	0,176

Goal	Nomor Indikator	Nama Indikator TPB Nasional	Nama Indikator TPB Daerah	Satuan	Target SDGs 2030	Realisasi Tangsel 2025	Gap
16	16.2	Indeks Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	-	-	-
8	8.6	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	-	56,07	-
4	4.6	Tingkat kegemaran membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	-	56,09	-
8	8.2	Struktur ekonomi jasa	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	-	68,08	-
8	8.9	Kontribusi pariwisata	Kontribusi Akomodasi dan Makan Minum	%	-	3,09	-
8	8.3	Rasio kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4	2,21	-1,79
8	8.2	Produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja	Juta Rp	-	76,71	-
8	8.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	TPAK	%	-	60,42	-
9	9.2	Pembentukan Modal Tetap Bruto	PMTB	%	-	43,93	-
8	8.10	Nilai investasi	Nilai investasi	Triliun Rp	-	12,45	-
16	16.6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,5	4,62	0,12
9	9.c	Indeks Masyarakat Digital	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	-	52,58	-
16	16.6	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	80	69,42	-10,58
16	16.6	Rasio Pajak terhadap PDRB	Rasio Pajak	%	-	2,41	-
16	16.6	Opini BPK	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	0
16	16.3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	-	97,36	-
16	16.5	Nilai SPI	Nilai SPI	Nilai	80	74,52	-5,48
9	9.5	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi	Angka	-	60,76	-
9	9.5	Indeks Kapabilitas Inovasi	Kapabilitas inovasi	Indeks	-	3,98	-
2	2.1	Prevalensi Ketidacukupan Pangan	PoU	%	0	3,9	3,9
13	13.1	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	-	63,83	-
6	6.3	Indeks Kualitas Air	IKA	Indeks	70	68,36	-1,64
11	11.6	Indeks Kualitas Udara	IKU	Indeks	60	60,92	0,92
15	15.1	Indeks Tutupan Lahan	IKTL	Indeks	-	34,85	-
11	11.6	Sampah terolah	Sampah terolah	%	100	58,46	-41,54
6	6.1	Akses Air Minum	Air minum perpipaan	%	100	20,5	-79,5
11	11.1	Hunian layak	Hunian layak	%	100	99,47	-0,53
6	6.2	Sanitasi aman	Sanitasi aman	%	100	1,75	-98,25
16	16.7	Indeks Demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	-	76,87	-
16	16.1	Indeks Rasa Aman	Indeks Rasa Aman	Angka	-	67,99	-

Catatan:

Tidak seluruh indikator kinerja daerah memiliki padanan langsung dengan indikator TPB/SDGs nasional. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan sebagai indikator proxy untuk menggambarkan kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemetaan capaian indikator terhadap target SDGs 2030 sebagaimana **Tabel 3.28**, terdapat beberapa indikator yang telah melampaui target, terutama pada indikator pembangunan manusia dan kualitas layanan publik, seperti rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, indeks kualitas udara, dan indeks pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah berada pada kondisi yang baik.

Namun demikian, sebagian indikator masih berada pada kategori kuning, yang menunjukkan capaian yang relatif mendekati target namun masih memerlukan upaya percepatan, seperti pada indikator harapan lama sekolah, kualitas air, hunian layak, serta nilai integritas pemerintahan.

Sementara itu, beberapa indikator masih berada pada kategori merah, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar perkotaan dan ekonomi inklusif, seperti akses air minum perpipaan, sanitasi aman, pengelolaan sampah, rasio kewirausahaan, serta prevalensi ketidakcukupan pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan masih menjadi prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs Tahun 2030.

Tabel 3.29. Ringkasan Status Capaian Indikator SDG's Kota Tangerang Selatan s.d Tahun 2025

No	Indikator	Realisasi Tangsel 2025	Target SDGs 2030	Gap	Status
1	Rata-rata lama sekolah	12,10	12	0,10	● Hijau
2	Harapan Lama Sekolah	14,71	15	-0,29	● Kuning
3	Usia Harapan Hidup	76,09	75	1,09	● Hijau
4	Tingkat Kemiskinan	2,39	0	2,39	● Merah
5	Rasio Kewirausahaan	2,21	4	-1,79	● Merah
6	Akses Air Minum Perpipaan	20,5	100	-79,5	● Merah
7	Akses Sanitasi Aman	1,75	100	-98,25	● Merah
8	Hunian Layak	99,47	100	-0,53	● Kuning
9	Indeks Kualitas Air	68,36	70	-1,64	● Kuning
10	Indeks Kualitas Udara	60,92	60	0,92	● Hijau
11	Sampah Terolah	58,46	100	-41,54	● Merah
12	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	3,9	0	3,9	● Merah
13	Indeks Pelayanan Publik	4,62	4,5	0,12	● Hijau
14	Nilai SAKIP	69,42	80	-10,58	● Merah
15	Nilai SPI	74,52	80	-5,48	● Kuning

Ringkasan Status SDGs Kota Tangerang Selatan

Status	Jumlah Indikator	Persentase
● Hijau	4	26,7%
● Kuning	4	26,7%
● Merah	7	46,6%

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

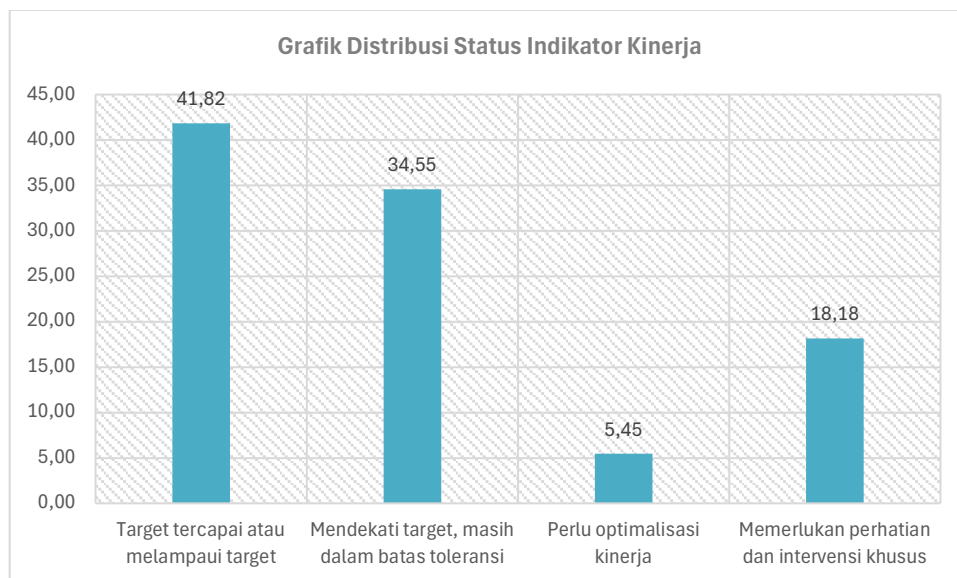
Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.30** dan **Gambar 3.1**, capaian kinerja Tahun 2025 secara umum berada pada kategori baik, dengan 76,37% indikator telah mencapai atau mendekati target. Hal ini menunjukkan efektivitas perencanaan dan implementasi program, terutama pada sektor layanan dasar dan tata kelola.

Namun, masih terdapat 23,63% indikator yang perlu optimalisasi dan intervensi khusus, terutama pada isu struktural seperti kemiskinan, literasi, ketahanan pangan, dan sanitasi. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada ketersediaan program, melainkan pada kualitas dampak dan integrasi intervensi, sehingga diperlukan penguatan pendekatan berbasis outcome dan lintas sektor agar capaian pembangunan lebih merata.

Tabel 3.30. Ringkasan Status Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Kategori Status	Jumlah Indikator	Persentase
Target tercapai atau melampaui target	23	41,82
Mendekati target, masih dalam batas toleransi	19	34,55
Perlu optimalisasi kinerja	3	5,45
Memerlukan perhatian dan intervensi khusus	10	18,18
Total Indikator Sasaran Strategis	55	100,00

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026



Gambar 3.1. Grafik Distribusi Status Indikator Kinerja

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Faktor Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator kinerja pada sejumlah sasaran strategis dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja pada beberapa sektor pembangunan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan secara efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tercermin dari sejumlah indikator yang berhasil melampaui target kinerja, khususnya pada sektor pendidikan, ekonomi daerah, pelayanan publik, serta inovasi daerah. Pada sektor pendidikan, capaian indikator kemampuan literasi dan numerasi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kemampuan literasi siswa SD tercatat mencapai 83,18 dari target 69,67 atau 119,39 persen, sementara kemampuan literasi siswa SMP mencapai 90,6 dari target 82,38 atau 109,98 persen. Demikian pula pada indikator numerasi, capaian numerasi siswa SD mencapai 79,09 dari target 60,2 atau 131,38 persen, dan numerasi siswa SMP mencapai 86,76 dari target 71,11 atau 122,01 persen.

Pada sektor ekonomi daerah, capaian indikator nilai investasi daerah juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi investasi pada Tahun 2025 mencapai Rp12,45 triliun, melampaui target sebesar Rp8,7 triliun atau mencapai 143,10 persen dari target. Selain itu, indikator rasio kewirausahaan daerah juga menunjukkan peningkatan dengan capaian 2,21 persen dari target 2,15 persen atau 102,79 persen.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif telah mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah.

2. Penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Capaian indikator pada sektor tata kelola pemerintahan juga menunjukkan kinerja yang baik sebagai hasil dari implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Hal ini tercermin dari capaian indikator Indeks Pelayanan Publik yang terealisasi sebesar 4,62 dari target 4,25 atau 108,71 persen, yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, indikator rasio pajak terhadap PDRB juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 2,41 persen dari target 1,92 persen atau 125,52 persen, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pada aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Selain itu, indikator Nilai SAKIP juga menunjukkan capaian yang cukup baik dengan realisasi 69,42 dari target 70 atau 99,17 persen, yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja pemerintah daerah telah berjalan secara relatif efektif.

3. Dukungan transformasi digital dalam pelayanan publik

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari capaian indikator Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang terealisasi sebesar 52,58 dari target 49,87 atau 105,43 persen.

Peningkatan indeks tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat terus meningkat, seiring dengan penguatan layanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, implementasi digitalisasi juga tercermin pada indikator Tingkat Digitalisasi Arsip yang mencapai 64 dari target 66,36 atau 96,44 persen, yang menunjukkan bahwa proses transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan terus mengalami peningkatan meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek pengelolaan arsip digital.

4. Sinergi antar perangkat daerah dan dukungan pemangku kepentingan

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja juga didukung oleh peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Kolaborasi tersebut tercermin antara lain dari capaian indikator jumlah kerja sama antar pemerintah daerah yang mencapai 5 kerja sama dari target 5 kerja sama atau 100 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan kemitraan pembangunan daerah.

Selain itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha juga memberikan kontribusi penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan daerah, khususnya pada sektor pengembangan ekonomi daerah, peningkatan inovasi daerah, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Secara keseluruhan, kombinasi antara efektivitas pelaksanaan program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, dukungan transformasi digital, serta sinergi antar pemangku kepentingan telah menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2025.

Faktor Penyebab Kinerja Belum Optimal

1. Tantangan dalam peningkatan literasi masyarakat

Salah satu indikator yang menunjukkan capaian kinerja relatif rendah adalah Tingkat Kegemaran Membaca, yang hanya mencapai 56,09 dari target 88,49 atau 63,39 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama dalam meningkatkan minat membaca sebagai bagian dari penguatan budaya literasi masyarakat.

Rendahnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke media digital dan media sosial, serta masih terbatasnya pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan sumber bacaan di masyarakat. Selain itu, budaya membaca sebagai aktivitas pembelajaran sepanjang hayat masih belum berkembang secara optimal di sebagian masyarakat.

2. Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah

Indikator Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK) juga menunjukkan capaian yang relatif rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 indikator ini hanya mencapai Rp76,71 juta dari target Rp127,96 juta, atau 59,95 persen dari target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di Kota Tangerang Selatan masih menghadapi tantangan, yang antara lain dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor jasa dengan tingkat produktivitas yang relatif bervariasi, serta masih terbatasnya peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Selain itu, tingginya proporsi pekerja pada sektor informal juga turut mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan.

3. Tantangan dalam penguatan ketahanan pangan masyarakat

Pada sektor ketahanan pangan, indikator Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU) menunjukkan capaian yang belum optimal. Pada Tahun 2025 indikator ini terealisasi sebesar 3,9 persen, lebih tinggi dari target 2,96 persen, sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 68,24 persen dari target.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh kecukupan konsumsi energi pangan secara memadai. Sebagai wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, Kota Tangerang Selatan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Oleh karena itu, stabilitas ketahanan pangan daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika distribusi dan harga pangan pada tingkat regional maupun nasional.

4. Keterbatasan kapasitas pengelolaan lingkungan perkotaan

Tantangan lain yang mempengaruhi capaian indikator kinerja adalah pada sektor pengelolaan lingkungan perkotaan, khususnya pada indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Pada Tahun 2025 indikator ini hanya mencapai 58,46 persen dari target 97 persen, atau sekitar 60,27 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat perkotaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber juga masih perlu ditingkatkan.

5. Keterbatasan akses sanitasi aman

Indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman juga menunjukkan capaian yang sangat rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2025 indikator ini hanya mencapai 1,75 persen dari target 16 persen, atau sekitar 10,94 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sistem sanitasi aman masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait dengan keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah domestik, keterbatasan pembiayaan pembangunan sanitasi, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi yang aman dan berkelanjutan.

6. Keterbatasan ketersediaan data indikator kinerja

Selain itu, terdapat beberapa indikator yang belum dapat dianalisis secara komprehensif karena data capaian indikator belum dirilis secara resmi pada periode pelaporan. Indikator tersebut antara lain indikator Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB, serta beberapa indikator tata kelola pemerintahan seperti Indeks Pengelolaan Aset.

Keterbatasan ketersediaan data tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan data pembangunan daerah masih perlu diperkuat agar proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan tepat waktu.

Diagnosis Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Tahun 2025, beberapa indikator masih memerlukan percepatan maupun intervensi kebijakan guna memastikan pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan analisis diagnosis terhadap indikator yang belum mencapai target untuk mengidentifikasi permasalahan utama, faktor penyebab, serta strategi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan pada periode pembangunan berikutnya.

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar permasalahan kinerja berkaitan dengan tantangan struktural pembangunan perkotaan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan masyarakat, serta penyediaan layanan dasar perkotaan seperti pengelolaan sampah dan sanitasi. Selain itu, penguatan integrasi riset dalam proses perumusan kebijakan juga menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan guna mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.

Dengan adanya analisis diagnosis kebijakan ini, pemerintah daerah dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dalam mempercepat pencapaian target pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada periode berikutnya.

Tabel 3.31. Diagnosis Permasalahan dan Strategi Perbaikan Kinerja Indikator Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Status Capaian	Permasalahan Utama	Penyebab Utama	Strategi Perbaikan
1	Tingkat Kemiskinan	Perlu Percepatan	Penurunan kemiskinan belum sesuai target	Kerentanan ekonomi kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta dinamika ekonomi perkotaan	Penguatan program perlindungan sosial terintegrasi, peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu
2	Tingkat Kegemaran Membaca	Perlu Intervensi Khusus	Budaya literasi masyarakat masih rendah	Perubahan pola konsumsi informasi ke media digital serta masih rendahnya pemanfaatan fasilitas perpustakaan	Penguatan gerakan literasi masyarakat, peningkatan akses bahan bacaan digital dan fisik, serta pengembangan perpustakaan berbasis komunitas
3	Produktivitas Tenaga Kerja	Perlu Intervensi Khusus	Produktivitas tenaga kerja belum optimal	Struktur ekonomi didominasi sektor jasa dengan produktivitas bervariasi serta keterampilan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai kebutuhan industri	Peningkatan program pelatihan vokasi dan reskilling tenaga kerja, penguatan link and match pendidikan dan industri, serta pengembangan sektor ekonomi produktif
4	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	Perlu Intervensi Khusus	Ketahanan pangan masyarakat masih rentan	Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah serta fluktuasi harga pangan	Penguatan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pasokan pangan, stabilisasi harga pangan, serta pengembangan program ketahanan pangan masyarakat
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Perlu Intervensi Khusus	Kapasitas pengolahan sampah belum optimal	Peningkatan volume sampah perkotaan serta keterbatasan fasilitas pengolahan sampah	Peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, penguatan program pengurangan sampah dari sumber, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
6	Akses Sanitasi Aman	Perlu Intervensi Khusus	Cakupan layanan sanitasi aman masih rendah	Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah	Percepatan pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik,

No	Indikator Kinerja	Status Capaian	Permasalahan Utama	Penyebab Utama	Strategi Perbaikan
				domestik serta keterbatasan pembiayaan pembangunan sanitasi	peningkatan investasi infrastruktur sanitasi, serta penguatan edukasi sanitasi masyarakat
7	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Perlu Percepatan	Pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan masih terbatas	Integrasi hasil riset ke dalam proses perencanaan pembangunan belum optimal	Penguatan integrasi riset dalam perencanaan pembangunan, peningkatan kolaborasi antara perangkat daerah dan lembaga penelitian, serta penguatan sistem knowledge management pemerintah daerah

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Untuk memperkuat evaluasi kinerja pembangunan daerah, dilakukan identifikasi risiko terhadap indikator kinerja yang berpotensi tidak mencapai target RPJMD apabila tidak dilakukan penguatan kebijakan dan program pembangunan. Identifikasi risiko ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai indikator-indikator yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Hasil identifikasi risiko pencapaian target pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.32. Peta Risiko Pencapaian Target RPJMD Kota Tangerang Selatan

No	Indikator Kinerja	Status Kinerja 2025	Tingkat Risiko	Faktor Risiko	Strategi Mitigasi
1	Tingkat Kegemaran Membaca	Perlu Intervensi Khusus	Tinggi	Budaya literasi masyarakat rendah serta perubahan pola konsumsi informasi digital	Penguatan gerakan literasi masyarakat, pengembangan perpustakaan digital
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Perlu Intervensi Khusus	Tinggi	Struktur ekonomi jasa dengan produktivitas relatif rendah	Peningkatan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja
3	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	Perlu Intervensi Khusus	Tinggi	Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah dan fluktuasi harga pangan	Penguatan distribusi pangan dan pengendalian inflasi pangan
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Perlu Intervensi Khusus	Tinggi	Keterbatasan infrastruktur sanitasi perkotaan	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik
5	Timbulan Sampah Terolah	Perlu Intervensi Khusus	Tinggi	Kapasitas fasilitas pengolahan sampah belum memadai	Peningkatan kapasitas pengolahan sampah dan penguatan pengelolaan sampah
6	Tingkat Kemiskinan	Perlu Percepatan	Sedang	Kerentanan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah	Penguatan program pengentasan kemiskinan terpadu
7	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Perlu Percepatan	Sedang	Pemanfaatan hasil riset dalam kebijakan masih terbatas	Penguatan integrasi riset dalam perencanaan pembangunan

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Berdasarkan hasil analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pencapaian sebagian besar sasaran strategis pembangunan

daerah. Hal ini tercermin dari dominannya indikator yang berada pada kategori melampaui target dan mendekati target.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan percepatan maupun intervensi kebijakan, khususnya pada indikator yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan pangan, serta layanan dasar perkotaan seperti sanitasi dan pengelolaan sampah.

Hasil analisis ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan kebijakan serta penguatan program pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Dengan penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan seluruh indikator kinerja pembangunan daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

3.2.6. Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran)

Analisis efisiensi sumber daya dilakukan untuk menilai tingkat optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana realisasi anggaran yang digunakan mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui perbandingan antara tingkat capaian kinerja dengan tingkat realisasi anggaran yang digunakan. Semakin tinggi capaian kinerja yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien, maka semakin tinggi tingkat efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.33**, secara umum pengelolaan anggaran pembangunan daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik.

Tabel 3.33. Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Efisiensi
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	90,75	113,42	124,99	Sangat Efisien
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	92,86	99,84	107,52	Sangat Efisien
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	82,50	89,96	109,04	Sangat Efisien
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	95,27	69,23	72,67	Kurang Efisien
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	97,85	100,20	102,40	Sangat Efisien
6	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	97,00	63,39	65,35	Kurang Efisien

No.	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Efisiensi
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	87,42	102,16	116,87	Sangat Efisien
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	93,22	96,29	103,29	Sangat Efisien
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	94,27	121,47	128,85	Sangat Efisien
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	90,38	108,71	120,27	Sangat Efisien
11	S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	94,18	100,94	107,18	Sangat Efisien
12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	90,71	84,94	93,64	Efisien
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	94,00	98,05	104,30	Sangat Efisien
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima	88,55	33,75	38,11	Kurang Efisien
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan	80,54	96,78	120,16	Sangat Efisien
16	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	91,05	105,70	116,09	Sangat Efisien
17	S1. Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	96,89	75,90	78,34	Kurang Efisien
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	80,74	99,01	122,63	Sangat Efisien
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	86,19	115,43	133,93	Sangat Efisien
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andal, inklusif, dan berkelanjutan	92,90	76,46	82,31	Cukup Efisien
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	81,98	91,17	111,21	Sangat Efisien

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Rasio Efisiensi	Kategori
>100	Sangat Efisien
90–100	Efisien
80–89	Cukup Efisien
<80	Kurang Efisien

Sumber: Diadaptasi dari metodologi evaluasi kinerja dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan praktik evaluasi kinerja Kementerian PANRB.

Analisis Efisiensi Anggaran per Sektor Pembangunan

1. Sektor Pembangunan Manusia

Pada sektor pembangunan manusia, efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan variasi kinerja antar sasaran. Hal ini terlihat dari perbedaan rasio efisiensi pada beberapa sasaran strategis yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran peningkatan kualitas pendidikan menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dengan rasio efisiensi 124,99, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 113,42 persen dengan realisasi anggaran sebesar 90,75 persen. Capaian ini didukung oleh peningkatan sejumlah indikator pendidikan, antara lain rata-rata lama sekolah yang mencapai 12,1 tahun dari target 12,04 tahun, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa program peningkatan mutu pendidikan mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal.

Sebaliknya, sasaran peningkatan literasi masyarakat memiliki rasio efisiensi yang relatif rendah yaitu 65,35, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 63,39 persen dengan realisasi anggaran sebesar 97,00 persen. Rendahnya efisiensi tersebut berkaitan dengan capaian indikator tingkat kegemaran membaca masyarakat yang hanya mencapai 56,09 dari target 88,49. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program literasi telah dilaksanakan, efektivitas intervensi program dalam meningkatkan budaya membaca masyarakat masih perlu diperkuat.

Sementara itu, sasaran peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan perlindungan anak juga menunjukkan rasio efisiensi yang relatif rendah sebesar 72,29, yang diperoleh dari capaian kinerja 68,87 persen dengan realisasi anggaran 95,27 persen. Kondisi ini dipengaruhi antara lain oleh belum tersedianya data capaian indikator Indeks Perlindungan Anak, sehingga capaian kinerja pada sasaran ini belum dapat sepenuhnya mencerminkan hasil program pembangunan yang dilaksanakan.

2. Sektor Ekonomi Daerah

Pada sektor ekonomi daerah, penggunaan anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik dalam mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Sasaran peningkatan investasi daerah memiliki rasio efisiensi sebesar 128,85, yang merupakan salah satu nilai efisiensi tertinggi. Rasio ini diperoleh dari capaian kinerja sebesar 121,47 persen dengan realisasi anggaran sebesar 94,27 persen. Capaian tersebut didukung oleh realisasi investasi daerah yang mencapai Rp12,45 triliun dari target Rp8,7 triliun, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif mampu mendorong peningkatan investasi secara signifikan dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien.

Demikian pula sasaran pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM menunjukkan rasio efisiensi sebesar 114,38, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 99,99 persen dengan realisasi anggaran sebesar 87,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, sasaran peningkatan produktivitas tenaga kerja menunjukkan rasio efisiensi sebesar 85,72, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 79,91 persen dengan realisasi anggaran sebesar 93,22 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK) yang hanya mencapai Rp76,71 juta dari target Rp127,96 juta. Hal ini menunjukkan

bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja masih memerlukan penguatan kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja serta penguatan keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia industri.

3. Sektor Tata Kelola Pemerintahan

Pada sektor tata kelola pemerintahan, efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari beberapa sasaran strategis yang memiliki rasio efisiensi tinggi.

Sasaran pelayanan publik memiliki rasio efisiensi sebesar 120,27, yang diperoleh dari capaian kinerja 108,71 persen dengan realisasi anggaran sebesar 90,38 persen. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan Indeks Pelayanan Publik yang mencapai 4,62 dari target 4,25.

Sasaran integritas penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan rasio efisiensi sebesar 120,16, yang diperoleh dari capaian kinerja 96,78 persen dengan realisasi anggaran sebesar 80,54 persen. Capaian ini berkaitan dengan indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang mencapai 74,52 dari target 77. Selain itu, sasaran kapabilitas kelembagaan pemerintahan memiliki rasio efisiensi sebesar 117,05, yang didukung oleh capaian indikator Nilai SAKIP sebesar 69,42, serta peningkatan rasio pajak terhadap PDRB yang mencapai 2,41 persen dari target 1,92 persen.

Sasaran profesionalisme ASN juga menunjukkan rasio efisiensi yang baik sebesar 114,34, yang didukung oleh capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar 81 dari target 80. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan telah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

4. Sektor Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Perkotaan

Pada sektor lingkungan hidup, penggunaan anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan memiliki rasio efisiensi tertinggi sebesar 133,93, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 115,43 persen dengan realisasi anggaran sebesar 86,19 persen. Capaian ini didukung oleh peningkatan beberapa indikator lingkungan hidup, antara lain Indeks Kualitas Udara yang mencapai 60,92 dari target 34,93, serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 34,85 dari target 33,73.

Namun demikian, pada sektor layanan infrastruktur perkotaan, rasio efisiensi tercatat sebesar 82,29, yang diperoleh dari capaian kinerja sebesar 76,44 persen dengan realisasi anggaran sebesar 92,90 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman, yang hanya mencapai 1,75 persen dari target 16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan sanitasi masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan serta peningkatan investasi infrastruktur sanitasi perkotaan.

Untuk memberikan gambaran hubungan antara capaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran strategis, dilakukan pemetaan menggunakan pendekatan peta kuadran kinerja–efisiensi (performance–efficiency quadrant). Pendekatan ini mengelompokkan sasaran strategis berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat capaian kinerja dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran.

Melalui pemetaan ini, sasaran strategis diklasifikasikan ke dalam empat kuadran, yaitu efisiensi tinggi–kinerja tinggi, efisiensi tinggi–kinerja belum optimal, efisiensi rendah–kinerja tinggi, dan efisiensi rendah–kinerja rendah. Analisis ini memberikan gambaran strategis mengenai efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah serta membantu mengidentifikasi sasaran yang perlu dipertahankan maupun yang memerlukan penguatan kebijakan dan program pembangunan.

Hasil pemetaan kinerja dan efisiensi sasaran strategis Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.

KINERJA TINGGI ($\geq 100\%$)	
KUADRAN I	KUADRAN III
Efisiensi Tinggi-Kinerja Tinggi	Efisiensi Rendah- Kinerja Tinggi
S1 Pendidikan S5 Pemuda S9 Investasi Daerah S10 Pelayanan Publik S11 Transformasi Digital S12 Kapabilitas Kelembagaan S14 Profesionalisme ASN S16 Riset dan Inovasi S19 Lingkungan Hidup	-
KUADRAN II	KUADRAN IV
Efisiensi Tinggi- Kinerja Belum Optimal	Efisiensi Rendah- Kinerja Rendah
S2 Kesehatan S3 Penanggulangan Kemiskinan S7 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif S13 Reformasi Regulasi S15 Integritas Pemerintahan S18 Risiko Bencana S21 Keterikatan Sosial	S4 Kualitas Keluarga S6 Literasi Masyarakat S8 Produktivitas Tenaga Kerja S17 Ketahanan Pangan S20 Infrastruktur Perkotaan
EFISIENSI TINGGI (> 100)	EFISIENSI RENDAH (< 100)

Gambar 3.2. Peta Kuadran Kinerja–Efisiensi Sasaran Strategis Tahun 2025

Sumber: Analisis LKjIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Berdasarkan pemetaan pada **Gambar 3.2**, sebagian besar sasaran strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan berada pada Kuadran I (efisiensi tinggi–kinerja tinggi) dan Kuadran II (efisiensi tinggi–kinerja belum optimal). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penggunaan anggaran pembangunan daerah telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang baik dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi.

Sasaran yang berada pada **Kuadran I** antara lain peningkatan kualitas pendidikan, investasi daerah, pelayanan publik, transformasi digital, kapabilitas kelembagaan, profesionalisme ASN, inovasi daerah, serta kualitas lingkungan hidup. Posisi ini menunjukkan bahwa

program pembangunan pada sektor tersebut mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang efisien sehingga perlu dipertahankan dan diperkuat keberlanjutannya.

Sementara itu, sasaran pada **Kuadran II** seperti sektor kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, reformasi regulasi, integritas pemerintahan, pengurangan risiko bencana, serta penguatan keterikatan sosial menunjukkan bahwa penggunaan anggaran relatif efisien namun capaian kinerja masih memerlukan peningkatan melalui penguatan desain program dan koordinasi antar perangkat daerah.

Di sisi lain, beberapa sasaran berada pada **Kuadran IV (efisiensi rendah–kinerja rendah)**, yaitu kualitas keluarga dan perlindungan anak, literasi masyarakat, produktivitas tenaga kerja, ketahanan pangan, serta layanan infrastruktur perkotaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi program dan penguatan intervensi kebijakan agar penggunaan anggaran dapat menghasilkan dampak pembangunan yang lebih optimal.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan integrasi antara perencanaan pembangunan, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar alokasi sumber daya daerah dapat semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan penguatan tata kelola perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja tersebut, diharapkan efisiensi penggunaan anggaran daerah dapat terus meningkat sekaligus mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

3.2.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Mendukung Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Oleh karena itu, analisis terhadap keterkaitan antara program/kegiatan dengan capaian indikator kinerja menjadi penting untuk memastikan bahwa intervensi pembangunan yang dilaksanakan telah selaras dengan tujuan strategis pembangunan daerah.

Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi program dan kegiatan utama pada masing-masing urusan pemerintahan yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran strategis, serta menilai hubungan antara realisasi anggaran, output program, dan capaian indikator kinerja yang dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan.

Ringkasan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan utama, serta realisasi anggaran dan capaian kinerja disajikan pada **Tabel 3.34. Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis**

Tabel 3.34. Program/Kegiatan yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	379.853.078.057,00	357.338.785.518,00	94,07	12,04	12,1	100,50	Program pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan peningkatan kompetensi pendidik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini tercermin dari capaian Rata-rata Lama Sekolah 12,10 tahun (target 12,04; 100,50%) serta peningkatan signifikan kemampuan literasi dan numerasi siswa, antara lain literasi SD 83,20 (119,40%), numerasi SD 79,09 (131,38%), dan numerasi SMP 86,76 (122,01%).
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	209.500.531.205,00	207.571.790.649,00	99,08				
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125.656.471.166,00	107.678.938.871,00	85,69				
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.005.642.686,00	30.348.257.326,00	94,82				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	92.490.000,00	87.325.000,00	94,42	15,12	14,71	97,29	
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	92.490.000,00	50.415.000,00	54,51				
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.387.868.259,00	6.187.902.820,00	83,76				
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.387.868.259,00	6.187.902.820,00	83,76				
								69,67	83,2	119,4	
								82,38	90,6	109,98	
		Kemampuan Literasi SD	Skor								
		Kemampuan Literasi SMP	Skor								
		Kemampuan Numerasi SD	Skor								
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor								
2	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus	Usia Harapan Hidup	Tahun	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	314.737.150.349,00	301.722.848.924,00	95,87	76,21	76,09	99,84	Program pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan berkontribusi dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	kehidupan untuk semua										Usia Harapan Hidup mencapai 76,09 tahun dari target 76,21 tahun dengan capaian 99,84%, didukung realisasi anggaran kesehatan sebesar 95,87%.
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.375.353.855,00	40.308.221.903,00					
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	151.525.173.780,00	149.733.211.234,00					
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	410.931.000,00	85.928.000,00					
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.062.571.000,00	1.261.988.427,00					
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.343.684.862,00	2.895.854.610,00	86,61				
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	42.100.000,00	29.000.000,00					
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	376.311.000,00	273.466.000,00					
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.600.273.862,00	2.325.840.000,00					
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	721.036.330,00	666.845.136,00	92,48				
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal,	92.994.000,00	92.182.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00					
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	241.820.000,00	235.643.999,00					
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	57.125.890,00	56.319.999,00					
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	45.000.440,00	23.700.000,00					
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	283.096.000,00	257.999.138,00					
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	11.705.851.804,00	11.294.135.299,00	96,48				
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	590.239.904,00	580.126.999,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.204.000,00	125.004.000,00					
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.796.943.900,00	10.449.931.300,00					
3	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	380.167.375,00	343.112.000,00	90,25	1,91-2,25	2,39	79,92	Program perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial berkontribusi dalam memperkuat perlindungan kelompok rentan. Tingkat kemiskinan tercatat 2,39% dari target 1,91–2,25% (79,92%), sementara Indeks Kesejahteraan Sosial mencapai target 58,91 (100%).
				Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.808.000,00	9.808.000,00					
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	370.359.375,00	333.304.000,00					
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	647.557.512,00	437.316.844,00	67,53	58,91	58,91	100,00	
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	578.981.483,01	369.279.279,00					
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	68.576.029,00	68.037.565,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	316.695.016,00	269.835.677,00	85,20				
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	316.695.016,00	269.835.677,00					
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.297.374.100,00	5.235.387.325,00	98,83				
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	61.650.000,00	58.465.133,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
4	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.235.724.100,00	5.176.922.192,00					Program pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga berkontribusi pada peningkatan ketahanan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga mencapai 70,8 dari target 65,7 (107,76%), sedangkan Indeks Ketimpangan Gender tercatat 0,176 (98,85%).
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.362.539.097,00	963.167.952,00	70,69				
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.265.879.277,00	890.430.643,00					
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	96.659.820,00	72.737.309,00					
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	92.423.000,00	91.023.000,00	98,49	65,70	70,8	107,76	
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.188.000,00	74.288.000,00					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	17.235.000,00	16.735.000,00					
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.179.828.000,00	1.104.465.587,00	93,61	0,174	0,176	98,85	
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	29.578.000,00	29.226.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.150.250.000,00	1.075.239.587,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	32.140.000,00	28.971.000,00	90,14	73,05	N/A	-	
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.140.000,00	28.971.000,00					
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.248.679.000,00	1.227.744.500,00	98,32				
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.137.670.000,00	1.117.780.500,00					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.009.000,00	109.964.000,00					
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	614.090.740,00	592.798.430,00	96,53				
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	381.095.740,00	362.466.430,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	574.491.110,00	542.492.882,00	94,43				
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	332.731.110,00	308.798.882,00					
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.283.955.000,00	7.253.838.690,00	99,59				
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.283.955.000,00	7.253.838.690,00					
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.131.537.000,00	1.940.681.000,00	91,05				
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	527.800.000,00	507.640.000,00					
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	6.227.000,00	5.662.000,00					
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.124.382.000,00	960.691.000,00					
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	473.128.000,00	466.688.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	305.889.000,00	291.340.014,00	95,24				
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	254.209.000,00	246.540.014,00					
5	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	34.641.084.091,00	33.108.913.272,00	95,58	55,96	56,07	100,20	Program pengembangan kepemudaan dan olahraga meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Pemuda mencapai 56,07 dari target 55,96 (100,20%).
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.595.535.773,00	2.580.285.657,00					
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	498.033.710,00					
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.291.106.318,00	2.289.846.538,00					
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	25.000.000.000,00	23.661.630.613,00					
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	4.254.442.000,00	4.079.116.754,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.380.600.000,00	1.364.015.741,00	98,80				
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	953.100.000,00	937.242.609,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	427.500.000,00	426.773.132,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.146.300.000,00	1.136.917.822,00	99,18				
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.146.300.000,02	1.136.917.822,00					
6	S6. Meningkatkan literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	713.764.593,00	692.334.245,00	97,00	88,49	56,09	63,39	Program pembinaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat. Namun Tingkat Kegemaran Membaca tercatat 56,09 dari target 88,49 (63,39%), menunjukkan perlunya penguatan intervensi literasi masyarakat.
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	419.463.454,40	402.335.002,00					
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	294.301.138,40	289.999.243,00					
7	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	396.542.000,00	352.130.000,00	88,80	69,6	68,08	97,81	Program pengembangan UMKM, koperasi, perdagangan, dan pariwisata berkontribusi terhadap penguatan ekonomi daerah. Rasio kewirausahaan mencapai 2,21% dari target 2,15% (102,79%).
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	382.202.000,00	337.790.000,00					
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	14.340.000,00	14.340.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		%	Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	175.423.272,00	165.597.400,00	94,40	3,11	3,09	99,36	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	175.423.272,00	165.597.400,00					
	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif		%	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	611.809.845,00	556.684.550,00	90,99	11,64			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	611.809.845,00	556.684.550,00					
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		%	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	224.054.503,00	213.734.148,00	95,39	52,4			
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	224.054.503,00	213.734.148,00					
	Rasio Kewirausahaan Daerah		%	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	273.462.894,00	265.240.000,00	96,99	2,15	2,21	102,79	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	273.462.894,00	265.240.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	624.052.710,00	579.970.014,00	92,94				
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	624.052.710,00	579.970.014,00					
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	101.634.678,00	99.668.850,00	98,07				
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.634.678,00	99.668.850,00					
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	848.230.848,00	602.992.125,00	71,09				
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	848.230.848,00	602.992.125,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	197.545.980,00	162.914.990,00	82,47				
				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	43.055.100,00	42.450.000,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	3.800.759.990,00	687.934.177,00	18,10				

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.737.359.990,00	626.084.177,00					
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	63.400.000,00	61.850.000,00					
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	224.648.610,00	145.339.482,00	64,70				
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	21.900.000,00	8.760.000,00					
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	43.865.710,00	29.200.000,00					
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	108.917.910,00	62.170.992,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	60.367.000,00	53.327.933,00	88,34				
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.367.000,00	53.327.933,00					
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	12.181.903,00	11.567.409,00	94,96				
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	12.181.903,00	11.567.409,00					
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.853.079.457,00	1.736.738.278,00	93,72				
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	34.625.000,00	21.700.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	17.675.018,00	17.675.000,00	100,00				
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.595.000,00	7.595.000,00					
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	3.095.000,00	3.095.000,00					
				Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.985.018,00	6.985.000,00					
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	165.024.504,00	163.094.208,00	98,83				
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.197.189,00	30.193.928,00					
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	134.827.315,00	132.900.280,00					
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	170.027.109,00	162.115.010,00	95,35				
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	170.027.108,90	162.115.010,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	29.898.300,00	27.524.200,00	92,06				
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	29.898.300,00	27.524.200,00					
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	126.464.581,00	123.798.192,00	97,89				
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	126.464.581,00	123.798.192,00					
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.230.258.284,00	1.147.446.850,00	93,27				
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.230.258.284,00	1.147.446.850,00					
8	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	995.166.400,00	899.703.787,00	90,41	127,96-129,10	76,71	59,95	Program pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja mendukung peningkatan partisipasi angkatan kerja. TPAK mencapai 60,42% dari target 60,5% (99,87%).
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	436.332.000,00	389.828.000,00					
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	558.834.400,00	509.875.787,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.482.385.300,00	1.475.168.000,00	99,51	60,5	60,42	99,87	
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.360.841.300,00	1.356.720.000,00					
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	38.875.000,00	38.875.000,00					
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	48.878.000,00	48.278.000,00					
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	28.791.000,00	27.745.000,00					
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	3.550.000,00					
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	766.617.796,00	687.937.709,00	89,74				
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	434.167.796,00	420.905.000,00					
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	6.000.000,00					
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	300.665.000,00	239.126.709,00					
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	24.785.000,00	21.906.000,00					
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	-						
9	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	296.597.130,00	289.182.000,00	97,50	44	43,93	99,83	Program promosi dan pelayanan investasi berkontribusi terhadap peningkatan investasi daerah. Nilai investasi mencapai Rp12,45 triliun, melampaui target Rp8,7 triliun (143,10%).
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	296.597.130,00	289.182.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	12.848.000,00	12.806.600,00	99,68	8,7	12,45	143,10	
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.848.000,00	12.806.600,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31.520.200,00	25.475.000,00	80,82				
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.080.600,00	12.950.000,00					
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	15.439.600,00	12.525.000,00					
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	190.844.800,00	190.731.000,00	99,94				
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	190.844.800,00	190.731.000,00					
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	698.648.200,00	652.631.000,00	93,41				
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	698.648.200,00	652.631.000,00					
10	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.326.284.527,00	1.027.371.662,00	77,46	4,25	4,62	108,71	Program administrasi kependudukan dan pelayanan publik meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah. Indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.939.891.591,00	34.817.533.988,00	74,17				Pelayanan Publik mencapai 4,62 dari target 4,25 (108,71%).
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.834.086.331,00	76.958.898.125,00	97,62				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.880.586.355,00	2.383.438.175,00	82,74				
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	238.120.000,00	238.065.742,00	99,98				
				Pelayanan Pencatatan Sipil	63.520.000,00	63.520.000,00					
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	174.600.000,00	174.545.742,00					
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.869.625.000,00	1.864.470.663,00	99,72				
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	143.928.900,00	140.612.802,00					
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.725.696.100,00	1.723.857.861,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	208.085.000,00	190.172.950,00	91,39				
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	66.917.000,00	66.813.750,00					
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	107.728.000,00	89.919.200,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	5.000.000,00	4.998.600,00	99,97				
				Penyusunan Profil Kependudukan	5.000.000,00	4.998.600,00					
11	S2. Terwujudnya pengarusutama	Indeks Masyarakat	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	693.943.120,00	687.920.000,00	99,13	49,87	52,58	105,43	

No .	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	an transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Digital Indonesia	Nilai							Program pengembangan e-government dan pengelolaan aplikasi informatika mendorong transformasi digital pemerintahan. Indeks Masyarakat Digital Indonesia mencapai 52,58 dari target 49,87 (105,43%).	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		40.750.000,00	38.450.000,00						
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		567.447.800,00	567.110.000,00						
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		85.745.320,00	82.360.000,00						
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		22.770.000,00	22.590.000,00	99,21	66,36	64	96,44		
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		22.770.000,00	22.590.000,00						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		8.760.000,00	8.520.000,00	97,26					
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		8.760.000,00	8.520.000,00						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		40.317.573.729,00	39.571.857.364,00	98,15					
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		40.040.298.729,00	39.330.967.364,00						
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		11.632.292.400,00	8.746.779.330,00	75,19					
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		11.632.292.400,00	8.746.779.330,00						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		351.675.000,00	338.035.200,00	96,12					
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		351.675.000,00	338.035.200,00						

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
12	S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.025.889.842,00	36.881.391.754,00	96,99	70,00	69,42	99,17	Program penguatan tata kelola keuangan dan akuntabilitas kinerja berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Rasio pajak terhadap PDRB mencapai 2,41% dari target 1,92% (125,52%) serta mempertahankan opini WTP BPK.
		Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	161.512.122.842,00	144.414.417.982,99	89,41	5	5	100,00	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.943.867.218,00	30.022.474.083,00	88,45				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.169.258.665,00	9.241.217.619,00	90,87				
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.836.744.563,00	4.280.917.068,00	88,51	1,92	2,41	125,52	
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.613.787.647,00	4.064.833.983,00					
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikat	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.730.864.120,00	7.342.624.131,00	84,10	WTP	WTP	100,00	
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.195.267.248,00	2.111.888.700,00					
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.582.515.605,00	10.648.908.253,00	91,94	2,00			
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.582.515.605,00	10.648.908.253,00					
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105.676.404.448,00	99.182.506.760,00	93,85				
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.574.254.600,00	1.063.125.990,00	67,53				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.382.497.206,00	23.228.240.981,00	95,27				

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.622.584.570,00	2.353.636.639,00	89,74				
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.037.488.750,00	1.863.626.189,00					
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	103.270.000,00	74.865.000,00					
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	481.825.820,00	415.145.450,00					
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	43.968.425.323,00	42.246.270.545,00	96,08				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.071.553.515,00	136.737.450.044,00	91,11				
				Program Perekonomian dan Pembangunan	3.570.757.985,00	3.085.455.445,00	86,41				
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.868.612.534,00	39.821.198.978,00	88,75				
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.122.530.510,00	889.572.500,00					
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	540.695.000,00	431.855.890,00					
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	697.441.520,00	580.828.400,00					
				Peningkatan Kapasitas DPRD	9.746.835.432,00	9.070.088.863,00					
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.660.463.000,00	251.250.302,00					
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	82.724.470,00	61.852.500,00					
				Fasilitasi Tugas DPRD	30.017.922.602,00	28.535.750.523,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.824.999.574,00	96.652.350.015,00	96,82				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.129.492.949,00	21.650.844.594,00	89,73				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.493.650.885,00	17.654.924.869,00	90,57				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	559.870.033.762,00	527.100.141.646,00	94,15				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49.438.231.510,00	45.538.653.354,00	92,11				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.944.475.775,00	14.754.599.480,00	92,54				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.940.068.470,00	13.258.888.786,00	95,11				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74.547.089.908,00	65.912.352.026,00	88,42				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.947.097.359,00	13.766.364.352,00	92,10				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.379.084.843,00	10.099.273.607,00	97,30				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.705.827.337,00	80.846.980.052,00	95,44				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.227.538.374,00	13.144.242.854,00	92,39				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.761.456.019,00	27.817.836.186,00	90,43				

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	571.593.950.454,00	415.735.090.217,00	72,73				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.042.022.676,00	33.924.866.486,00	94,13				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.512.301.936,00	15.599.682.203,00	94,47				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.397.624.464,00	12.081.585.015,00	90,18				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.545.472.402,00	31.631.429.295,00	94,29				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.535.986.574,00	12.499.257.239,00	85,99				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	102.635.200,00	101.465.200,00	98,86				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.622.133.804,00	9.410.531.155,00	88,59				
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
13	S4. Meningkatnya kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks					99,3	97,36	98,05	Penguatan sistem perumusan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah mendukung peningkatan kualitas regulasi daerah. Indeks Reformasi Hukum mencapai 97,36 dari target 99,30 (98,05%).
14	S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan	Indeks Sistem Merit	Indeks	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.133.685.100,00	2.595.067.287,00	82,81	330			Program pengembangan kompetensi ASN meningkatkan kualitas aparatur. Indeks Profesionalitas ASN mencapai 81 dari target 80 (101,25%).
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.219.292.799,00	1.202.828.060,00					
				Mutasi dan Promosi ASN	687.146.963,00	281.139.900,00					
				Pengembangan Kompetensi ASN	914.499.793,00	803.849.444,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	pelayanan prima	Indeks BerAkhlak	Indeks	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.491.825.182,00	2.349.528.151,00	94,29	80,5			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	612.885.957,00	576.510.151,00					
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.878.939.225,00	1.773.018.000,00					
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks					80	81	101,25	
15	S6. Meningkatnya integritas penyelenggara n pemerintahan	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	115.651.174,00	96.407.210,00	83,36	77	74,52	96,78	Program pengawasan internal memperkuat sistem pengendalian pemerintah. Nilai SPI mencapai 74,52 dari target 77 (96,78%).
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	112.203.674,00	93.962.210,00					
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.447.500,00	2.445.000,00					
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	268.710.032,00	208.858.317,00	77,73				
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	840.000,00	630.000,00					
16	S7. Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Indeks Inovasi daerah	Angka	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				52	60,76	116,85	Program penelitian dan inovasi daerah meningkatkan pemanfaatan inovasi dalam pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah mencapai 60,76 dari target 52 (116,85%).
		Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.197.561.200,00	1.090.404.000,00	91,05	3,29	3,98	120,97	
				Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	585.750.000,00	522.185.000,00					
				Invensi dan Inovasi	611.811.200,00	568.219.000,00					
		Persentase kebijakan berbasis bukti	%					50	39,64	79,28	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
17	S1 Meningkatnya ketahanan pangan daerah yang merata dan berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU)	%	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-			2,96	3,9	68,24	Program diversifikasi pangan dan pengawasan keamanan pangan mendukung ketahanan pangan daerah. Namun Prevalensi Ketidacukupan Pangan tercatat 3,9% dari target 2,96% (68,24%).
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	800.464.345,00	774.133.614,00	96,71				
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	800.464.345,00	774.133.614,00					
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	67.282.005,00	66.164.619,00	98,34				
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	67.282.005,16	66.164.619,00					
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	64.693.800,00	62.488.250,00	96,59				
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19.333.189,00	18.685.000,00					
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.360.611,00	43.803.250,00					
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	65.857.000,00	64.618.500,00	98,12				
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	65.857.000,00	64.618.500,00					
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-						
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	228.319.322,00	222.456.399,00	97,43				
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	131.460.000,00	129.490.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	96.859.322,00	92.966.399,00					
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	206.389.059,00	194.156.503,00	94,07				
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	72.969.910,00	72.729.500,00					
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	133.419.149,00	121.427.003,00					
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.698.487.218,00	1.668.814.598,00	98,25				
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.134.300.826,00	1.112.010.025,00					
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	56.179.952,00	52.893.500,00					
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	508.006.440,00	503.911.073,00					
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.926.839.457,00	1.841.708.755,00	95,58				
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.926.839.457,00	1.841.708.755,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
18	S2. Menurunnya potensi risiko bencana yang berbasis pengurangan dampak dan penguatan ketangguhan masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.664.067.218,00	4.295.179.049,00	92,09	63,2	63,83	99,00	Program penanggulangan bencana meningkatkan ketangguhan daerah. Indeks Risiko Bencana mencapai 63,83 dari target 63,2 (99%).
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	800.749.485,00	762.482.888,00					
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	738.597.837,89	714.142.051,00					
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.590.505.357,00	2.487.153.919,00					
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	534.214.538,07	331.400.191,00					
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	13.674.275.902,00	13.456.261.578,00	98,41				
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.160.752.707,00	12.974.527.775,00					
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	115.100.677,00	94.984.169,00					
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	398.422.518,00	386.749.634,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	146.057.035.399,00	136.485.455.703,00	93,45				

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	146.057.035.399,00	136.485.455.703,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	152.275.829.072,00	148.390.666.100,00	97,45				
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.275.829.072,00	148.390.666.100,00					
19	S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	189.546.500,00	162.776.630,00	85,88	71,00	68,36	96,28	Program pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Udara mencapai 60,92 dari target 34,93 (174,41%), serta Indeks Tutupan Lahan 34,85 (103,32%).
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	189.546.500,00	162.776.630,00					
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	286.849.300,00	277.580.405,00	96,77	34,93	60,92	174,41	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	286.849.300,00	277.580.405,00					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	25.893.282.513,00	22.495.867.911,00	86,88	33,73	34,85	103,32	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	25.893.282.513,00	22.495.867.911,00					
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	115.798.951.136,00	42.306.826.185,00	36,53	97,00	58,46	60,27	
				Pengelolaan Sampah	115.798.951.136,00	42.306.826.185,00					
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	114.305.813,00	111.589.000,00	97,62	70	100	142,86	
				Penyimpanan sementara Limbah B3	114.305.813,00	111.589.000,00					
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.991.218.432,00	1.962.333.453,00	98,55				
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.477.582.412,00	1.454.834.874,00					
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	112.110.740,00	93.268.059,00	83,19				
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.110.740,00	93.268.059,00					
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.076.947.908,00	992.358.126,00	92,15				
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	1.076.947.908,00	992.358.126,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	729.716.412,00	715.883.022,00	98,10				
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	578.488.550,00	572.455.400,00					
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	151.227.862,00	143.427.622,00					
20	S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	610.645.900,00	537.349.300,00	88,00	8,30	8,09	97,47	Program pembangunan jalan, air minum, sanitasi, dan perumahan meningkatkan layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur mencapai 8,09 dari target 8,30 (97,47%).
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	610.645.900,00	537.349.300,00					
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	485.816.166.063,00	470.494.496.618,00	96,85	21	20,5038	97,64	
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	72.892.673.229,00	71.085.598.782,00					
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	8.822.990.902,00	8.798.584.749,00	99,72	99,74	99,4717	99,73	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	8.822.990.902,00	8.798.584.749,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota							
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.771.699.443,00	6.735.406.215,00	99,46	16,00	1,75	10,94	
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.099.253.752,79	1.087.103.000,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.964.321.142,00	1.772.607.255,00	90,24				
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	783.698.180,00	669.109.820,00					
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	555.035.320,00	525.114.222,00					
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	625.587.642,00	578.383.213,00					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	217.377.377.767,00	184.097.411.244,00	84,69				
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	223.353.693.767,40	184.097.411.244,00					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.887.480.942,00	2.401.834.000,00	83,18				
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.307.474.000,00	883.854.000,00					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	687.830.000,00	686.430.000,00					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	339.543.000,00	279.830.000,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	552.633.942,00	551.720.000,00					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	88.976.390.170,00	82.190.828.076,00	92,37				
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	458.141.357,00	440.835.500,00					
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	80.153.057.318,00	73.642.523.832,00					
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	446.096.621,00	435.012.700,00					
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	316.554.283,48	258.853.996,00					
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.203.650.135,02	2.136.433.663,00					
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	16.232.740,00	15.860.400,00					
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.661.479.630,00	4.608.686.184,00					
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.839.965,00	95.750.000,00					
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.895.120,00	46.131.800,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	182.537.710,00	128.174.000,00	70,22				
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	182.537.710,00	128.174.000,00					
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	29.417.475.640,00	29.155.341.149,00	99,11				
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	132.490.634,00	120.449.600,00					
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	29.209.985.005,52	29.034.891.549,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.691.217.808,00	4.948.664.697,00	105,49				
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	120.337.600,00	120.307.600,00					
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.305.619.786,00	4.206.375.930,00					
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	76.830.824,00	26.825.000,00					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	638.429.598,00	595.156.167,00					
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	302.071.018.920,00	297.835.215.428,00	98,60				
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	66.940.482.593,50	64.776.286.353,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	29.414.891.863,00	29.329.660.878,00	99,71				
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	29.489.891.863,00	29.329.660.878,00					
21	S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni	Indeks	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	237.063.749,00	193.478.012,00	81,61	7,4	6,5	87,84	Program penguatan ideologi Pancasila, kebudayaan, dan pendidikan politik memperkuat kohesi sosial masyarakat. Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 53,17 dari target 53,10 (100,13%).
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237.063.749,00	193.478.012,00					
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	917.582.336,00	902.103.001,00	98,31	53,10	53,17	100,13	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	917.582.336,00	902.103.001,00					
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.524.146.960,00	2.471.513.006,00	97,91	77,5	76,15	98,26	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.524.146.960,00	2.471.513.006,00					
		Indeks Demokrasi	Indeks	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	3.181.276.964,00	2.126.317.020,00	66,84	86,50	76,87	88,87	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
		Indeks Rasa Aman	Angka	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.181.276.964,00	2.126.317.020,00					
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.083.030.772,00	4.028.335.000,00	98,66	73,70	67,99	92,25	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4.083.030.772,00	4.028.335.000,00					
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	200.698.250,00	104.041.100,00	51,84				
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	64.269.200,00	28.015.000,00					
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	136.429.050,00	76.026.100,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.346.419.330,00	1.266.505.175,00	94,06				
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	183.785.000,00	181.458.060,00					

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Program/Kegiatan Utama	Belanja			Capaian Kinerja			Kontribusi terhadap Kinerja
					Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	714.176.776,00	647.892.200,00					
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	448.457.554,00	437.154.915,00					
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	304.262.147,00	256.973.760,00	84,46				
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	304.262.147,00	256.973.760,00					
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.601.361.025,00	1.027.371.662,00	64,16				
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.601.361.025,00	1.027.371.662,00					

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Berdasarkan **Tabel 3.34** diatas, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah telah menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari dominannya indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target, yang menunjukkan bahwa intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan relatif efektif dalam mendorong pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Meskipun demikian, pada beberapa sasaran strategis masih terdapat capaian indikator yang belum optimal sehingga memerlukan penguatan desain program, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi terhadap program-program yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan prioritas penguatan program pada periode pembangunan berikutnya.

Program-program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.35. Program dengan Kontribusi Terbesar terhadap Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Program	Sasaran Strategis yang Didukung	Dampak terhadap Kinerja
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 12,10 tahun (100,50%) serta peningkatan signifikan kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP.
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan	Mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan sehingga Usia Harapan Hidup mencapai 76,09 tahun (99,84%).
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal	Mendorong peningkatan realisasi investasi daerah hingga Rp12,45 triliun (143,10% dari target) melalui penyederhanaan layanan perizinan investasi.
4	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital	Memperkuat implementasi e-government sehingga Indeks Masyarakat Digital Indonesia mencapai 52,58 (105,43%).
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan inklusif	Meningkatkan kualitas layanan publik yang tercermin dari Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,62 (108,71%).
6	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan	Mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik sehingga Indeks Inovasi Daerah mencapai 60,76 (116,85%).
7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang akuntabel	Memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan capaian Opini BPK WTP serta peningkatan rasio pajak terhadap PDRB menjadi 2,41% (125,52%).
8	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup, tercermin dari Indeks Kualitas Udara 60,92 (174,41%) dan Indeks Tutupan Lahan 34,85 (103,32%).
9	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Mendorong peningkatan partisipasi pemuda yang tercermin dari Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 56,07 (100,20%).
10	Program Penanggulangan Bencana	Menurunnya potensi risiko bencana	Meningkatkan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana sehingga Indeks Risiko Bencana mencapai 63,83 (99%).

Sumber: Analisis LKIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Di samping program-program yang memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah, hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa program yang capaian indikator kinerjanya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi, efektivitas intervensi program masih perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan desain program, peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah.

Identifikasi terhadap program-program yang memerlukan penguatan ini penting sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja pembangunan daerah guna memastikan bahwa pelaksanaan program pada periode berikutnya dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Program-program yang masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.36. Program yang Memerlukan Penguatan untuk Meningkatkan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Program	Sasaran Strategis yang Didukung	Permasalahan Kinerja	Arah Penguatan Program
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat kegemaran membaca masyarakat hanya mencapai 56,09 dari target 88,49 (63,39%)	Penguatan program literasi digital, pengembangan perpustakaan berbasis teknologi, serta peningkatan kampanye budaya membaca
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Produktivitas tenaga kerja belum mencapai target yang ditetapkan	Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kebutuhan industri serta penguatan link and match pendidikan dan dunia kerja
3	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan tercatat 3,9% dari target 2,96% (68,24%)	Penguatan program ketahanan pangan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan, serta stabilisasi pasokan pangan
4	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Persentase timbulan sampah terolah baru mencapai 58,46% dari target 97% (60,27%)	Peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah serta penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
5	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan	Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan baru mencapai 20,50% dari target 21% (97,64%)	Penguatan pembangunan jaringan SPAM serta peningkatan kerja sama dengan penyedia layanan air minum
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman baru mencapai 1,75% dari target 16% (10,94%)	Pembangunan IPLT serta peningkatan kerja sama dengan penyedia layanan air limbah

Sumber: Analisis LKJIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Berdasarkan **Tabel 3.36** tersebut, beberapa program pembangunan daerah masih menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal meskipun realisasi anggaran relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya dipengaruhi oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas desain program, ketepatan sasaran intervensi, serta sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Program pada sektor literasi masyarakat, ketahanan pangan, produktivitas tenaga kerja, serta pengelolaan persampahan menjadi beberapa program yang memerlukan penguatan pada periode pembangunan berikutnya. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan desain program, peningkatan inovasi layanan, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan melakukan perbaikan pada program-program yang masih memiliki capaian kinerja rendah, diharapkan efektivitas penggunaan sumber daya pembangunan daerah dapat semakin meningkat sehingga mampu mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2025–2029.

3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan **Tabel 3.37**, realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 mencapai Rp4,68 triliun atau sebesar 93,31% dari pagu anggaran, yang menunjukkan kinerja penyerapan anggaran berada pada kategori tinggi dan terkendali. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp4,61 triliun, terjadi peningkatan realisasi sekitar Rp66,66 miliar (1,45%), yang mengindikasikan adanya penguatan kapasitas fiskal dan peningkatan aktivitas belanja daerah. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga kesinambungan program prioritas.

Tabel 3.37. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	Capaian (%) 2025	Realisasi 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	5.009.881.729.011,00	4.675.183.592.283,00	93,31	4,608,519,651,396.00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (LRA Per Tanggal 2 Maret 2026 (*unaudited*))

Untuk memberikan gambaran mengenai program-program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total belanja pembangunan daerah, dilakukan identifikasi terhadap program dengan alokasi anggaran terbesar pada Tahun 2025. Program-program tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.38. Program dengan Alokasi Anggaran Terbesar

No	Program	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Persentase Realisasi	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.735.142.454,00	415.735.090.217,00	159.000.052.237,00	72,34	Serapan relatif rendah, perlu optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendukung administrasi pemerintahan
2	Pengelolaan Pendidikan	379.853.078.057,00	357.338.785.518,00	22.514.292.539,00	94,07	Mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan
3	Penataan Bangunan Gedung	412.923.492.834,00	399.408.897.836,00	13.514.594.998,00	96,73	Mendukung pembangunan sarana prasarana publik perkotaan
4	Penyelenggaraan Jalan	223.353.693.767,00	184.097.411.244,00	39.256.282.523,00	82,42	Pembangunan infrastruktur jalan perkotaan
5	Pengelolaan Sumber Daya Air	152.275.829.072,00	148.390.666.100,00	3.885.162.972,00	97,45	Mendukung pengendalian banjir dan pengelolaan air perkotaan

Sumber: Analisis LKIP Kota Tangerang Selatan Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa beberapa program dengan alokasi anggaran terbesar menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi, terutama pada program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Program Penataan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Sumber Daya Air menunjukkan tingkat realisasi di atas 95 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan infrastruktur berjalan cukup efektif.

Sementara itu, Program Pengelolaan Pendidikan juga menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi sebesar 94,07 persen, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Namun demikian, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan tingkat realisasi yang relatif lebih rendah yaitu 72,34 persen, dengan efisiensi anggaran sebesar Rp159 miliar. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penunjang agar pemanfaatan anggaran dapat lebih efektif dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik, stabil, dan akuntabel, yang tercermin dari dominasi indikator pada kategori kinerja tinggi. Dari total 55 indikator kinerja, sebanyak 23 indikator (41,82%) telah melampaui target, dan 19 indikator (34,55%) mendekati target, sehingga secara agregat 76,37% indikator berada pada kondisi baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan efektif, khususnya pada sektor pendidikan, pelayanan publik, digitalisasi, investasi, dan tata kelola pemerintahan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi Belanja Daerah mencapai Rp4,68 triliun atau 93,31% dari pagu anggaran Rp5,01 triliun, serta meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4,61 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan kemampuan eksekusi program relatif baik serta mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Namun demikian, masih terdapat 13 indikator (23,63%) yang memerlukan perhatian, terdiri dari 3 indikator (5,45%) perlu optimalisasi dan 10 indikator (18,18%) memerlukan intervensi khusus. Indikator dengan capaian rendah umumnya berada pada isu-isu strategis yang bersifat struktural, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan (capaian 79,50%)
2. Tingkat kegemaran membaca (63,39%)
3. Produktivitas tenaga kerja (92,71% terhadap target tahunan dan 71,05% terhadap target RPJMD)
4. Prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) (75,90% bahkan 31,79% terhadap target RPJMD)
5. Sanitasi aman (10,94%)
6. Pengelolaan sampah (timbulan terolah) (60,27%)

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian makro relatif baik, masih terdapat gap pada kualitas outcome pembangunan, khususnya pada sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja Tahun 2025 didorong oleh kuatnya tata kelola, konsistensi program, serta dukungan anggaran, sementara tantangan utama terletak pada efektivitas dampak program, integrasi lintas sektor, serta transformasi kebijakan dari berbasis output menuju outcome dan impact. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pembangunan yang lebih terfokus, berbasis data, dan berorientasi pada hasil agar capaian kinerja ke depan lebih merata, dan inklusif.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, disampaikan beberapa saran strategis sebagai berikut:

- a. Penguatan orientasi kinerja berbasis outcome dan impact, dengan memastikan setiap program dan kegiatan memiliki keterkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran strategis serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
- b. Percepatan intervensi pada indikator berkinerja rendah, khususnya pada kemiskinan, literasi, ketahanan pangan, sanitasi, produktivitas tenaga kerja, dan pengelolaan sampah melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis wilayah.
- c. Peningkatan kualitas belanja daerah, dengan mengarahkan alokasi anggaran pada program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi serta memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja.
- d. Penguatan integrasi lintas sektor dan kolaborasi multipihak, baik antar perangkat daerah maupun dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian target pembangunan.
- e. Optimalisasi pemanfaatan data dan kebijakan berbasis bukti, melalui penguatan sistem data sektoral, validasi data, serta peningkatan kapasitas analisis kebijakan.
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan program, inovasi pelayanan publik, serta transformasi digital.
- g. Penguatan inovasi daerah dan replikasi praktik baik, terutama pada sektor yang telah menunjukkan kinerja tinggi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan pelaksanaan saran tersebut, diharapkan kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan ke depan dapat semakin optimal, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan yang lebih merata, dan inklusif.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BENYAMIN DAVNIE**
Jabatan : **WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tangerang Selatan, 1 Oktober 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DAVNIE

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	Urusan Leading Sektor	Wali Data
				2025		
T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,42-84,68		BPS
	S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	12,04	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,12	Urusan Pendidikan	BPS, Dinas/Badan Urusan Pendidikan
		Kemampuan Literasi SD	Skor	69,67	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan
		Kemampuan Literasi SMP	Skor	82,38	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan
		Kemampuan Numerasi SD	Skor	60,20	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan
		Kemampuan Numerasi SMP	Skor	71,11	Urusan Pendidikan	Dinas/Badan Urusan Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	Urusan Leading Sektor	Wali Data
				2025		
	S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,21	Urusan Kesehatan	BPS
	S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	Tingkat Kemiskinan	%	1,91-2,25	Urusan Sosial	BPS
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,91	Urusan Sosial	Kementerian Sosial, Dinas/Badan Urusan Sosial
	S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,70	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	BKKBN, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,174	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	BPS, Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Perlindungan Anak	Indeks	73,05	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas/Badan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	S5. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	55,96	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas/Badan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi	S6. Meningkatnya literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	88,49	Urusan Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
		Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	%	5,40-6,31		BPS
		PDRB (ADHB) Per Kapita	Juta Rp	86,03-87,82		BPS
		Kontribusi PDRB terhadap Provinsi Banten	%	13,01-13,08		BPS, diolah
		Rasio Gini	Indeks	0,353-0,380		BPS

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	Urusan Leading Sektor	Wali Data
				2025		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,76-5,65	Urusan Tenaga Kerja	BPS
	S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global	Proporsi PDRB Perdagangan dan Jasa	%	69,60		BPS, diolah
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,11	Urusan Pariwisata	BPS, diolah
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	11,64	Urusan Pariwisata	BPS, diolah
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	52,40		BPS, diolah
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	Urusan Kopersai dan UMKM	BPS, diolah
	S2. Meningkatnya peran serta dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan inklusif berbasis penguatan IPTEK dan inovasi	Produktivitas tenaga kerja per total output (PDRB ADHK)	Juta Rp	127,96-129,10	Urusan Tenaga Kerja	BPS, diolah
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,50	Urusan Tenaga Kerja	BPS, Dinas/Badan Urusan Tenaga Kerja,
	S3. Meningkatnya investasi daerah berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHB)	%	44,00		BPS, diolah
		Nilai investasi (PMDN dan PMA)	Triliun Rp	8,70	Urusan Penanaman Modal	Dinas/Badan Urusan Penanaman Modal
T3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,50	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,25	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	S2. Terwujudnya	Indeks Masyarakat	Indeks	49,87	Urusan Komunikasi	Kementerian Komunikasi

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	Urusan Leading Sektor	Wali Data
				2025		
	pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis	Digital Indonesia			dan Informatika	dan Digital
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	66,36	Urusan Arsip	ANRI
S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien		Nilai SAKIP	Nilai	70,00	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Jumlah kerja sama antar Pemerintah Daerah	angka	5	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Rasio Pajak terhadap PDRB (ADHB)	%	1,92	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Predikta t	WTP	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
		Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,00	Unsur Keuangan	Dinas/Badan Unsur Keuangan
S4. Meningkatkan kualitas regulasi yang adaptif dan efektif dalam mendukung percepatan pembangunan		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,3	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
S5. Meningkatkan profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima		Indeks Sistem Merit	Indeks	330	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
		Indeks BerAkhlaq	Indeks	80,50	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,00	Unsur Kepegawaian	Dinas/Badan Unsur Kepegawaian
S6. Meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	77,00	Unsur Pengawasan	Dinas/Badan Unsur Pengawasan
S7. Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah		Indeks Inovasi daerah	Angka	52,00	Unsur Penelitian dan Pengembangan	Kementerian Dalam Negeri RI (BSKDN)
		Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,29	Unsur Penelitian dan Pengembangan	BRIN

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun	Urusan Leading Sektor	Wali Data
				2025		
	andil, inklusif, dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaian	%	21	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan berkelanjutan	%	99,74	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas/Badan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16,00	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas/Badan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila		Indeks Harmoni	Indeks	7,40	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kementerian Dalam Negeri RI, Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,10	Urusan Kebudayaan	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek, Dinas/Badan Urusan Kebudayaan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	77,5	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Demokrasi	Indeks	86,50	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Rasa Aman	Angka	73,70	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

5. INDIKATIF PENDANAAN PROGRAM

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
1	MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG UNGGUL, BERDAYA SAING GLOBAL DAN SEJAHTERA					
			T1. Terwujudnya SDM yang unggul, berdaya saing global dan sejahtera			
			S1. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua			
				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	379,853,078,057
					Program Pengembangan Kurikulum	92,490,000
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7,387,868,259
			S2. Meningkatnya derajat kesehatan pada seluruh siklus kehidupan untuk semua			
				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	314,737,150,349
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3,343,684,862
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	721,036,330
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11,705,851,804
			S3. Terwujudnya percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial			
				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	380,167,375
					Program Penanganan Bencana	647,557,512
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	316,695,016
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5,297,374,100
					Program Rehabilitasi Sosial	1,362,539,097
			S4. Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak			
				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	92,423,000
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1,179,828,000
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	32,140,000
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,248,679,000
					Program Perlindungan Khusus Anak	614,090,740
					Program Perlindungan Perempuan	574,491,110

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7,283,955,000
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2,131,537,000
					Program Pengendalian Penduduk	305,889,000
			S5. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan			
				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	34,641,084,091
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1,380,600,000
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1,146,300,000
			S6. Meningkatkan literasi masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan digital			
				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	713,764,593
2	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAERAH YANG BERKEADILAN BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH, INOVASI DAN TEKNOLOGI					
		T2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan daerah, inovasi dan teknologi				
			S1. Berkembangnya potensi unggulan daerah terutama sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan global			
				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	396,542,000
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	175,423,272
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	611,809,845
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	224,054,503
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	273,462,894
					Program Pengembangan UMKM	624,052,710
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	101,634,678
				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	848,230,848
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	197,545,980
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,800,759,990
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	224,648,610

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
3	MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS					
		T3. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang profesional, inovatif dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan				
		S1. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif, efisien, dan inklusif				
				KECAMATAN	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1,326,284,527
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46,939,891,591
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78,834,086,331
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,880,586,355
				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	238,120,000
					Program Pendaftaran Penduduk	1,869,625,000
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	208,085,000
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	5,000,000
		S2. Terwujudnya pengarusutamaan transformasi digital pada sektor-sektor strategis				
				Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	693,943,120
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	22,770,000
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	8,760,000
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	40,317,573,729
					Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	11,632,292,400
				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi	351,675,000
		S3. Terbangunnya kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi yang berbasis jejaring, akuntabel, transparan dan efisien				
				Inspektorat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38,025,889,842
				Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	161,512,122,842
				Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33,943,867,218

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,169,258,665
				Keuangan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4,836,744,563
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8,730,864,120
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11,582,515,605
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	105,676,404,448
				Perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,574,254,600
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24,382,497,206
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2,622,584,570
				Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	43,968,425,323
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150,071,553,515
					Program Perekonomian dan Pembangunan	3,570,757,985
				Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	44,868,612,534
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99,824,999,574
				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24,129,492,949
				Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19,493,650,885
				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	559,870,033,762
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49,438,231,510
				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15,944,475,775
				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,940,068,470

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74,547,089,908
				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14,947,097,359
				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,379,084,843
				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84,705,827,337
				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14,227,538,374
				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30,761,456,019
				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	571,593,950,454
				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36,042,022,676
				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16,512,301,936
				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13,397,624,464
				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33,545,472,402
				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14,535,986,574
				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	102,635,200
				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10,622,133,804
			S5. Meningkatnya profesionalisme ASN yang kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan prima			
				Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	3,133,685,100
				Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,491,825,182
			S6. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan			
				Inspektorat Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	115,651,174
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	268,710,032

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
			S3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni			
				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	189,546,500
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	286,849,300
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25,893,282,513
					Program Pengelolaan Persampahan	115,798,951,136
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	114,305,813
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1,991,218,432
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	112,110,740
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1,076,947,908
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	729,716,412
			S4. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur perkotaan yang andil, inklusif, dan berkelanjutan			
				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	610,645,900
					Program Penataan bangunan Gedung	485,816,166,063
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8,822,990,902
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6,771,699,443
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,964,321,142
					Program Penyelenggaraan Jalan	217,377,377,767
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,887,480,942
				Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	88,976,390,170

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Urusan	Program	Anggaran (Rp.)
				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Program Penatagunaan Tanah	182,537,710
				Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	29,417,475,640
					Program Pengembangan Perumahan	4,691,217,808
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	302,071,018,920
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	29,414,891,863
S5. Menguatnya keterikatan sosial antar warga serta kehidupan bermasyarakat yang berbudaya, demokratis dan menjunjung tinggi HAM berlandaskan Pancasila						
				Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	237,063,749
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	917,582,336
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,524,146,960
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3,181,276,964
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya	4,083,030,772
				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	200,698,250
					Program Pengembangan Kebudayaan	1,346,419,330
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	304,262,147
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,601,361,025
JUMLAH.....						5,000,764,221,011

Tangerang Selatan, 1 Oktober 2025

WALI KOTA TANGERANG SELATAN



BENYAMIN DAVNIE



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

INSPEKTORAT

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Jl. Maruga Raya No.1, Ciputat – Gedung 3 Lt. 6-7,
Email : inspektorat.tangsel@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025

Kami telah mereviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tangerang Selatan, 06 April 2026

INSPEKTUR,

Ir. H. ACHMAD ZUBAIR, M.Si, CGRE, CGCAE
NIP. 19700326 199803 1 006

